



BENTENG DULU KINI & ESOK

Editor

Prof. Dr. Inajati Adrisijanti



Balai Arkeologi
Yogyakarta

Kerjasama
Balai Arkeologi Yogyakarta
dan
Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
Komisariat Daerah DIY-Jawa Tengah



2013

BENTENG DULU, KINI, & ESOK

Editor:
Prof. Dr. Inajati Adrisijanti

BENTENG DULU, KINI, & ESOK

Salah satu peninggalan arkeologi dari masa kolonial Belanda di Indonesia adalah sejumlah benteng pertahanan, yang sisanya masih cukup banyak tersebar di berbagai wilayah. Mereka merupakan saksi masa lalu yang mempunyai peran dalam pembentukan sejarah bangsa. Oleh karenanya, benteng-benteng tersebut memiliki nilai penting bagi penelitian, karena mereka mengandung banyak aspek untuk diungkapkan, baik dari sisi rancang bangun, latar belakang lokasi pendiriannya, sistem pertahanan pada masanya, kehidupan di balik tembok-temboknya, kisah-kisah perlawanan serta perjuangan yang melatari pendiriannya, dan lain sebagainya. Sebagian besar benteng yang masih tersisa saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Upaya-upaya pelestarian sangat dibutuhkan untuk mencegah agar kondisi benteng-benteng itu tidak bertambah rusak, sehingga di masa mendatang benteng-benteng tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang berguna bagi masyarakat luas.



Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 081-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com

ISBN 978-602-1228-65-4



BENTENG DULU, KINI, DAN ESOK

BENTENG DULU, KINI, DAN ESOK



Benteng Dulu, Kini dan Esok

© Penerbit Kepel Press

Desain sampul :
Tim Kreatif Kepel Press

Desain Isi :
Tim Kreatif Kepel Press

Cetakan pertama, September 2014
Diterbitkan oleh penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp/faks : 0274-884500
Hp : 081 227 10912
email : amara_books@yahoo.com

ISBN : 978-602-1228-65-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi diluar tanggung jawab percetakan

PENGANTAR

KEPALA BALAI ARKEOLOGI YOGYAKARTA

Akhir-akhir ini isu-isu tentang konflik kepentingan sering terjadi di situs-situs cagar budaya terutama di kawasan Benteng Kolonial. Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa selama kurang-lebih 300 tahun, oleh karena itu sangat wajar apabila banyak ditemukan benteng pertahanan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Munculnya konflik kepentingan tersebut akibat masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pelestarian dan pemanfaatan situs cagar budaya. Akibatnya tidak sedikit benteng-benteng kolonial yang dikategorikan sebagai situs cagar budaya rusak karena pembiaran, rusak karena salah kelola, dan rusak karena kesengajaan. Selain itu, ada pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa semua tinggalan masa kolonial tidak perlu dilestarikan, karena bangunan-bangunan itu akan mengingatkan penjajahan dan kekejaman kolonial serta kepedihan bangsa. Maka dari itu pemahaman seperti ini harus diluruskan dengan mengedepankan pentingnya nilai sejarah bangsa.

Balai Arkeologi Yogyakarta sebagai salah satu leading sector dalam sistem pengelolaan sumberdaya arkeologi di wilayah kerjanya, sesuai dengan tugas dan fungsinya

sudah semestinya melakukan upaya-upaya pencerahan kepada masyarakat dalam memahami arti penting tinggalan sumberdaya arkeologi, termasuk benteng-benteng kolonial tinggalan dari masa penjajahan. Untuk itulah bertepatan dengan Ulang Tahun Purbakala Indonesia yang ke 97 (14/06/1913-14/06/2010), Balai Arkeologi Yogyakarta bekerjasama dengan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah DIY-Jawa Tengah menyelenggarakan Seminar Sehari bertema *“Benteng Dulu, Kini, dan Esok”*. Tema ini merupakan tema yang diangkat secara nasional dengan fokus kegiatan pameran foto benteng-benteng kolonial di seluruh Indonesia bertempat di Benteng Vredenburg, Yogyakarta.

Hasil dari Seminar Sehari yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2010 di Benteng Vredenburg Yogyakarta baru diterbitkan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2013. Sebuah Bunga Rampai tentang Benteng-Benteng Kolonial dari Sumatera Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, dan Maluku tersaji dalam bentuk buku bacaan ilmiah-populer yang bermanfaat tidak hanya untuk siswa, mahasiswa, dan pengajar, akan tetapi dapat dibaca oleh kalangan masyarakat luas. Atas nama lembaga Balai Arkeologi Yogyakarta kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah andil dalam penerbitan buku literatur ini. Kepada para pembaca yang budiman diucapkan selamat membaca semoga buku ini bermanfaat, amin.

Yogyakarta, 2013.

Drs. H. Siswanto, MA.

PENGANTAR PENERBIT

Tinggalan masa kolonial bangsa Eropa di Indonesia pada masa abad 16 hingga pertengahan abad 19 tentu sangat banyak dan beragam. Salah satu yang dirangkum dalam buku ini adalah peninggalan situs budaya berupa Benteng. Dalam hal mengelola yang artinya berupa aktivitas memelihara dan memanfaatkan situs budaya seperti Benteng di Indonesia bagi keperluan akademis dan keperluan lainnya bukan perkara mudah.

Pemangku kepentingan pengelola situs budaya menghadapi kondisi yang tidak sederhana. Kesadaran budaya masyarakat terhadap situs budaya belumlah pada tahap yang mampu mengapresiasi hasil sebuah peradaban dari sebuah era dengan baik. Perilaku pembiaran, kesalahan pengelolaan hingga perusakan dan pencurian merupakan unsur-unsur yang melemahkan.

Maka perlu dikembangkan kesadaran bahwa mengelola tinggalan jaman kolonial bukanlah usaha untuk mengenang penjajahan yang memedihkan dan mensengsarakan namun sebuah usaha mendokumentasikan sejarah perjalanan sebuah bangsa.

Benteng Vredeberg yang gambarnya menjadi ilustrasi sampul buku ini merupakan salah satu Benteng tinggalan Belanda di Yogyakarta yang masih berdiri kokoh, terawat dan memiliki fungsi luar biasa bagi masyarakat luas, yakni

fungsi pembelajaran serta fungsi rekreasi dan yang terpenting statusnya masih dimiliki oleh Negara. Benteng sejenis, Vastenberg di kota Solo mengalami kondisi berbeda,

Upaya melakukan restorasi pada Benteng yang rusak dan usaha menuliskan sejarah Benteng di Indonesia adalah sumbangan luar biasa bagi dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

Yogyakarta, 2013

Penerbit Kepel Press

DAFTAR ISI

Pengantar Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta	v
Pengantar Penerbit	vii
Daftar Isi	viii
1. Benteng di Sumatera Bagian Utara dan Perspektif	
Penelitiannya (<i>Lucas Partanda Koestoro</i>)	1
A. Pengantar	1
B. Pendahuluan	3
C. Kilasan Benteng-Benteng di Sumatera Bagian Utara	5
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	6
2. Provinsi Kepulauan Riau	9
3. Provinsi Riau	14
4. Provinsi Sumatera Barat	16
5. Provinsi Sumatera Utara	21
D. Penutup	39
2. Benteng Kuto Besak dari Keraton Hingga Instalasi	
Militer (<i>Aryandini Novita</i>)	45
A. Pendahuluan	45
B. Keraton-Keraton Kesultanan Palembang	46
C. Benteng Kuto Besak Pada Masa Kesultanan	
Palembang Darussalam	51
D. Benteng Kuto Besak Pada Masa Kolonial	53

E. Pembahasan	55
F. Penutup	58
3. Benteng Tarakan : Keseimbangan Antara Kepentingan Politik dan Pelestarian (Drs. Edi Triharyantoro)	61
A. Keletakan Tarakan	61
B. Latar Sejarah Tarakan	62
C. Penutup	73
4. Benteng-Benteng Kolonial Eropa di Pulau Ternate (Nurachman Iriyanto)	85
A. Munculnya Benteng Eropa di Pulau Ternate	85
1. Benteng-benteng Eropa di Pulau Ternate	89
2. Pengelolaan Benteng-benteng Eropa Pulau Ternate	107
B. Penutup	113
5. Penilaian Skala Prioritas dan Revitalisasi Kawasan Benteng Kolonial (Wuri Handoko)	119
A. Latar Belakang	119
B. Penilaian Kawasan Benteng Kolonial dan Skala Prioritas Program Revitalisasi	122
C. Revitalisasi Kawasan Benteng dan Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah	129
D. Kesimpulan	140
6. Potret Beteng Vastenburg Kemarin, Kini, dan Akan Datang (Drs. Soedarmono, SU)	145
A. Setting Bandar Perdagangan	145
B. Kolonial vs Kerajaan	147
C. Potret Vastenburg Masa Kini	151
D. Harapan Vastenburg Masa Depan	153

7. Reinkarnasi Vastenburg: Tinjauan Psikologi Arsitektur Menyoal Memori Kolektif Masyarakat Surakarta

<i>(Deddy K. Halim, PhD)</i>	155
A. Pendahuluan	155
B. Memori Kolektif	157
C. Melestarikan penjajahan ?	161
D. Kebutuhan akan Simbol Kota	165
E. Benteng & Hotel Butik	169
F. Skenario Konservasi	174
G. Integrasi antara Konservasi dan Pengembangan Kota	177

8. Benteng Vastenburg dan Benteng-Benteng Kolonial Lainnya dalam Perbandingan

<i>(H. Gunadi Kasnowihardjo)</i>	185
A. Pendahuluan	185
B. Pengelolaan Benteng-Benteng Kolonial dalam Perbandingan	188
1. Fort Rotterdam di Makassar	190
2. Benteng Vredeburg di Yogyakarta	193
3. Benteng Van der Wijck di Gombong	195
4. Benteng Willem di Ungaran	197
5. Fort Santiago di Manila	200
6. Fort Monroe di Hampton, Virginia	203
C. Kawasan Strategis Benteng “Mangkrak” Vastenburg	205
D. Bagaimana Mengelola Benteng Vastenburg?	210
E. Cultural Heritage → Urban Identity → Urban Development	211
F. Penutup	212

**9. Kehidupan di Balik Tembok Benteng di Masa Lampau:
Hasil Penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta di Benteng
Sumenep dan Benteng Lodewijk, Jawa Timur**

<i>(Novida Abbas)</i>	217
A. Pendahuluan	217
B. Hasil Penelitian di Benteng Sumenep dan Benteng Lodewijk	220
1. Benteng Sumenep	220
2. Benteng Lodewijk	223
C. Diskusi dan Rangkuman	226

BENTENG DI SUMATERA BAGIAN UTARA DAN PERSPEKTIF PENELITIANNYA

oleh:

Lucas Partanda Koestoro

A. Pengantar

Benteng dan situs benteng merupakan bukti nyata suatu peradaban bangsa di masa lalu. Di Sumatera bagian utara –di lima wilayah provinsi– dijumpai cukup banyak, dalam beragam kondisi dan masa pembangunan/pemakaian, terkait dengan pusat-pusat kekuasaan di kawasan ini. Sebagai pusaka budaya bangsa Indonesia, merupakan mata rantai yang menghubungkan masa kini dengan peradaban di masa lalu. Untuk itu menjadi kewajiban bersama menjaga, melestarikan, memanfaatkan, dan mengembangkannya.

Secara fisik, benteng lebih kerap dikaitkan dengan upaya sekelompok manusia dalam mempertahankan diri dari serangan pihak lain. Atau justru bagian dari strategi penyerangan yang bersifat okupasi/pendudukan. Benteng cenderung berkonotasi peperangan. Perang sendiri merupakan salah satu perwujudan adanya konflik antar kelompok

manusia. Konflik ditimbulkan oleh berbagai sebab. Serbuan dari kelompok manusia yang lain, yang dirasa akan mengancam keselamatan harta-benda, jiwa, dan kehormatan, akan dicegah dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menghindari gangguan terhadap kediaman/kubu kelompok yang diserang. Mereka harus mempertahankannya, dan upaya membangun pertahanan yang mampu mengamankan adalah membuat benteng. Benteng merupakan batas wilayah yang akan diamankan, berbentuk bangunan pertahanan menggunakan beragam bahan. Sebagian menggunakan tanah yang ditinggikan, sebagian membuat pagar kayu, atau tumpukan batu, dan sebagian lain melengkapinya dengan parit cukup dalam maupun tanaman bambu/tanaman lain yang berduri. Pada intinya mereka membuat bentuk penghalang untuk menahan laju para penyerang yang berniat memasuki wilayah yang dipertahankan.

Di Indonesia, selain di daerah pedalaman, benteng/situs perbentengan dijumpai pula di pesisir, yaitu di tepi pantai, muara/kuala sungai; atau di daerah pertemuan sungai, di tepi jurang, di ujung lembah, puncak bukit, dan lainnya. Pengamatan atas objek-objek tersebut ternyata membuka peluang untuk juga mengkaji benteng/situs perbentengan tanpa melulu dikaitkan dengan urusan militer. Ada kesempatan melihatnya dari aspek kehidupan lain yang menyertainya.

Menyangkut keberadaan benteng/situs perbentengan, harus diingat bahwa pengembangan kajian dalam arkeologi hendaknya berlaku pula di lingkungan lembaga-lembaga arkeologis. Berbagai kajian perlu dikembangkan, dan itu meliputi antara lain kajian-kajian seni yang terkait dengan

data arkeologi (arkeologi seni); arkeologi linguistik (yang memanfaatkan hasil maupun metodologi linguistik bagi pemecahan masalah-masalah arkeologis); atau arkeologi maritim (sebagian benteng sebagai data arkeologi terkait dengan aktivitas kemaritiman juga). Kajian terhadap benteng dalam arkeologi juga termasuk bagian yang sungguh menarik dan layak dikembangkan.

B. Pendahuluan

Orang kerap menghubungkan keberadaan benteng dengan sikap manusia yang cenderung untuk menguasai, dan sebaliknya tidak ingin dikuasai. Dalam keseharian, sikap demikian memicu terjadinya permusuhan yang diikuti dengan tindak lanjut lain, di antaranya perang. Demikianlah perang sebagai sebuah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk memaksa salah satu pihak tunduk (Suryohadiprojo, 2008:1-2). Benteng digunakan dalam perang untuk dapat menundukkan kehendak pihak lain yang memusuhi. Namun di luar itu ada alasan lain yang menyebabkan orang membangun benteng, seperti pembuatan benteng untuk menahan serangan bencana alam yang berupa banjir. Hal ini memang kerap memunculkan perbedaan sudut pandang akan arti benteng. Benteng memang dapat dilihat dalam arti bangunan tempat berlindung atau bertahan (dari serangan musuh); benteng sebagai dinding (tembok) untuk menahan serangan; dan dapat pula benteng diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk memperkuat atau mempertahankan kedudukan, dan posisi.

Kondisi demikian memunculkan ketertarikan akan keberadaan benteng-benteng di Sumatera bagian utara. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Pertama berkenaan dengan bentuk dan lokasi benteng. Kedua pada kelompok masyarakat yang membangun dan menggunakannya. Kemudian yang ketiga adalah pada masa pembangunan dan penggunaan benteng. Selanjutnya yang keempat, berkenaan dengan pengenalan tentang berbagai aspek kehidupan di lokasi perbentengan.

Tujuan kegiatan penelitian tentang benteng adalah upaya mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik benteng; kemudian tentang kelompok masyarakat yang membangun dan menggunakannya; selain itu juga tentang latar belakang dan kronologi pembangunan dan penggunaan. Hal lain yang ingin diungkapkan terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang pernah berlangsung di seputar perbentengan.

Sasaran kegiatan kajian benteng bermula pada tersedianya peta persebaran situs perbentengan di Sumatera bagian utara yang berisikan berbagai hal yang terkait dengan keberadaannya. Selain itu, informasi yang diperoleh akan berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya pemahaman aspek-aspek kehidupan masa lalu di suatu wilayah, maupun pemanfaatan lain bagi kepentingan yang lebih luas. Penelitian arkeologi tentang benteng diharapkan juga membuahkan masukan bagi kepentingan praktis yang saat ini sedang banyak dibicarakan di Indonesia, yakni upaya pertahanan negara yang memerlukan pengembangan sistem pertahanan semesta, yang melibatkan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam upaya pemenuhannya, maka kerangka pikir dan metode juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Adalah sifat manusia untuk tetap mempertahankan kehidupan pribadi maupun komunitasnya. Manusia selalu menjaga kelangsungan hidupnya, juga dengan melakukan hubungan dengan pihak lain. Bahwa dalam kesempatan interaksi itu muncul gejala-gejala yang dapat membahayakan hidupnya, hal tersebut juga disadari. Berkenaan dengan kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dari gesekan yang serius dengan kelompok lain, manusia berusaha melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menyiapkan sarana pertahanan. Pembangunan sarana pertahanan tentunya juga dikaitkan dengan kemampuan kelompok tersebut dalam memanfaatkan berbagai sumber daya. Itu berhubungan dengan sumber daya manusia dan budaya, serta sumber daya alam lingkungan.

Pemecahan permasalahan bagi pencapaian tujuan penelitian dimulai dengan pengumpulan data, baik di lapangan maupun di perpustakaan, yang selanjutnya akan dianalisis. Data yang telah dianalisis diperlakukan sebagai bahan bagi penyiapan interpretasi. Berkenaan dengan itu maka penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni suatu bentuk penelitian yang biasa diawali dengan pengumpulan data melalui observasi empiris. Kelak data yang telah terkumpul itu dikelompokkan, dianalisis dan disintesis, untuk akhirnya ditarik kesimpulan atau generalisasi. Makin banyak data terkumpul, kesimpulan yang ditarik makin dianggap mendekati kebenaran.

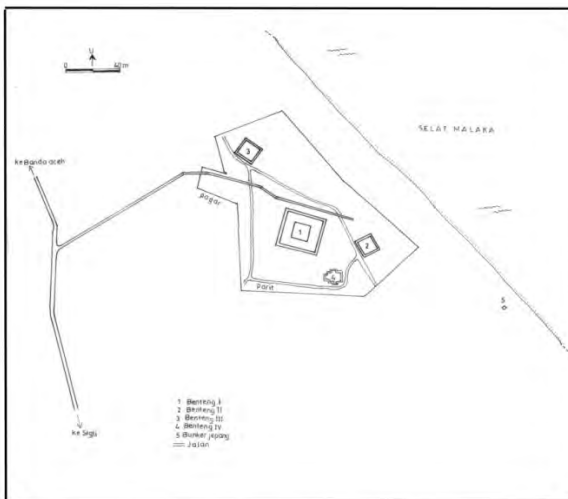
C. Kilasan Benteng-Benteng di Sumatera Bagian Utara

Berdasarkan aktivitas arkeologis yang dilakukan selama ini, diketahui banyak peninggalan berupa benteng di wilayah kerja Balai Arkeologi Medan. Inilah kilasan beberapa benteng yang keberadaannya cukup menarik.

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

a. Benteng Indrapatra

Berada di wilayah Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar (Soetrisna et al,2007:37). Letaknya di tepi pantai Selat Malaka, pada lahan pertanian (sawah dan kebun penduduk). Bahan yang digunakan berupa batu, pasir dan kapur. Di areal seluas 7.400 m², terdapat susunan tiga buah bangunan benteng, yang semuanya menghadap ke arah utara.



Benteng Indrapatra

Benteng pertama berukuran panjang 70 meter, lebar 70 meter, tinggi 3,70 meter. Tebal temboknya 4 meter. Pada dinding bagian dalam terdapat jalan keliling selebar 3 meter, sementara di bagian dalam benteng terdapat 3 buah sumur berdinding tembok dan beratap kubah. Sisa fondasi bangunan juga masih dijumpai di bagian tengah halaman dalam benteng. Benteng berikutnya berukuran panjang 35 meter, lebar 35 meter, dan tinggi 4,10 meter. Dinding benteng dilengkapi dengan lubang-lubang pengintaian, dan juga dua buah bastion. Selanjutnya adalah benteng ketiga, yang berukuran panjang 35 meter, lebar 35 meter, dengan tembok yang tersisa setinggi 1,20 meter. Informasi tempatan menyebutkan bahwa benteng ini dipersiapkan untuk menghadapi serangan Portugis. Adapun nama Indrapatra dikaitkan dengan kuatnya pengaruh Hindu-Buddha pada masa pembangunannya

b. Benteng Iskandar Muda

Terdapat di wilayah Desa Beurandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 33 kilometer ke arah timurlaut kota Banda Aceh. Letaknya di tepi barat ruas Sungai Kreung Raya. Jarak ke garis pantai, di sebelah utaranya, sekitar 400 meter. Bahan bangunannya berupa batu, pasir, dan kapur. Benteng berdenah bujur sangkar ini memiliki 3 lapis dinding. Dinding terluar berukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter lebih tinggi dibandingkan dua dinding di bagian dalamnya. Ketebalan dinding lapis pertama sekitar 0,90 meter dengan tinggi sekitar 2-3 meter. Batu yang digunakan berwarna hitam yang direkatkan dengan menggunakan campuran lempung dan kapur. Lapa/

plesterannya berbahan pasir, lempung dan kapur. Dinding lapis kedua/tengah berukuran 42 meter x 42 meter dengan tinggi 1,70 meter dan tebal 0,75 meter. Selanjutnya dinding ketiga, bagian paling dalam, berukuran 21 meter x 21 meter yang tingginya 0,90 meter dan tebal 0,75 meter (Soetrisna et al,2007:37).

a. Benteng Indrapuri

Berdiri sekitar 25 kilometer di sebelah timur kota Banda Aceh, benteng ini berdiri di wilayah Desa Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Bahan yang digunakan batu berlepa. Benteng segi empat ini dibangun berundak dengan panjang 73 meter dan lebar 73 meter. Undakan yang ada dibentuk dengan dibangunnya tiga lapis tembok lagi di bagian dalam. Pada lapis ketiga terdapat pintu masuk di sebelah tenggara. Adapun pada bagian undakan tertinggi, yakni bagian yang dibatasi lapis keempat dinding benteng dengan ukuran 18,80 meter x 18,80 meter itu terdapat bangunan mesjid. Dinding benteng itu sekaligus menjadi dinding bangunan mesjid beratap tumpang tiga. Informasi tempatan menyebutkan bahwa benteng ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, sementara di jurai atap mesjid terdapat pertulisan singkat yang menyebutkan angka tahun 1270 H. Di mesjid ini pada tahun 1874 dinobatkanlah Sultan Muhammad Daud Syah II. (Soetrisna et al,2007:39). Sumber lain menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Daud Syah dinobatkan sebagai sultan di Masjid Indrapuri pada tahun 1878 dan berkedudukan di Keumala, daerah Pidie (Alfian,1992:20).

2. Provinsi Kepulauan Riau

a. Kota Piring

Situs ini menempati sebuah (pulau) delta yaitu Pulau Biram Dewa yang dikelilingi ruas Sungai Galang, di Kampung Kota Piring, Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang (Koestoro, 2005:68-70). Luas arealnya sekitar 3 hektar. Sisa tinggalan berupa pagar tembok dengan bastion (*seleka*) di sudut barat laut. Pagar tembok sisi barat sepanjang 110 meter, dan sebagian sisi utara (28 meter) masih tampak baik, berbeda dengan sisi timur dan selatan yang sudah tidak berbekas. Tembok yang tersisa berketinggian antara 0,70 meter hingga 2 meter, dan tebalnya 40 centimeter.

Di bagian tenggara pulau ini masih dijumpai sisa pagar tembok membentuk sudut siku. Sisi barat sepanjang 10 meter dan sisi utara 20,70 meter. Di bagian tengah pulau terdapat sisa fondasi bangunan berdenah empat persegi panjang yang diduga adalah sisa istana. Sisi utara dan sisi selatan masing-masing 11,30 meter dan



Benteng Kota Piring

sisi timur dan sisi barat masing-masing 8,10 meter. Materi penyusun pagar keliling itu adalah adonan brekel bauksit dengan pasir dan kapur. Informasi tempatan menyebutkan bahwa pagar yang mengelilingi kompleks tempat tinggal

penguasa dan pusat pemerintahan Kerajaan Riau itu dahulu memiliki 13 buah pintu.

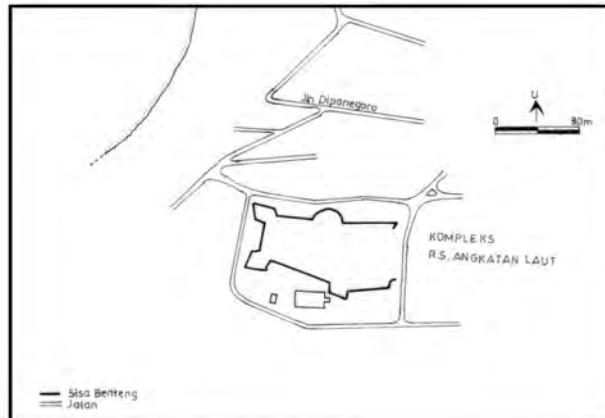
Penamaan Kota Piring berkenaan dengan penempelan keramik-keramik Cina pada bagian atas tembok keliling, seperti diceritakan oleh penduduk sekitar. Sementara sumber lain menyebutkan tentang kemolekan istana tersebut pada masanya. Kelak Kota Piring ditinggalkan setelah armada Belanda di bawah pimpinan Jakob Pieter van Braam menghancurkan pertahanan Raja Haji di Teluk Ketapang pada tahun 1784.

b. Benteng Tanjung Butung

Berada di sebelah selatan Pelabuhan Tanjungpinang, bangunan pertahanan itu menempati daerah berbukit Tanjung Butung di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang (Koestoro et al,2004:22-23). Komponen utamanya berupa batuan laterit berukuran antara 50 x 25 x 15 cm³ hingga 85 x 35 x 30 cm³. Saat ini, di kawasan itu berdiri beberapa bangunan, di antaranya kompleks Rumah Sakit Angkatan Laut, dan perumahan purnawirawan TNI AL. Sisa benteng itu sendiri terdiri atas tembok keliling dan asrama tentara yang dibangun pada masa yang lebih muda. Bentuk dasar tembok kelilingnya umum dijumpai pada benteng-benteng kolonial di Nusantara, yakni persegi empat yang dicirikan terutama oleh adanya bastion di bagian sudut. Arealnya seluas sekitar 130 meter x 80 meter.

Dua bastion benteng ini yang berdenah segi lima menempati sisi barat benteng, menghadap ke laut, ke arah muara Sungai Riau di sebelah baratlaut dan ke arah Pulau Penyengat di sebelah barat. Bagian lain yang juga menonjol

pada dinding benteng itu menempati sisi utara (setengah lingkaran) dan sisi selatan (jajaran genjang). Bastion di sisi timur benteng sudah tidak dijumpai lagi.



DENAH SKETSA DI SEKITAR PELABUHAN KOTA TANJUNG PINANG

Benteng Tanjung Butung

c. Benteng dan Parit Pertahanan di Pulau Penyengat

Sarana pertahanan berupa benteng di Pulau Penyengat, di Kota Tanjungpinang, terdapat di Bukit Kursi, Bukit Tengah, dan Bukit Penggawa. Jaraknya tidak begitu jauh dari garis pantai. Benteng-benteng tersebut dilengkapi dengan parit-parit pertahanan berkedalaman 3 meter berstruktur batu di sekitar benteng. Informasi tempatan menyebutkan bahwa sarana pertahanan itu dibangun pihak Kerajaan Riau pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Riau IV, Raja Haji, tahun 1782 hingga tahun 1784 untuk menghadapi Belanda. Benteng ini dibangun untuk melindungi pusat kekuasaan yang ketika itu berada di Kota Piring, di bagian hulu Sungai Riau (Koestoro et al, 2004:35).

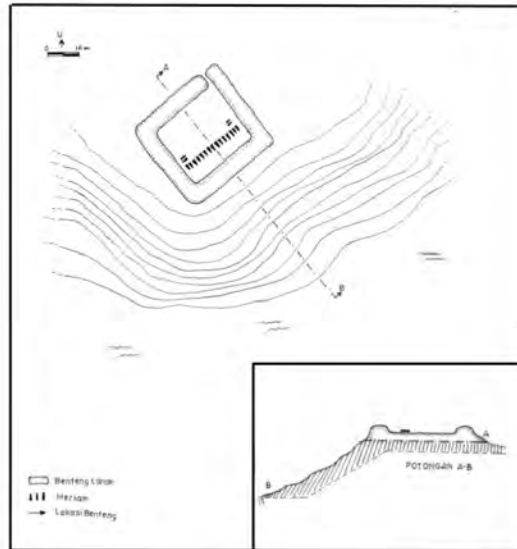
d. Benteng Bukit Cening

Berada di wilayah Kampung Seranggo, Kecamatan Daik, Kabupaten Lingga, benteng ini menempati sebuah bukit - yang permukaan tanahnya datar – di areal berawa (Koestoro et al, 2001:11-13). Benteng menghadap ke arah tenggara – ke laut bebas di bagian selatan Pulau Lingga - dan dibuat dengan meninggikan serta mengeraskan tanah, sehingga membentuk tanggul persegi empat dengan ukuran panjang 32 meter dan lebar 30 meter. Tebal dinding/tanggul tanah 4 meter dengan tinggi sekitar 1-1,50 meter. Bagian kiri, kanan, dan depan benteng dilengkapi parit, yang sebagian telah tertutup tanah. Sebanyak 19 buah meriam masih dijumpai di sana. Sebuah meriam sepanjang 2 meter dengan laras berdiameter 11 cm, berangka tahun 1783. Meriam lain berukuran 2,30 meter dengan diameter laras 12 cm, berangka tahun 1797. Demikian pula dengan meriam lain sepanjang 2,40 meter dan berdiameter laras 12 cm, berangka tahun 1797. Benteng ini berada sekitar 2 kilometer di sebelah tenggara Istana Damnah.

Konstruksi dinding benteng ini selain berfungsi sebagai pelindung juga menjadi dudukan meriam. Keletakan benteng di tempat yang tinggi jelas menghasilkan jangkauan penglihatan yang cukup jauh. Letaknya di tepi pantai tentu terkait dengan fungsinya bagi pertahanan keamanan Kerajaan Lingga atas ancaman serangan musuh melalui laut. Selain itu benteng ini juga berfungsi memantau aktivitas di muara Sungai Daik dan Tanjung Butun, jalan masuk ke pusat Kerajaan Lingga dahulu.

Meriam VOC di benteng itu berasal dari masa pemerintahan Sultan Mahmud (1761-1812). Kerajaan Lingga sendiri

didirikan pada tahun 1801, saat pemerintahan Hindia Belanda menggantikan VOC yang bangkrut di akhir abad ke-18.



DENAH SKETSA SITUASI BENTENG BUKIT CENING

Benteng Bukit Cening

e. Benteng Pulau Mepar

Di Pulau Mepar, sekitar 1 kilometer di selatan Tanjung Butun di daratan Pulau Lingga, di wilayah Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga juga terdapat serangkaian bangunan perbentengan menempati lokasi yang menghadap ke arah laut lepas. Ada 5 buah bangunan yang dilengkapi 2 buah sumber air/sumur. Bangunan pertama berada di atas bukit di sisi timur Pulau Mepar. Berbahan tanah yang dikeraskan, berukuran 25 meter x 23 meter dengan tebal dinding 2,50-3 meter dan tinggi tersisa sekitar 1-1,50 meter. Menempati sudut tenggara pulau, bangunan dengan

parit yang cukup dalam mengelilinginya itu dilengkapi dua bagian menyerupai bastion dengan lebar 2-3 meter. Adapun bangunan lain tidak sebesar bangunan pertama. Ukurannya berkisar 300 m² dengan denah persegi empat, kecuali bangunan di sebelah selatan pulau yang berbentuk segitiga dengan luas sekitar 150 m². Umumnya sudah dalam keadaan rusak. Meriam yang dahulu terdapat di lingkungan perbentengan di pulau ini telah dipindah penduduk ke permukiman di bagian utara (Koestoro et al, 2001:19-21).

3. Provinsi Riau

a. Benteng tanah kompleks makam raja-raja Indragiri Hulu

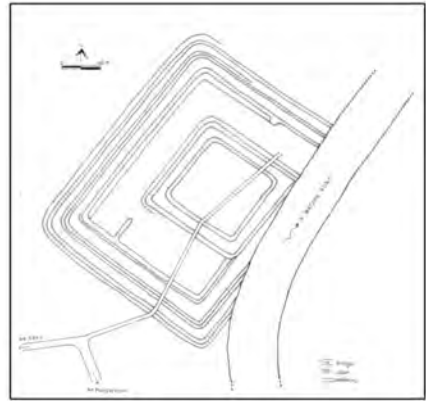
Letaknya di wilayah Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Benteng ini terdiri atas dua bagian, satu di sebelah selatan kompleks makam dan yang lainnya terletak di sebelah barat. Perbentengan ini terletak sekitar 500 meter di bagian selatan tebing Sungai Indragiri. Di bagian benteng sebelah selatan masih dijumpai adanya tonjolan yang kemungkinan dahulu merupakan bastion.

Saat ini, dalam lingkungan benteng itu yang disebut-sebut dibangun sekitar abad ke-16 itu terdapat makam-makam raja Indragiri, yakni Makam Kasedengan, Makam Andi Sampu Muhammad, Makam Raja Usman Fadillah, dan Makam Raja Narasinga II.

b. Benteng 7 Lapis Dalu-Dalu/Kubu Aur Duri

Berada di sebelah barat ruas Sungai/Batang Sosa di wilayah Desa Dalu-dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten

Rokan Hulu. Benteng tanah berdenah persegi empat ini, menurut informasi lokal dibangun pada abad ke-19 oleh Tuanku Tambusai. Adapun penaklukan atas benteng kelompok Paderi ini dilakukan pihak Belanda pada akhir tahun 1838. Bagian yang tersisa di atas lahan seluas sekitar 4,50



Benteng 7 Lapis Dalu-Dalu

hektar ini meliputi 5 lapis dinding tanah. Cerita setempat menyebutkan bahwa sebelumnya benteng itu terdiri atas 7 lapis dinding (Soetrisna,2005:2-6).

Lapis terluar/pertama, berdenah empat persegi panjang, sisi timurlautnya sepanjang 160 meter, dan bagian tenggaranya berbatasan dengan ruas sungai. Adapun sisi barat laut panjangnya 270 meter, sisi baratdaya sepanjang 180 meter, dan sisi tenggara tersisa 70 meter yang bagian ujung timurlautnya berbatas tepi ruas sungai. Lapis terdalam/kelima, berdenah persegi empat yang sisi-sisi timurlaut, tenggara, baratdaya, dan baratlautnya berukuran panjang masing-masing 90 meter. Saat ini, terlihat bahwa lebar benteng tanah itu berkisar 4-6 meter dengan tinggi antara 1-3 meter. Adapun lebar parit antara masing-masing lapis benteng tanah itu sekitar 2-3 meter dengan kedalaman sekitar 1,50-2 meter. Sementara informasi penduduk menyebutkan bahwa dahulu parit-parit itu memiliki lebar sekitar 6-10 meter dengan kedalaman mencapai lebih dari 5 meter, dan di setiap lapisan dipenuhi rumpun bambu berduri (*aur berduri*).

C. Benteng Sembuang Khairiah Mandah

Objek ini berada sekitar 1 kilometer di tepi timur ruas Sungai Khairiah Mandah di wilayah RT II Kelurahan Mandah Khairiah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Menempati sebidang lahan yang membentuk pulau seluas 80 x 60 m² di lingkungan berawa, benteng itu masih menyimpan empat buah meriam besi. Meriam yang terbesar berukuran panjang 2,60 meter dengan diameter laras 9 centimeter. Di dekat lubang sulut terdapat hiasan berbentuk belah ketupat yang membentuk tulisan VOC (Koestoro et al,2003:41-41).

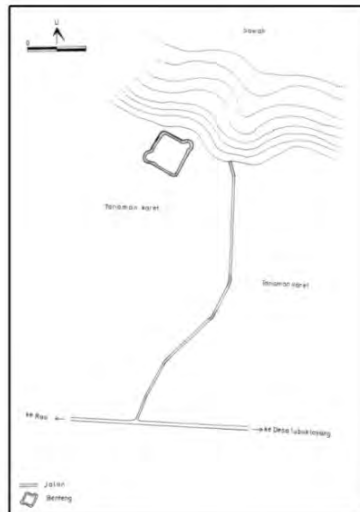
Bahan yang digunakan membentuk dinding benteng adalah batu yang ditumpuk teratur, panjang menggunduk di sepanjang tepian pulau. Di beberapa sudut, tumpukan batu itu masih terlihat jelas sementara yang lainnya sudah dalam kondisi berantakan. Pada bagian barat laut benteng itu masih terlihat jelas adanya tumpukan batu yang membentuk dermaga pulau benteng tersebut.

4. Provinsi Sumatera Barat

a. Benteng Huta Nauli/Benteng Rorak

Berada di puncak sebuah bukit di wilayah Jorong Huta Nauli, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Bangunan benteng persegi empat yang di sudut barat dan timurnya melengkung menyerupai bastion, menghadap langsung ke arah utara, ke jurang yang cukup terjal. Benteng tanah ini berukuran 50 meter x 50 meter. Dinding setinggi 1 meter ini berketebalan hingga 6 meter. Parit selebar 2 meter di sekelilingnya berkedalaman antara 0,50 - 1 meter. Informasi tempatan menyebutkan bahwa

ini adalah benteng Belanda yang dibuat pada masa Perang Paderi (Oetomo et al, 2007: 25-26).



Benteng Huta Nauli

b. Benteng Parit Batu

Letaknya di Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkuang Auo (Aur), Kecamatan Aur Limo, Kabupaten Pasaman Barat. Benteng berdenah persegi panjang berukuran 150 meter x 100 meter merupakan susunan batuan andesit, yang membentuk dinding setebal 1,25-2 meter dengan ketinggian antara 1,50 meter hingga 2 meter. Informasi tempatan menyebutkan bahwa benteng ini dibangun oleh kakek Tuanku Daulat mengikuti himbauan Pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1901 agar rakyat pindah ke daerah itu. Tempat ini diapit oleh Sungai Batang Tomani di sebelah utara dan Sungai Batang Tipo di sebelah selatan (Oetomo et al, 2007:31-32).

c. Benteng Portugis Pulau Cingkuk

Cingkuk adalah sebuah pulau kecil memanjang utara - selatan, di Dusun Cerocok, Desa Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Bagian selatan dan barat pulau merupakan bukit karang yang melandai ke arah

utara. Di bagian utara itulah terdapat sisa bangunan yang disebut masyarakat Benteng Portugis Pulau Cingkuk. Adapun data yang diperoleh belum mengindikasikan hubungan peninggalan tersebut dengan orang Portugis. Sebaliknya, sumber Belanda menyebutkan bahwa setelah diadakannya *Painansch Traktaat* pada tahun 1663, VOC mendirikan loji di Pulau Cingkuk (Mansoor et al, 1970:94).



Benteng Portugis di Pulau Cingkuk

Bagian pertama di timurlaut berupa tembok dari campuran batu dan bata berspesi, membentang utara-selatan sepanjang 37,50 meter dilengkapi pintu berukuran 2,90 meter (berjarak 9,50 meter dari ujung selatan tembok, disebut Gerbang I). Tebal tembok 0,90 meter dengan tinggi 3,60 meter. Pada jarak 7,30 meter dari ujung utara tembok itu ada tembok lain ke arah barat sepanjang 6,5 meter, termasuk pintu 1,50 meter (Gerbang II). Permukaan tanah di bagian barat (dalam) tembok lebih tinggi sekitar 35 centimeter dibanding permukaan tanah di bagian timur (luar). Gerbang I

berhiaskan pelipit yang menegaskan keberadaannya sebagai gerbang.

Selanjutnya di bagian utara pulau. Berjarak 35 meter di sebelah barat Gerbang I adalah Gerbang III, pintu masuk ke areal lain Benteng Portugis Pulau Cingkuk. Menempati lereng timur bukit yang memanjang di bagian barat pulau, permukaan tanahnya lebih tinggi dibanding permukaan tanah tempat struktur bangunan di sebelah timurnya.

Gerbang III tampil lebih raya. Strukturnya berupa susunan bata berspesi. Batanya putih kecoklatan dan merah. Bata putih untuk bagian kaki sampai badan gerbang, sedangkan bata merah pada bagian kaki, kepala, dan bagian pelipit. Gerbang setinggi 3,45 meter itu berpuncak undakan persegi panjang berambang lengkung setinggi 2,75 meter. Kedua sisi bagian akhir lengkungan dibatasi pelipit. Lebar gerbang 1,60 meter. Ini pintu masuk ke bagian pertapakan berisi reruntuhan bangunan yang dibatasi tembok keliling dan talud/dinding penahan tanah.

Tembok batu dan bata berspesi membentang barat-timur sepanjang 23,50 meter, menempel di sisi selatan Gerbang III. Di ujung barat tembok membentang talud setinggi 2,50 meter hingga 3,30 meter ke arah utara. Talud itu adalah susunan/tumpukan batu alam berukuran besar (*boulder*), yang berbelok ke arah utara sepanjang 15 meter. Keseluruhan talud dan tembok yang berawal pada Gerbang III lebih berperan sebagai sarana mendapatkan permukaan datar yang lebih tinggi dari lahan sekitarnya, terlebih bila dibandingkan dengan bagian utara dan timurnya. Dataran itu membentuk denah dua empat persegi panjang yang digabungkan. Denah pertama di

selatan berukuran 30 meter x 23,50 meter, dan denah kedua di utara berukuran 15 meter x 12,50 meter.

Di bagian lahan yang berdenah empat persegi panjang di utara dijumpai dua lapis talud lain. Masing-masing talud yang berukuran lebih rendah dari talud utama menempati bagian permukaan tanah yang lebih tinggi. Adanya talud-talud rendah itu membentuk semacam undakan yang keseluruhannya menjadikan bagian lahan itu lebih tinggi daripada lahan empat persegi panjang yang lebih luas di sebelah selatannya. Dari bagian selatan ke bagian utara dihubungkan dengan anak tangga yang dipahatkan langsung pada batuan dasar pembentuk gundukan itu. Di sini orang dapat melihat dan menikmati pemandangan di sekelilingnya. Bila dahulu tempat ini berfungsi sebagai tempat pengintaian/pengamatan atas gerak kedatangan pihak lain, maka belakangan orang memanfaatkannya sebagai lokasi untuk menikmati pemandangan. Pemanfaatan belakangan terkait dengan fungsi Pulau Cingkuk sebagai lokasi persinggahan militer, pergudangan, perkantoran (loji), dan juga pemukiman pegawai dan keluarganya.

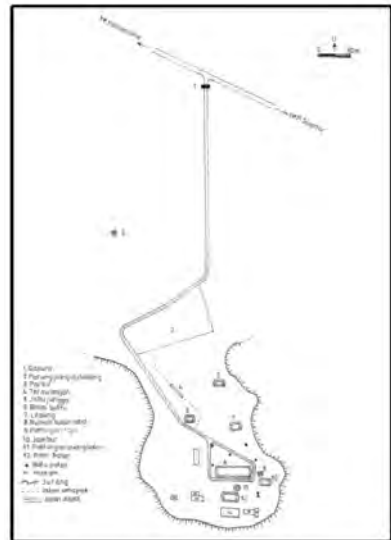
Di bagian timur pulau terdapat sisa dermaga (*anggar*) berdenah persegi panjang membujur barat-timur. Sisanya 36,50 meter. Di areal antara sisa bangunan bagian barat dan timur dataran utara pulau ini dipenuhi serakan puing bangunan yang selain berupa sisa struktur tembok juga ada bekas lantai. Ini dapat dikaitkan dengan keberadaan bangunan dahulu yang digunakan sebagai bengkel kerja, gudang penyimpanan, perkantoran, dan pemukiman. Kelengkapan lain yang berasal dari masa lalu adalah sumur besar yang saat ini sudah kering. Sumur ini berdinding

campuran batu dan bata berspesi. Sementara sebuah sumur lain berukuran lebih kecil, berisi air payau, hingga saat ini masih digunakan penghuni pulau dan nelayan.

5. Provinsi Sumatera Utara

a. Rumah Bolon Adat Pematang Purba

Berada pada bibir jurang di wilayah Nagori Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, kompleks Rumah Bolon Adat Pematang Purba di areal seluas 2 hektar ini dahulu merupakan tempat tinggal sekaligus pusat pemerintahan. Komponen di dalamnya beragam, mulai dari tempat tinggal panglima kerajaan, tempat tinggal penjaga keamanan, bangunan tempat raja dan keluarganya, ruang musyawarah dan pengadilan, serta terowongan sebagai pintu gerbang. Pengamanan atas lokasi ini jelas diperoleh dari keletakannya yang dikelilingi jurang yang cukup dalam yang mengelilingi sebagian besar areal, kecuali di bagian utara yang agak landai tetapi dilengkapi gundukan tanah yang cukup tinggi dan hanya dapat dilewati melalui sebuah terowongan. Terowongan yang berfungsi sebagai pintu gerbang itu panjangnya 15,40 meter dengan lebar 2 meter dan



Rumah Bolon Adat Pematang Purba

tinggi 2 meter. Bagian tepi jurang yang membatasi kompleks dipadati rumpun bambu. Adapun unsur pengaman lainnya berupa patung *pangulubalang* di sebelah barat laut, di bagian depan kompleks, pada jarak sekitar 200 meter. Dipercaya bahwa keberadaan istana Kerajaan Purba berlangsung sejak abad ke-17.

b. Benteng Puteri Hijau

Benteng Puteri Hijau berada di wilayah Desa Deli Tua Kampung, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya mencakup areal yang cukup luas, tidak kurang dari 1500 meter x 400 meter dan dibatasi oleh Sungai Petani/Lau Tani di sebelah timur. Sisa tembok atau dinding tanah yang mengelilingi areal masih tampak, begitu pula keberadaan *jagang* (parit keliling) di bagian tenggara. Lebar dinding tanah sekitar 4-5 meter, dengan tinggi mencapai 2 meter di bagian dalam, dan 5 meter di bagian luar. Di beberapa bagian, ketinggian benteng yang memanfaatkan tebing sungai mencapai lebih dari 9 meter. Berkaitan dengan pertapakan yang dikelilingi bagian lahan yang lebih rendah, pemanfaatan tebing sebagai bagian perbentengan itu sendiri masih tampak dan sebagian berkenaan dengan tebing di bantaran Sungai Petani (Lau Tani). Beberapa fragmen keramik Cina, tembikar, maupun objek artefaktual lainnya yang diduga sisa aktivitas masa lalu juga ditemukan, atau di informasikan keberadaannya berdasarkan keterangan penduduk.

Hasil penelitian arkeologis yang telah dilakukan memperlihatkan indikasi bahwa situs tersebut digunakan sepanjang kurun waktu abad XIII-XVII. Kegiatan penelitian

tahun 2009 semakin menguatkan dugaan bahwa masa penggunaan benteng tersebut antara abad XIII-XVII, seperti ditunjukkan temuan keramik yang sekaligus berlaku sebagai *dating relatif*-nya. Dalam kesempatan itu selain ekskavasi juga dilakukan penelitian geologi, sehingga diketahui bahwa proses pembentukan benteng alam lokasi itu terbagi dua, yakni benteng alam yang terbentuk melalui proses geologi, serta benteng alam karena proses buatan manusia. Analisis stratigrafi-nya membuktikan bahwa benteng tersebut dibuat dengan memanfaatkan sediaan material pada lahan pertapakannya.

c. Benteng Lobu Tua

Situs ini terapat Sungai Aek Busuk di sebelah barat laut dan Sungai Aek Maco/Rajo di sebelah tenggara, masing-masing berjarak sekitar satu kilometer dan menempati tanah tinggi bertebing 15 meter. Jarak ke Samudera Indonesia - melewati batas rawa yang diolah menjadi sawah - sekitar satu kilometer. Benteng persegi empat itu memiliki dinding tanah sisi timur laut sepanjang 160 meter serta sisi tenggara dan sisi barat laut, masing-masing panjangnya hanya tersisa 40 meter. Adapun hasil penelitian arkeologis belakangan menunjukkan bahwa dahulu kota Barus di Lobu Tua itu memiliki benteng tanah berparit dengan luas antara 7 hingga 14 hektar. Diperkirakan kota Barus yang berbenteng di Lobu Tua ini digunakan selama sekitar dua setengah abad, sejak pertengahan abad ke-9 oleh para pedagang India Selatan atau Srilangka hingga sekurang-kurangnya awal abad ke-12. Berdasarkan temuan yang ada, perdagangan di sana juga berkenaan dengan produk-produk luar seperti keramik

dari Cina, tembikar India dan Timur Dekat, serta mangkuk warna-warni dari Timur Tengah. Juga ada minyak wangi yang diketahui melalui temuan wadah kecil berbahan kaca dari Timur Dekat (Guillot, Claude et al,2008:14,39,62,63).

d. Benteng Sipamutung

Di kawasan budaya Padanglawas di wilayah Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara banyak dijumpai peninggalan dari masa klasik Indonesia berbentuk *biaro* dan stupa, serta arca-arca yang melengkapinya. Di samping itu juga terdapat benteng, yakni benteng Sipamutung di wilayah Dusun Siparau Lama, Desa Siparau, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padanglawas Utara. Lingkungan benteng tanah itu membatasi kompleks Biaro Sipamutung yang luasnya 26,58 hektar. *Buttu-buttu* (= benteng dalam bahasa setempat) berupa gundukan tanah yang mengelilingi kompleks itu dan sebagian besar masih terlihat. Tingginya berkisar 0,50 meter-2 meter dengan lebar sekitar 5 meter. Di beberapa bagian gundukan tanah itu masih terdapat rumpun bambu.

Benteng tanah itu meliputi gundukan tanah yang terdapat di bagian luar dan di bagian dalam. Keduanya membagi keseluruhan kompleks ke dalam empat bidang. Di salah satu bidang yang terbentuk, terdapat Biaro/Candi Sipamutung dan perwaranya, yang berasal dari abad XI-XIV. Berdasarkan beda tinggi permukaan tanahnya, diketahui bahwa bagian benteng dalam dilengkapi dengan parit di bagian luarnya. Beberapa bagian parit yang berada di dalam bidang dibuat ganda. Benteng tanah dibuat pada bagian permukaan tanah yang lebih tinggi dibanding permukaan tanah sekitarnya.

Dapat diduga bahwa fungsi benteng tanah serta bidang yang terbentuk di dalamnya berkenaan dengan perlindungan bagi terselenggaranya kegiatan keagamaan di sana. Salah satu ancaman adalah banjir yang datang melalui sungai-sungai di sekeliling kompleks Sipamutung. Ada pula fungsi sebagai pembatas ruang profan dan ruang sakral. Bagi kenyamanan penyelenggaraan ritual keagamaan, maka pembuatan benteng itu juga dapat disebut sebagai salah satu bentuk upaya penataan ruang bagi pelaksanaan aktivitas lain yang terkait dengan keberadaan tempat itu pada jalur perekonomian yang menghubungkan pedalaman/Bukit Barisan dan seputar Danau Toba dengan pesisir timur Sumatera.

e. Benteng dalam Sumber Tertulis

Perkembangan penelitian arkeologi di Indonesia mengalami kemajuan. Selain kemajuan dasar metodologi, juga penanganan objek yang beragam. Dalam pelaksanaan analisis juga telah digunakan pendekatan-pendekatan berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik itu yang masuk dalam ilmu pengetahuan sosial seperti sosiologi, sejarah, antropologi maupun lainnya. Juga ilmu-ilmu keras seperti geologi dan fisika. Adapun bagi arkeologi dengan bidang kajian benteng dan situs perbentengan, di Indonesia menjadi bagian dari arkeologi sejarah, tentu memerlukan juga pendekatan-pendekatan sejarah, filologi, dan lainnya karena berkenaan juga dengan data bertulisan.

Eksistensi benteng di bagian utara Pulau Sumatera sudah diketahui sejak lama. Sumber-sumber lokal maupun asing telah menyebutkan tentang hal itu. Berdasarkan sumber-sumber lokal, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, Kenneth R Hall

(1985:214) sampai pada kesimpulan bahwa Pasai sebagai bandar perdagangan adalah perpindahan dari Samudera yang letaknya agak ke dalam. Perpindahan itu disebabkan adanya serangan dari arah laut. Masih berkenaan dengan bandar di pesisir timur Sumatera itu, sumber Cina, Yingyai Shenglan (1416) menyebutkan bahwa Samudera tidak memiliki dinding yang dibangun sebagai benteng kota. Adapun tempat tinggal penguasanya berjarak sekitar 5 kilometer dari pantai. Dalam sumber itu juga disampaikan bahwa rajanya terbunuh oleh panah beracun yang dilepaskan musuhnya (Groeneveldt,2009:119).

Sumber lain juga menyampaikan tentang keberadaan sarana pertahanan kota. Ibnu Battutah yang berkunjung pada pertengahan abad ke-14 memberitakan bahwa Pasai yang pada akhir abad ke-13 muncul sebagai pusat kekuasaan di Selat Malaka memiliki kota yang berpagar kayu. Dalam pagar keliling kayu itu terdapat tempat tinggal penguasa dan bangsawan lain yang dilindungi rakyat di luar pagar. Terlihat adanya pemisahan yang tegas antara kawasan istana dan kawasan pasar. Pasai sebagai pusat pemerintahan, berada agak jauh dari pantai, sementara Samudera sebagai bandar memang berada di tepi laut. Demikianlah kondisi Kerajaan Samudera Pasai antara abad ke-13 hingga awal abad ke-16.

Masih tentang situasi di bagian ujung utara pulau Sumatera, sumber asing ikut membantu memberikan informasi keberadaannya. Marco Polo bersama rombongan dalam perjalanannya sempat menetap selama 5 bulan di Samara. Upaya mereka untuk melindungi diri dari kejahatan penduduk pribumi yang liar adalah dengan membuat parit lebar dan dalam yang digali di sekeliling lahan yang mereka

tempati. Bersama sejumlah besar anggota rombongannya, diperkuatlah parit itu dengan mendirikan benteng dari kayu. Dikatakannya bahwa atas usaha yang dilakukan, mereka mendapatkan keamanan yang sempurna di sana (Polo, 2009:89).

Sementara itu, sumber lain dari Asia juga ikut memberikan kontribusi. Keberadaan benteng berbahan kayu disebut juga dalam sumber Cina. Sejarah Dinasti Ming (1368-1643) Buku 325, menyatakan bahwa Indragiri yang sering diserang Johor memiliki benteng terbuat dari kayu (Groeneveldt, 2009:108). Indragiri terletak di pantai timur Sumatera, dan sarana pertahanan yang diperbuat berkenaan dengan upaya menahan serangan dari arah laut. Sementara itu, sumber Cina lainnya, Xingcha Shenglan (1436) menyebutkan bahwa orang-orang di Selat Lingga merupakan bajak laut. Mereka menggunakan ratusan perahu kecil untuk menyerang perahu yang melintas, merampok dan membunuh awaknya (Groeneveldt, 2009:112). Jadi berbeda dengan kasus sebelumnya, masyarakat di sana justru menjadikan bentuk serangan sebagai bagian untuk mempertahankan kedaulatan dan kehidupan di wilayahnya. Sekaligus memperlihatkan usahanya dalam memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Adapun Xingcha Shenglan (1436), sebagai sumber Cina tentang keberadaan masyarakat Nusantara yang juga berkeinginan memenangkan ketidaksesuaian dengan pihak lain, menyampaikan bahwa di Aru, laki-laki selalu membawa busur dan panah beracun untuk melindungi dirinya (Groeneveldt, 2009:132).

Augustin de Beaulieu dari Perancis yang pada tahun 1619 dan 1620 singgah di Aceh juga membuat catatan tentang

perjalanannya. Melalui sumber Eropa itu diketahui bahwa pada zaman pemerintahan Iskandar Muda terdapat benteng untuk mengawasi lalu lintas di muara sungai yang menuju ke kota kerajaan/Banda Aceh. Benteng dilengkapi bastion bundar yang besar dengan beberapa meriam. Dalam tembok benteng ada masjid. Berhadapan dengan benteng raja membuat bangunan tempat peristirahatan yang dikelilingi parit. (Lapian,2008:98-99).

Masih terkait dengan sumber-sumber tertulis, situasi pada masa yang lebih muda disampaikan dalam catatan Balanda. Terkait dengan bangunan Benteng Tanjung Butung, berkenaan dengan kepentingan Belanda di kawasan Kepulauan Riau sejak lebih dua ratus tahun silam, sumber tertulis menyebutkan bahwa pembangunannya menggunakan batu-batu yang didatangkan dari Malaka pada tahun 1824. Pimpinan pembangunannya adalah Letnan Zeni Schonermark. Kelak pada tahun 1825 bangunan tersebut diresmikan dengan nama Fort Kroonprins Hendrik.

Sebelumnya, yakni pada tahun 1787, benteng ini pernah diserang oleh pasukan Sultan Mahmud Syah. Untuk menghindari pembalasan pihak Belanda, Sultan Mahmud Syah pindah ke Pulau Lingga. Ini adalah awal penggunaan Lingga sebagai tempat kedudukan resmi Yang Dipertuan Besar. Adapun Pulau Penyengat kelak menjadi tempat kedudukan resmi Yang Dipertuan Muda. Kelak pada masa penjajahan Jepang, benteng Tanjung Butung difungsikan sama seperti ketika Belanda kembali pada tahun 1945 hingga sekitar tahun 1950. Setelah itu TNI AL mengambilalih dan memanfaatkannya hingga sekarang.

Keberadaan benteng-benteng di kawasan Kepulauan Riau ini juga terkait dengan adanya Traktaat London tahun 1824 yang mengakibatkan Kerajaan Riau Johor dipecah dua. Johor, Singapura, dan Pahang berada di bawah naungan kekuasaan Inggris, sementara Riau-Lingga di bawah kekuasaan Belanda. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan *de jure* ada di tangan Sultan atau Yang Dipertuan Besar di Daik, Lingga, sedangkan kekuasaan *de facto* berada di tangan Yang Dipertuan Muda (Raja Muda) yang berkedudukan di Pulau Penyengat (Junus, 2002). Beberapa perbentengan dijumpai di kedua wilayah kekuasaan itu, seperti Benteng Bukit Cening dan Benteng Pulau Mepar.

Sumber lain, lokal maupun asing juga mencatat tentang benteng-benteng di tempat lain. Benteng Portugis Pulau Cingkuk misalnya, karena letaknya di dekat lokasi bekas penambangan emas masa kolonial Belanda di Salido serta jalur pelayaran di pantai barat Pulau Sumatera, merupakan tempat strategis baik sebagai tempat tujuan utama maupun persinggahan. Mengacu pada sumber tertulis, tinggalan yang tersisa, serta membandingkannya dengan situs sejenis di tempat lain (situs Pulau Onrust dan Pulau Sakit di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, misalnya), maka situs ini dapat diasumsikan memiliki fungsi sebagai loji VOC/Belanda. Loji adalah suatu tempat yang digunakan sebagai pergudangan, perkantoran, perdagangan, sekaligus juga berfungsi sebagai bangunan pertahanan. Keberadaan tembok keliling dari bahan batuan andesit berspesi dan bata berspesi di Pulau Cingkuk, sisa struktur bekas bangunan lain dan bengkel kerja mengindikasikan hal itu.

g. Nilai Penting dan Fungsi Benteng

Potensi yang terkandung pada situs-situs perbentengan meliputi nilai-nilai penting kesejarahan; nilai penting ilmu pengetahuan; nilai penting kebudayaan; serta nilai penting sosial-ekonomi. Nilai penting kesejarahan sebuah benteng/situs benteng karena merupakan bukti fisik keberadaan sebuah pusat pemerintahan/kekuatan dan pertahanan masyarakat setempat/pihak lain dari periode tertentu. Sementara nilai penting pengetahuan atas sisa benteng karena terbatasnya penemuan-penemuan sejenis dari masa-masa/periode yang lazim diberlakukan di Indonesia. Ini berkenaan antara lain dengan masa prasejarah, masa klasik, masa masuk dan berkembangnya Islam, serta masa-masa modern akibat datangnya unsur Eropa. Hal ini penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya arkeologi dan sejarah arsitektur tradisional. Adapun nilai penting kebudayaan sebuah benteng/situs perbentengan terkait hubungannya dengan masyarakat, termasuk masyarakat adat, di sebuah daerah. Legenda/cerita mengenai benteng dan tokoh-tokohnya melekat di hati masyarakat sebagai tokoh masa lalu yang terlibat dalam perjalanan sejarah daerah tersebut. Menyangkut nilai penting sosial-ekonomi, hal itu berkenaan dengan kemampuannya sebagai sarana peraga dalam pendidikan sejarah kebudayaan, khususnya mengenai bentuk lingkungan perbentengan, kota, dan kehidupannya pada masa lalu.

Peninggalan tua berupa benteng yang langka dan lebih karena kaitannya dengan tokoh legendaris, mampu menjadikannya sebagai daya tarik tersendiri dalam bentuk objek wisata budaya. Benteng dan nama yang sangat terkenal,

yang merupakan identitas dan akar sejarah masyarakat suatu daerah dapat dijadikan sebagai citra kawasan (*landmark*) daerah itu.

Demikianlah benteng sebagai pusaka budaya jelas memiliki arti dan kegunaan bagi ilmu pengetahuan, nilai sejarah dan kebudayaan yang penting. Pengertian ilmu pengetahuan di sini adalah arkeologi, sejarah, antropologi dengan uraian sebagai berikut.:

1). Benteng sebagai bangunan pertahanan

Dalam sumber tertulis berupa naskah Melayu lama seperti *Sejarah Melayu*, *Hikayat Hang Tuah*, dan *Hikayat Merong Mahawangsa* disampaikan dasar pemilihan lokasi suatu kota raja. Seorang penguasa memutuskan mendirikan sebuah kota berdasarkan pertimbangan lingkungan yang sesuai, misalnya berada di tepi sungai yang memungkinkan laut dapat dicapai dengan mudah. Pemilihan dapat pula didasarkan atas kedekatannya dengan sumber ekonomi seperti adanya tambang emas, atau pada kawasan yang penuh dengan binatang buruan dan ikan yang melimpah (Perret, 1999: 248-249). Ini berkenaan misalnya dengan tapak-tapak bekas pusat pemerintahan yang berada tidak jauh dari aliran sungai besar, seperti Sungai Indragiri dan Sungai Batang Kuantan.

Sementara itu, dalam kesusasteraan Melayu lama juga digambarkan bahwa istana sebagai pusat pemerintahan dilindungi oleh sistem pertahanan yang umumnya berupa benteng tanah yang di atasnya ditanami rumpun bambu berduri. Di bagian luar benteng dilengkapi dengan parit, dan diperkuat pula dengan meriam. Saat terjadi pertempuran karena adanya serangan, istana berbenteng menjadi tempat

berlindung rakyat. Mereka juga diperintah raja untuk membantu memperbaiki sistem pertahanan. Dalam *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Hang Tuah* diceritakan bahwa saat musuh datang menyerang, rakyat masuk ke dalam benteng dan menyiapkan beragam jenis senjata seperti pedang, keris, tombak, dan juga perisai (Perret,1999:255).

Pengaruh Barat dalam bidang kemiliteran juga dapat dirasakan. Di Sumatera bagian utara, seperti di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, semakin kuatnya pengaruh Barat menyebabkan diadopsinya kebiasaan pendatang dalam sistem pertahanan. Benteng-benteng di sana cenderung digunakan sebagai sarana pengawasan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Persenjataan utama adalah meriam dengan jarak tembak yang cukup besar dan efektif dalam penjagaan pusat kekuasaan dan perdagangan. Di Kepulauan Riau hal itu tampak pada benteng Bukit Cening di Pulau Lingga, juga benteng Pulau Mepar, serta benteng Khairiah Mandah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui sisa yang ada saat ini, tampak bahwa Kepulauan Riau dengan kondisi alamnya yang khas memunculkan peninggalan berupa istana dan bangunan pertahanan yang cenderung didirikan di dekat aliran sungai. Pada masanya, selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan penghuninya akan air, sungai juga memiliki nilai lebih sebagai sarana transportasi dibandingkan jalan darat.

2). Benteng sebagai alat yang membantu ingatan (*mnemonic devices*)

Benteng adalah alat yang membantu ingatan akan sesuatu yang dianggap penting, baik dari sudut sejarah, kebudayaan,

maupun kemasyarakatan. Masuk dalam kategori ini adalah objek-objek yang akan mengingatkan kita pada suatu peristiwa sejarah. Pada benteng misalnya, kerap dijumpai prasasti/pertulisan singkat. Demikian pula dengan foto lama, naskah, dan arsip, maupun catatan lama dalam buku atau publikasi lain. Ini jelas berguna karena dapat digunakan sebagai sumber untuk dilakukannya rekonstruksi sejarah secara akademis. Demikian pula halnya dengan benteng sebagai alat pengingat kolektif (*collective memory*). Benteng dapat mengingatkan bahwa masyarakat di sekitarnya pernah mengalami kejadian-kejadian tertentu. Pengalaman ini bukan saja perlu diingat karena juga berfungsi sebagai pendukung integrasi sosial, tetapi berkenaan pula dengan sumbangan yang diberikan budaya tempatan pada kejadian yang pernah/ telah berlangsung.

Peristiwa sejarah boleh berlalu, namun nilai yang diembannya tetap menjadi sesuatu yang tidak gampang dilupakan. Kenangan pahit mungkin dengan gugurnya anggota pasukan atau anggota masyarakat yang dicintai saat mereka mempertahankan hingga harus meninggalkan benteng/kubu miliknya. Sebaliknya, kenangan manis yang membuahkis kisah-kisah heroik adalah kemenangan mereka atas musuh yang berhasil dihalau/dikalahkan.

Demikianlah kita dapat mengatakan bahwa sebuah benteng mempunyai nilai sejarah. Nilai intrinsik (terkandung di dalamnya) pada dirinya, bukan hanya sesuatu yang berada di luar dirinya. Misalnya Benteng Huta Nauli/Benteng Rorak di Rao, Pasaman seolah-olah dapat menceritakan tentang seorang tokoh militer Belanda - dan ini sesuatu yang berada di luar benteng - namun benteng ini juga memiliki

nilai historis karena benteng tersebut berhubungan dengan upaya Belanda dalam menjepit pasukan Kaum Paderi yang melakukan perlawanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini berarti bahwa objek-objek dimaksud, di samping merupakan saksi sejarah tentang sesuatu, juga merupakan bagian yang intrinsik dari kesaksian itu.

3). Benteng sebagai sisa/bekas-bekas sejarah (*historic remnants*)

Mengacu pada keberadaannya, objek arkeologis berupa benteng merupakan benda hasil periode sejarah tertentu. Dengan mempelajarinya kita dapat mengetahui corak dan tingkat kebudayaan dan susunan masyarakat yang menghasilkannya. Adapun membandingkannya dengan objek sejenis, dapat pula memperkirakan corak dinamika sejarah yang dialami oleh kebudayaan itu. Semuanya merupakan kesaksian sejarah yang mengatakan banyak hal. Apalagi bila benteng tersebut berasal dari masa yang lebih kemudian, yang selain memiliki data artefaktual yang dikandungnya juga dilengkapi dengan catatan lama tentang keberadaannya.

Sebagai bekas atau jejak sejarah, Kota Piring di Tanjung-pinang mendapat tempat tersendiri dalam catatan lama. *Tuhfat al-Nafis* (Persembahan Indah) misalnya, sebuah karya penting sumber sejarah Melayu yang membicarakan Kerajaan Riau dengan pusat-pusat kekuasaan seperti Lingga dan Pulau Penyengat (Bottoms, 1995:153), juga menceritakan tentang kemolekan istana Kota Piring, yang bagian-bagian tembok kelilingnya berhiaskan beragam keramik Cina.

Menyangkut benteng/situs benteng lainnya, Belanda sebagai pihak yang berambisi meluaskan kekuasaannya telah menggunakan senjata dan harus selalu waspada. Pendirian benteng-benteng yang digunakan untuk menjepit lawannya, Kaum Paderi misalnya, disebabkan karena mereka tidak mampu memperoleh kemenangan yang bersifat menentukan. Dalam beberapa kesempatan diketahui bahwa pihak Belanda yang mula-mula menyerang, suatu saat mendapat momentum serangan balik dari Kaum Paderi yang memaksanya untuk segera membangun benteng pertahanan. Ini adalah salah satu manuver Belanda untuk melaksanakan konsentrasi kekuatan maksimal di suatu tempat.

Sementara bagi pihak lawan, kaum pribumi, berkenaan dengan aksi pertahanan, perlawanan gerilya dilakukan dengan selalu berusaha untuk tidak diserang, sebaliknya selalu menjalankan serangan dan pencegahan. Aksi gerilya memungkinkan untuk memukul mundur musuh dan segera lari menghilang. Kondisi demikian tidak memungkinkan pihak penyerang mengkonsolidasikan kekuatan. Banyak persoalan logistik yang sangat mengurangi daya tempur pihak penyerang. Kelak pihak yang bertahan, dan yang menjalankan aksi gerilya mampu melakukan serangan balasan. Apalagi dukungan dari masyarakat cukup kuat.

4). Benteng sebagai teknologi tempatan (*local technology*)

Keberadaan benteng dan komponen-komponennya juga dapat dihubungkan dengan corak peralatan yang digunakan manusia dalam menjawab tantangan hidup. Ini berkenaan dengan *local technology* tempat manusia berupaya memanfaatkan teknologi yang dianggap lebih baik dan lebih mudah diperoleh.

Dalam perjalanan sejarah, perang antara kelompok manusia yang bertentangan kepentingan sudah berlangsung saat mereka masih dalam tingkat budaya sederhana. Bahwa pertentangan itu diakhiri dengan kekerasan, yang dilakukan adalah benar-benar perkelahian fisik untuk memaksa lawan. Mula-mula bentuk senjata yang digunakan masih sangat sederhana. Seiring laju perkembangan budaya, berkembang pula cara menerapkan kekerasan untuk menghadapi ancaman secara efektif. Karena berkembangnya peralatan dan persenjataan maka bentuk perkelahianpun berubah menjadi pertempuran. Pertempuran-pun berkembang sejajar dengan perkembangan peralatan dan persenjataan. Dan sediaan berbagai moda transportasi menjadi faktor yang amat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam peperangan (Suryohadiprojo,2008:16).

Dalam perang, kegiatan utamanya adalah menyerang dan mempertahankan. Serangan dilakukan sebagai bentuk memaksakan kehendak terhadap pihak yang diserang. Tujuannya memberikan pukulan untuk menundukkan musuh. Aktivitas ini dilakukan dengan mengorganisasi sekelompok manusia untuk menyerang musuh dengan membawa beragam senjata. Dapat dibayangkan bahwa dahulu orang hanya menggunakan senjata pemukul berupa gada dan senjata penusuk seperti pedang dan tombak. Perkelahian berlangsung pada jarak dekat. Belakangan orang juga menggunakan busur dan anak sehingga dapat menyerang, melukai, dan membunuh musuhnya dari jarak yang lebih jauh. Kelak orang memanfaatkan hewan sebagai tunggangan dalam penyerangan. Lama-kelamaan serangan makin berkembang sejalan dengan penemuan kendaraan

pengangkut. Selain gerobak dan sejenisnya sebagai moda transportasi darat, moda transportasi air juga turut berkembang. Ini semua memudahkan diperbesarnya serangan oleh pihak yang memiliki musuh. Terlebih dengan berkembangnya persenjataan menjadi senjata api. Senapan menjadi sarana melukai dan membunuh musuh dari jarak jauh. Ditemukannya meriam lebih memungkinkan timbulnya kematian dan kehancuran pihak musuh jauh lebih besar lagi, dan dengan jarak yang semakin jauh. Meriam digunakan untuk memberikan tembakan bantuan agar pihak penyerang dapat mendekati dan kemudian merebut kedudukan musuh.

Bertahan merupakan aksi penolakan terhadap usaha pihak penyerang. Terlebih dari itu, yang harus dilakukan selanjutnya adalah meniadakan sumber serangan. Artinya, pihak yang diserang harus mampu menghilangkan atau mengalahkan pihak penyerang. Oleh karena itu harus dipahami bahwa pertahanan merupakan satu kondisi untuk menyiapkan pihak yang diserang agar dapat melakukan serangan balik/balasan terhadap pihak penyerang. Pertahanan disusun untuk menguasai medan yang mempersulit pihak penyerang. Tempat itu misalnya di lereng atau di atas bukit dan di belakang sungai. Untuk memperkuat posisi pertahanan itu maka dibangunlah perbentengan.

5). Benteng Sebagai Bukti Kearifan Lokal

Teoritis, kebutuhan manusia untuk dapat bertahan di alam lingkungannya terbagi dalam tiga kategori, yakni kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati; kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi; dan kebutuhan dasar untuk memilih (Sumarwoto, 1994:62-64). Bagi pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan itulah manusia melakukan berbagai bentuk adaptasi dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, serta mengekspresikan bentuk-bentuk dan wujud kebudayaan mereka terhadap keadaan lingkungan yang ada pada masa budayanya.

Kearifan lokal adalah usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Secara spesifik kearifan lokal menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah dirancang sedemikian rupa yang didalamnya melibatkan suatu pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Ada hubungan timbal balik antara lingkungan dengan tingkah laku manusia. Lingkungan sendiri dapat mempengaruhi tingkah laku, atau sebaliknya, tingkah laku mempengaruhi alam lingkungan.

Beberapa dari benteng-benteng yang disebutkan di atas jelas merupakan karya masyarakat setempat. Pengetahuan sederhana dalam menyusun dan menata material di setiap konstruksi pada benteng merupakan wujud kearifan lokal masyarakat yang ada pada saat itu. Tidak hanya menyangkut hal teknis yang menyangkut karya arsitektur dan teknologi persenjataan, strategi dan taktik perlawanan/pertahanan yang diberlakukan juga bagian dari sebuah kearifan lokal. Semua merupakan respon terhadap kondisi lingkungan, serta daya antisipatif masyarakat terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh lingkungan atau serangan musuh/keompok masyarakat lain yang mengancam.

D. Penutup

Di Sumatera bagian utara, dijumpainya banyak benteng tanah tidak semata-mata harus dikaitkan dengan upaya pertahanan yang sifatnya fisik. Benteng-benteng tanah ternyata kerap digunakan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan upaya memisahkan bagian lahan yang dianggap sakral dengan yang dikategorikan profan. Contoh yang jelas tampak pada gundukan tanah yang berfungsi membentengi makam raja/penguasa. Itu dilakukan agar secara nyata dapat dibedakan, seperti saat masih hidup, antara rakyat jelata dan penguasa. Tempat yang digunakannya sebagai pertapakan makam berbenteng itu adalah bagian-bagian lahan terpilih seperti di tempat yang tinggi (atau secara fisik ditinggikan), di pertemuan sungai, atau yang berdekatan dengan sumber/mata air. Juga di Padanglawas untuk menahan banjir dan pembagian ruang sakral dan ruang profan.

Arkeologi berkaitan dengan peristiwa yang perlu disampaikan/diceritakan kepada masyarakat dengan menggunakan kaidah tertentu. Arkeologi-pun berurusan dengan masa lampau yang belum selesai. Seperti halnya dengan ilmu sejarah, arkeologi baru berkembang seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang sejak abad ke-19 mulai menunjukkan perkembangan yang pesat. Sebagaimana diketahui, saat ini arkeologi telah mencapai perkembangan besar dengan spesialisasi yang beragam. Kita tidak menemukan lagi ahli yang berkualifikasi menguasai arkeologi secara komprehensif. Adapun keberhasilan dalam melahirkan pola-pola spesialisasi bergantung pada adanya unsur keterbukaan yang merupakan unsur melekat bagi

arkeologi. Arkeologi adalah sebuah ilmu yang terbuka, artinya terbuka untuk dimaknai, atau dinilai, bahkan disanggah. Berkenaan dengan itu maka analisis dan interpretasi terhadap peninggalan kuna harus dikedepankan dengan hati-hati dan objektif.

Keberadaan benteng/situs perbentengan juga harus dihubungkan dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Itu harus dilakukan semua merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang masih tetap relevan bagi masa sekarang, maupun masa yang akan datang, untuk berbagai kepentingan, akademik, ideologi, bahkan ekonomi. Aspek pemanfaatannyapun memerlukan kebijakan yang mengedepankan kepentingan yang lebih luas karena pusaka budaya adalah milik masyarakat luas.

Menyangkut itu, maka pembidangan kegiatan penelitian arkeologi dapat diberlakukan atas dasar segi kehidupan yang masing-masing menuntut pemahaman akan kaidah-kaidahnya yang khas. Perlu dijalankan pengkhususan kajian dalam arkeologi seperti perkotaan, perdagangan, kesenian, keagamaan, teknologi logam, perkapalan, dan juga arkeologi yang mengkaji benteng. Semua diberlakukan karena arkeologi dapat memberikan sumbangan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sejarah kebudayaan bangsa, yang kelak akan memantapkan wawasan budaya yang hidup di masa kini.

KEPUSTAKAAN

- Alfian, Ibrahim, 1992. *Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil*. Jakarta: Balai Pustaka
- Bottoms, JC, 1995. *Beberapa Sumber Sejarah Melayu. Sebuah Catatan Bibliografis*, dalam Soedjatmoko et al (eds.) *Historiografi Indonesia. Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 137-166
- Clark, Grahame, 1960. *Archaeology And Society*. London: University Paperbacks Mahuen
- Groeneveldt, WP, 2009. *Nusantara Dalam Catatan Tionghoa*, diterjemahkan oleh Gatot Triwira. Jakarta: Komunitas Bambu
- Guillot, Claude *et al*, 2008. *Barus Seribu Tahun Yang Lalu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hall, Kenneth R, 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai Press
- Junus, Hasan, 2002. *Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang Abad XX*. Pekanbaru: Unri Press
- Koestoro, Lucas Partanda, 2005. *Kota Piring dan Kota Lama/Rebah: Gambaran Arkeologis Sisa Kerajaan Riau di Pulau Bintan*, dalam *Berkala Arkeologi Sangkhakala* No. 15. Medan: Balai Arkeologi Medan, hal. 63-79
- Koestoro, Lucas Partanda, Repelita Wahyu Oetomo & Ketut Wiradnyana, 2001. *Penelitian Arkeologi Di Pulau Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau*, dalam *Berita Penelitian Arkeologi* No. 05. Medan: Balai Arkeologi Medan

- Koestoro, Lucas Partanda *et al*, 2002. *Penelitian Situs Benteng Portugis Pulau Cingkuk Di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat*, dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 07. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Koestoro, Lucas Partanda *et al*, 2003. *Riau Merentang Zaman (Tinjauan Arkeologis Daerah Riau)*, dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 09. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Koestoro, Lucas Partanda, Ery Soedewo & Ketut Wiradnyana, 2004. *Arkeologi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau*, dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 11. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Lapian, Adrian B, 2008. *Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17*. Depok: Komunitas Bambu
- Mansoer, MD *et al*, 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara
- Polo, Marco, 2009. *Marco Polo*, diterjemahkan oleh Ary Kristanti. Surabaya: Selasar Publishing
- Purba, Suruhen, 2002. *Rumah Bolon Adat Pematang Purba, Simalungun (Tambahan Data Arkeologi Tanah Batak)*, dalam Berkala Arkeologi Sangkhakala No. 10. Medan: Balai Arkeologi Medan, hal. 45-60
- Oetomo, Repelita Wahyu, 2007. *Arkeologi Di Bagian Baratlaut Provinsi Sumatera Barat*, dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 18. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Soetrisno, Deni, 2005. *Benteng 7 Lapis Dalu-Dalu, Benteng Terakhir Tuanku Tambusai Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau*, dalam Berkala Arkeologi Sangkhakala No. 15. Medan: Balai Arkeologi Medan, hal. 1-10

- Soetrisna, Deni, Repelita Wahyu Oetomo & Lucas Partanda Koestoro, 2007. *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera*, dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 17. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 2008. *Pengantar Ilmu Perang*. Jakarta: Pustaka Intermedia
- Susilowati, Nengguh, Ketut Wiradnyana & Lucas Partanda Koestoro, 2000. *Peninggalan Arkeologis Di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat*, dalam Berita Penelitian Arkeologi No. 03. Medan: Balai Arkeologi Medan

BENTENG KUTO BESAK DARI KERATON HINGGA INSTALASI MILITER

oleh:

Aryandini Novita ¹

A. Pendahuluan

Data arkeologi menunjukkan bahwa benteng telah dikenal sejak masa prasejarah. Keberadaan benteng erat kaitannya dengan pola kehidupan masa itu dari kehidupan berpindah ke kehidupan menetap. Pada masyarakat prasejarah benteng didirikan untuk melindungi diri dari serangan musuh atau binatang buas.



Benteng Kuto Besak, Palembang (dok. Balar Plb)

¹ Balai Arkeologi Palembang

Pada masa sekarang benteng lebih diasosiasikan dengan kegiatan pertahanan militer. Dalam Ensiklopedia Indonesia benteng didefinisikan sebagai lokasi militer atau bangunan yang didirikan secara khusus diperkuat dan tertutup yang dipergunakan untuk melindungi sebuah instalasi, daerah atau sepasukan tentara dari serangan musuh atau untuk menguasai suatu daerah (1950: 198).

Dalam perjalanan sejarahnya, benteng sebenarnya tidak terlepas dari suatu pemukiman baik itu pemukiman sederhana maupun yang kompleks seperti kota-kota masa Islam. Hal ini juga terlihat di kota-kota yang berkembang pada masa Islam di Indonesia antara lain Palembang dimana benteng menjadi salah satu komponen kotanya.

Saat ini di Kota Palembang masih dapat ditemukan benteng yang berasal dari masa Kesultanan Palembang Darussalam dan dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Benteng Kuto Besak. Benteng ini didirikan pada tahun 1780 dan merupakan tempat tinggal sultan Palembang Darussalam.

B. Keraton-Keraton Kesultanan Palembang

Sebagai sebuah keraton, Benteng Kuto Besak sebenarnya merupakan keraton ke empat di Kesultanan Palembang. Pada awalnya, ketika Palembang masih merupakan kerajaan futsal Mataram, lokasi keraton terletak di bagian timur Kota Palembang dan bernama Keraton Kuto Gawang. Saat ini lokasi tersebut telah menjadi kompleks pabrik PT Pusri. Tahun 1651, VOC berkeinginan untuk memegang monopoli perdagangan di Palembang tetapi hal ini ditentang oleh penguasa

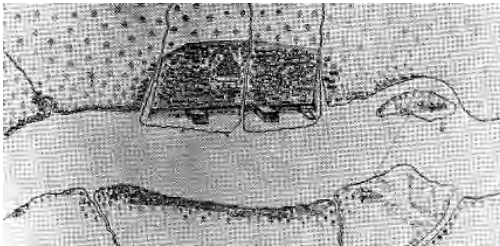
Palembang. Puncak dari pertentangan ini adalah diserangnya Keraton Kuto Gawang disertai dengan pembakaran sehingga menyebabkan dipindahkannya keraton ke lokasi yang baru. Lokasi tempat berdirinya keraton yang baru terletak di sisi timur Sungai Tengkuruk dan dikenal dengan nama Keraton Beringin Janggut. Pada masa itu diputuskan pula untuk memisahkan diri dari mataram dan Palembang menyatakan diri menjadi Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724 – 1758) pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke sisi barat Sungai Tengkuruk. Keraton tersebut dikenal dengan nama Keraton Kuto Batu. Selanjutnya pusat pemerintahan berpindah lagi ke lokasi yang baru yaitu yang sampai sekarang dikenal dengan nama Benteng Kuto Besak (Utomo dan Hanafiah 1993: B3-1 –B3-12).

Secara arkeologis, keraton-keraton Kesultanan Palembang Darussalam yang masih dapat diidentifikasi adalah Keraton Kuto Gawang dan Benteng Kuto Besak, sedangkan Keraton Beringin Janggut dan Kuto Tengkuruk saat ini sudah tidak dapat diidentifikasi lagi.

Keraton Kuto Gawang dibangun di daerah sekitar Kelurahan Sungaibuah dan I Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang. Berdasarkan penelitian arkeologi diketahui batas-batas Kota Palembang masa Pra-Kesultanan yang berupa sungai-sungai yang melingkari wilayah tersebut. Batas selatan adalah Sungai Musi, batas utara adalah Sungai Lunjuk, batas timur adalah Sungai Buah dan batas barat adalah Sungai Taligawe. Selain itu di bagian tengah Kota Palembang pada masa awal Kesultanan mengalir Sungai Rengas.

Selain dikelilingi oleh sungai, wilayah kota juga dilindungi pagar keliling. Meskipun sudah tidak in situ lagi berdasarkan informasi penduduk yang menggunakan kembali sisa pagar keliling diketahui batas pagar keliling sebelah utara adalah lokasi yang sekarang menjadi *greenbarrier* PT PUSRI. Disamping itu sampai saat ini wilayah tersebut masih disebut 'guguk jero pager' dan penduduk yang telah menetap di wilayah tersebut secara turun temurun masih disebut dengan istilah 'wong jero pager'.



Sketsa Keraton Kuto Gawang tahun 1659
(dok. Balar Plb)

Dalam catatan sejarah disebutkan Keraton Kuto Gawang berdenah segiempat dan dikelilingi oleh pagar kayu. Keraton tersebut berukuran 290 Rijlandsche roede.

Pada sketsa Joan van der Laen (1659) digambarkan keraton menghadap ke Sungai Musi dan pintu masuknya melalui Sungai Rengas. Bagian timurnya berbatasan dengan Sungai Taligawe dan di bagian barat berbatasan dengan Sungai Buah (Utomo 2004: 140).

Dalam sketsa tersebut tampak Sungai Taligawe, Sungai Rengas, dan Sungai Buah tampak terus ke arah utara dan satu sama lain tidak bersambung. Bagian utara keraton dibatasi oleh pagar dari kayu besi dan kayu unglan. Pada pagar keliling terdapat tiga buah bastion yang dibuat dari konstruksi batu. Di bagian dalam keraton terdapat kediaman Sultan yang letaknya di sebelah barat Sungai Rengas. Orang-

orang asing ditempatkan di seberang sungai sisi selatan Musi, di sebelah barat muara sungai Komering.

Meskipun sudah tidak dapat diidentifikasi lagi dan belum ditemukannya data sejarah tentang Keraton Beringin Janggut diperkirakan terletak di sekitar Jl Segaran sekarang. Di sekitar wilayah tersebut masih ditemukan toponimi nama-nama kampung yang diperkirakan merupakan pemukiman yang semasa dengan Keraton Beringin Janggut, seperti *sayangan* (tempat pengrajin tembaga), *kepandean* (tempat pandai besi) dan *rendang* (tempat pembakaran) (Utomo 2004:150).

Sama seperti Keraton Beringin Janggut, Keraton Kuto Batu saat ini sudah tidak dapat diidentifikasi lagi. Meskipun demikian dalam buku *History of Sumatra* (1783), William Marsden mendeskripsikan sebagai berikut:

“Dalem atau istana dikelilingi oleh dinding tembok yang tinggi, tak seorang Eropa pun tahu tentang bagian dalamnya, dan tampaknya dalam keadaan besar, mengagumkan dan banyak sekali ornamen di bagian luarnya. Tidak jauh dari dinding Kuto, di bagian yang lebih rendah terdapat battery yang ditempatkan pada sebuah bangunan kokoh beratap berbentuk segi empat mengawasi sungai. Lebih ke bawah lagi dari dinding ini, juga terdapat meriam-meriam yang terpasang, ditembakkan pada saat-saat khusus. Di antara kedua jarak battery terlihat meidan atau lapangan, pada bagian ujung tampak balairung atau ruangan tempat Sultan bertatap-muka dengan rakyatnya. Gedung ini bentuknya biasa saja, kadangkala dipakai sebagai gudang, tetapi dihiasi dengan senjata-senjata di seluruh dindingnya” (Utomo 2004: 153).

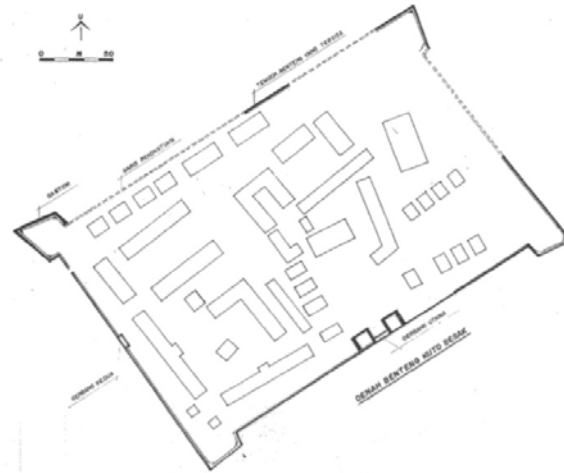
J.C.M Radermacher dalam tulisannya yang berjudul “Beschrijving van het eilands Sumatera” (1781) menggambarkan Keraton Kuto Batu sebagai berikut:

“Istana raja sekelilingnya ditutup dengan dinding, sehingga bangunan di dalamnya tidak diketahui sedikitpun. Sedangkan orang-orang Eropa tidak diperbolehkan masuk. Sepanjang dapat dilihat dari luar, sosok bangunan itu besar dan tinggi, seluruhnya beratap sirap. Satu-satunya yang dapat dilihat dari luar adalah pintu gerbang yang berat dan anggun. Agak ke bawah dari dinding dalam, terdapat battery, berbentuk persegi empat tinggi dan tebal, beratap dan banyak sekali deretan meriam yang hanya ditembakkan pada upacara-upacara luar biasa.

Di sebelah bawah dari battery ini, yang terletak di kawasan sungai, tampak dengan garang dan angkuh satu dinding dengan pintu-pintu angkat untuk lubang tembak, tidak pernah terbuka kecuali meriam di battery tersebut ditembakkan. Tinggi dinding ini sekitar 8-9 kali, juga dilengkapi dengan atap. Di antara kedua battery ini terdapat sebuah lapangan dan terdapat banyak meriam yang diatapi. Di ujung lapangan terdapat bangunan paseban (pendopo) untuk menerima tamu umum, merupakan satu ruangan persegi empat dengan atap dan dinding dihiasi dengan senapan-senapan” (Utomo 2004: 154).

Lokasi Keraton Kuto Batu saat ini menjadi bangunan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Sebelumnya bangunan tersebut merupakan rumah tinggal komisaris Hindia Belanda pada abad ke XIX M. Hasil penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Puslit Arkenas tahun 1989, diketahui bahwa bangunan keraton dibuat dari bahan bata dengan pondasi dari kayu unglen yang ditanam. Tembok bata tersebut merupakan bata berspesi dari bahan campuran kapur dan pasir (Utomo 2004: 154).

C. Benteng Kuto Besak Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam

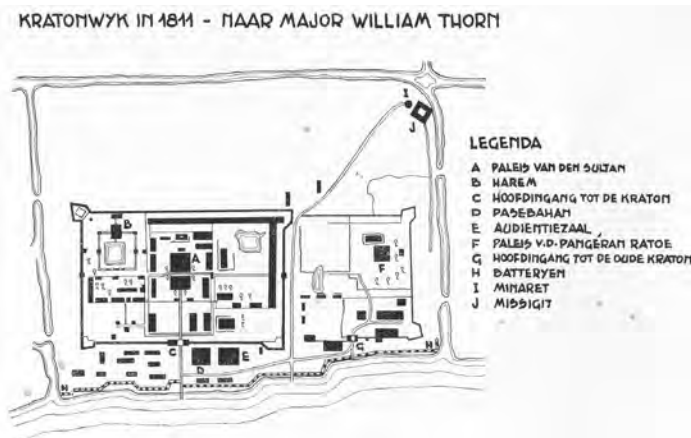


Denah Benteng Kuto Besak (dok. Balar Plb)

Secara keseluruhan Benteng Kuto Besak berdenah persegi panjang dan berukuran 288,75 m x 183,75 m. Benteng Kuto Besak menghadap ke arah tenggara tepat di tepi Sungai Musi. Di tiap-tiap sudut benteng terdapat bastion, 3 bastion di sudut utara, timur dan selatan berbentuk trapesium sedangkan bastion sudut barat berbentuk segilima. Benteng Kuto besak memiliki 3 pintu gerbang, yaitu di sisi timur laut, dan barat laut serta pintu gerbang utama di sisi tenggara. Pada dinding benteng terdapat celah intai yang berbentuk semakin ke dalam semakin mengecil (Novita 2001: 1).

Di bagian depan benteng terdapat dermaga yang disebut 'tangga dalem' yang merupakan jalan sultan menuju Sungai Musi. Di bagian ujung tangga dalem terdapat sebuah gerbang beratap limas yang disebut 'tangga raja'. Di bagian depan

benteng juga terdapat alun-alun yang disebut ‘meidan’. Di dekat gerbang utama terdapat meriam yang diletakkan berjajar. Di sebelah kanan pintu gerbang terdapat bangunan ‘pasebahan’ dan ‘pamarakan’. Bangunan-bangunan tersebut berdenah persegi panjang, terbuat dari kayu, beratap sirap, dan tidak berdinding. Bangunan pasebahan merupakan tempat penyampaian ‘seba’ (Hanafiah 1989:13). Pada bangunan pamarakan terdapat ‘balai bandung’ atau ‘balai seri’ yang merupakan tempat duduk sultan. Pada saat upacara kebesaran balai bandung dilengkapi dengan regalia kesultanan (Hanafiah 1989: 14).



Situasi Benteng Kuto Besak Tahun 1811 (dok. Balar Plb)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pintu gerbang Benteng Kuto Besak terdapat 3 buah. Pintu gerbang utama yang terletak di bagian tenggara disebut ‘lawang loteng’ atau ‘lawang kuto’, sedangkan pintu gerbang yang terletak di bagian timur laut dan barat laut disebut ‘lawang buritan’. Kedua pintu gerbang tersebut berukuran lebih kecil daripada pintu gerbang utama (Hanafiah 1989: 14).



Salah Satu 'Lawang Buritan' Benteng Kuto Besak (dok. KITLV)



Pintu Gerbang Utama Benteng Kuto Besak (dok. KITLV)

Di bagian dalam benteng terdapat tempat tinggal sultan yang disebut 'dalem' atau 'rumah sirah'. Dalem tersebut terdiri dari beberapa bangunan dan dikelilingi oleh tembok yang terdiri dari 2 lapis. Salah satu bangunan dalem yang menghadap ke Sungai Musi berfungsi sebagai 'pamarakan' dimana sultan dapat memandang luas keraton dan Sungai Musi. Di bagian belakang dalem terdapat 'keputren'. Bangunan ini dilengkapi dengan sebuah kolam pemandian yang berbentuk segiempat (Hanafiah 1989: 14).

D. Benteng Kuto Besak Pada Masa Kolonial

Setelah dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam, wilayah ini dijadikan daerah administrasi Hindia-Belanda yang dipimpin oleh seorang residen. Pusat administrasi dilokasikan di sekitar Benteng Kuto Besak, yaitu bekas Keraton Kuto Lamo. Di lokasi ini didirikan sebuah bangunan baru sebagai kediaman residen dan sekarang digunakan menjadi Museum Sultan Badaruddin II. Pada masa ini Benteng Kuto Besak dialihfungsikan menjadi instalasi militer dan tempat tinggal komisar Hindia-Belanda, pejabat pemerintahan dan perwira militer. Pemukiman di dekat



Salah Satu Bangunan Dalam Benteng Kuto Besak Tahun 1890 (dok. KITLV)

keraton yang dulunya merupakan tempat tinggal bangsawan Kesultanan pada masa ini ditempati oleh perwira-perwira dan pegawai Hindia-Belanda.



Salah Satu Bangunan Hunian Dalam Benteng Kuto Besak (dok. Balar Plb)

Sebagai instalasi militer, bangunan-bangunan yang terdapat di bagian dalam benteng diganti dengan bangunan baru dan dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu kantor, hunian dan bangunan pertemuan. Secara umum bangunan hunian dibagi menjadi dua jenis, yaitu rumah dan barak. Bangunan rumah diperuntukan untuk perwira sedangkan bangunan barak untuk prajurit. Berdasarkan bentuk dan ukurannya bangunan rumah juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu rumah perwira tinggi yang terletak di bagian timur dan rumah perwira pertama dan menengah di bagian barat benteng (Novita 2001: 6-25).



Bangunan RS AK Gani (dok. Balar Plb)

Pada tahun 1930-an, bagian selatan benteng diubah menjadi rumah sakit, yang sampai sekarang dikenal dengan nama RS AK Gani. Bangunan kantor rumah sakit tersebut sudah mengalami perubahan, sehingga yang dapat diidentifikasi kekunoannya hanya tampak mukanya saja. Secara keseluruhan bangunan-bangunan yang terdapat di dalam benteng merupakan bangunan bergaya art deco, yang berkembang pada awal abad XX M (Novita 2001:6-25).

E. Pembahasan

Di kalangan umum tinggalan-tinggalan arkeologi yang berupa bangunan dikenal dengan istilah 'bangunan kuna'. Sebagai warisan budaya masa lalu maka bangunan kuna sudah seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya. Hal ini dikarenakan terkadang kelestarian bangunan kuna terancam karena umumnya berada di lokasi yang secara ekonomis cukup strategis sehingga dalam pembangunan fisik kota nilai ekonomis mengalahkan nilai-nilai lain yang dimilikinya.

Ditinjau dari segi kesejarahan, warisan budaya masa lalu bernilai penting karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh sejarah tertentu baik lokal maupun nasional; dari segi ilmu pengetahuan, warisan budaya masa lalu dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu-ilmu tertentu seperti arkeologi, arsitektur, antropologi atau sosiologi; dari segi kebudayaan, warisan budaya masa lalu merupakan pendukung keberadaan dan kelangsungan kebudayaan masyarakat setempat; dan akhirnya dari segi sosial ekonomi, warisan budaya masa lalu dapat dijadikan simbol kebanggaan daerah atau aset wisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat.

Pelestarian bangunan kuna pada dasarnya dilandasi dua hal, yaitu selain memiliki nilai historis, bangunan tersebut juga memiliki nilai estetis gaya arsitektur tertentu yang berkembang pada saat bangunan tersebut didirikan. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian tinggalan arkeologi di Kota Palembang adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri No KM.09/PW.007/MKP/2004, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang menetapkan Benteng Kuto Besak sebagai salah satu situs di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang merupakan Benda Cagar Budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sebelum Keputusan Menteri tersebut terbit, pihak Pemerintah Kota Palembang sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur peruntukan kawasan benteng Kuto Besak, yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 1987 tentang Peruntukan Kawasan Wisata Benteng Kuto Besak dan Sekitarnya di Bagian Wilayah Inti Kota Palembang, dan Peraturan Daerah No 8 tahun 2000

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009.

Berkaitan dengan hal tersebut, area ruang kawasan di sekitar Benteng Kuto Besak sebaiknya ditata kembali. Perlu diketahui bahwa penataan ulang ini tidak berarti menciptakan suatu yang baru melainkan memanfaatkan komponen-komponen yang telah ada. Dalam penataan ulang tersebut sebaiknya ditetapkan pemanfaatan ruang melalui sistem pembagian yang jelas dan relevan.

Kawasan di sekitar Benteng Kuto Besak dapat dibagi-bagi menjadi beberapa zona (mintakat), yaitu zona inti, penyangga dan pengembangan. Dalam penentuan zona (pemintakatan) tersebut dapat dilakukan dengan cara melaksanakan studi evaluasi kawasan yang bertujuan untuk mendata dan mengetahui distribusi persebaran serta melakukan penilaian terhadap potensi obyek warisan budaya untuk kemudian digunakan sebagai dasar pemintakatan.

Secara keseluruhan zona inti kawasan benteng Kuto Besak yang merupakan obyek utama dari tujuan wisata dapat ditentukan berdasarkan batas-batas Benteng Kuto Besak masa lalu. Secara geografis Kawasan Benteng Kuto Besak mempunyai batas-batas yang cukup jelas berupa sungai-sungai yang mengelilinginya, yaitu Sungai Musi, Sungai Sekanak, Sungai Kapuran dan Sungai Tengkuruk. Meskipun Sungai Kapuran dan Sungai Tengkuruk saat ini sudah hilang tetapi polanya masih dapat terlihat, yaitu Sungai Kapuran menjadi Jl Kapuran dan Sungai Tengkuruk menjadi Jl Sudirman.

Beberapa tinggalan arkeologi yang berasal dari masa Kesultanan Palembang Darussalam dan Kolonial Hindia-

Belanda sampai saat ini masih dapat ditemukan di kawasan tersebut, yaitu : Masjid Agung, Bangunan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Kantor Walikota Palembang, Hotel Musi, dan Bangunan Societeit. Secara keseluruhan tinggalan-tinggalan arkeologi di sekitar Benteng kuto Besak dikelola oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Palembang, KODAM II Sriwijaya dan masyarakat umum.

F. Penutup

Dalam perjalanan sejarahnya Benteng Kuto Besak selain berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan Palembang Darussalam, benteng ini juga berfungsi sebagai bangunan pertahanan. Ketika Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda, fungsi Benteng Kuto Besak lebih diutamakan menjadi instalasi militer, meskipun demikian di dalam benteng juga berfungsi sebagai tempat tinggal komisariss Hindia-Belanda, pejabat pemerintahan dan perwira militer.

Pengembangan Benteng Kuto Besak dan tinggalan-tinggalan arkeologi di sekitarnya sebagai obyek wisata sangat erat kaitannya dalam upaya penyebaran informasi budaya kepada masyarakat luas karena selain berekreasi para wisatawan juga dapat mengetahui sejarah Kota Palembang. Melihat beragamnya pengelola tinggalan-tinggalan arkeologi di sekitar Benteng Kuto Besak dibutuhkan komitmen para pengelola sehingga pariwisata di kawasan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan produk hukum yang memayungi pengelolaan kawasan wisata Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, seperti perda tentang kawasan bersejarah

dan pengelolaannya yang kemudian dilanjutkan dengan memorandum of understanding yang ditandatangani para pengelola tinggalan arkeologi yang menjadi objek wisata di Kawasan Benteng Kuto Besak.

KEPUSTAKAAN

Hanafiah, Djohan, 1988, *Palembang Zaman Bari. Citra Palembang Tempo Doeloe*. Palembang: Humas Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Palembang.

----- . 1989. *Benteng Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakan Kemerdekaan*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Kasnowihardjo, Gunadi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin

Novita, Aryandini dan Darmansyah, Armadi. 2001. *Laporan Penelitian Arkeologi di Benteng Kuto Besak Palembang* (tidak diterbitkan).

nn, 1997, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya.

Sevenhoven, J.L. van, 1971, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhartara.

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, 2002, Laporan Survei Bangunan Kolonial di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (tidak diterbitkan).

Raswaty, Retno, 2002, Laporan Kegiatan Inventarisasi BCB Tidak Bergerak Masa Kolonial dan Kesultanan Palembang Darussalam di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (tidak diterbitkan).

Utomo, Bambang Budi dan Djohan Hanafiah. 1993. "Palembang Masa Pasca-Sriwijaya" , *Sriwijaya dalam Perspektif Arkeologi dan Sejarah* hal. B3-1 – B3-12.

..... dan Djohan Hanafiah, Hasan Muarif Ambary. 2004. "Perkembangan Kota Palembang. Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern" (tidak diterbitkan).

BENTENG TARAKAN : KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN PELESTARIAN

oleh:

Drs. Edi Triharyantoro¹

A. Keletakan Tarakan

Tarakan adalah wilayah berawa-rawa yang terletak di tepi selat Makassar Sulawesi, di lepas pantai timur laut Kalimantan yang memiliki luas sebesar 657,33 km². Pulau Tarakan terletak diantara 3°.19'-3°.20' Lintang Utara dan 117°.34'-117°.38' Bujur Timur. Batas-batas administrasi Tarakan; di sebelah utara adalah pesisir pantai Kec. P. Bunyu, sebelah timur Kec. P. Bunyu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan pesisir pantai Kec. Tanjung Palas dan sebelah barat adalah pesisir pantai Kec. Sesayap. Luas daratan Pulau Tarakan 250,80 km² dan luas lautnya 406,53 km². Bagian daratan Tarakan terbagi atas 4 Kecamatan dan 21 Kelurahan(www.tarakankota.co.id).

¹ Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda

B. Latar Sejarah Tarakan

Kondisi geografis dari wilayah Tarakan, menyebabkan hubungan politik dan perdagangan kerajaan Tidung, satu-satunya kerajaan Islam di Tarakan, hanya terpaku pada wilayah-wilayah yang ada didekatnya. Kerajaan ini lebih banyak berhubungan dengan kesultanan Sulu di Filipina, Brunei dan Sabah di Malaysia. Untuk hubungan diplomasi lainnya tercatat hubungannya hanya dengan tempat-tempat di wilayah Kalimantan Timur bagian utara lainnya, yaitu Bulungan, Berau, Nunukan dan Malinau. Tidak ada data yang menyebutkan bahwa Kerajaan Tidung berhubungan dengan kerajaan besar di wilayah Kalimantan lainnya, seperti Banjar dan Kutai(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan).

Setelah mundurnya Kerajaan Tidung, pulau Tarakan seperti lenyap dari kancah sejarah nasional. Tarakan kembali disebut-sebut dalam dunia sejarah ketika sumur minyak pertama ditemukan di Tarakan pada tahun 1896. Penemuan sumur minyak bumi di Pulau Tarakan diteruskan dengan pengeboran minyak bumi pada tahun 1897 oleh perusahaan minyak Hindia Belanda BPM (*Batavia Petroleum Maatschappij*) dan TPM (*Tarakan Petroleum Maatschappij*). Minyak dari Tarakan dianggap salah satu minyak terbaik di dunia. Jurnal Bursa Saham Belanda, "*Amsterdam Effectenblad*" tahun 1932 menyebutkan "*Kualitas minyak bumi di Tarakan cukup baik, sehingga kapal-kapal besar bisa mendapatkan minyak dengan segera dan bisa langsung memasukkannya ke dalam tangki (kapal tanker)*". Ini merupakan bukti kuat bahwa pulau Tarakan adalah salah satu pulau dengan nilai sumberdaya alam yang tinggi.

**Makalah disampaikan di Seminar “Pemanfaatan Kembali Benteng-Benteng Masa Lalu di Indonesia” di benteng Vredenburg, diselenggarakan oleh IAAI Komda DIY – Jateng pada tanggal 16 Juni 2010 dalam rangka H.U.T Purbakala ke 97.*

Pada tahun 1941, produksi pertahun mencapai 4,58 juta barel minyak atau rata - rata produksi harian 12,550 BOPD (Barrel Oil Per Day). Sementara itu catatan lain mengatakan bahwa sebelum perang dunia kedua, Tarakan menghasilkan 6 juta barel minyak setiap tahun. Banyak tenaga kerja didatangkan terutama dari Pulau Jawa seiring dengan meningkatnya kegiatan pengeboran. Mengingat fungsi dan perkembangan wilayah ini, pada tahun 1923 Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menempatkan seorang Asisten Residen di pulau ini yang membawahi 5 (lima) wilayah yakni : Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan dan Berau (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tarakan).

Pada saat perang dunia kedua meletus, tentu saja Tarakan menjadi salah satu wilayah yang akan diperebutkan antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Jepang adalah salah satu negara yang terikat dengan negara-negara poros di Eropa (Jerman dan Italia), sebagai salah satu negara yang terlibat dalam perang dunia kedua, Jepang memerlukan sumberdaya dalam menunjang kegiatan perang tersebut. Salah satu sumberdaya yang dibutuhkan adalah kebutuhan bahan bakar minyak.

Selain daripada itu, Jepang pastinya juga berusaha menguasai tempat-tempat yang dianggap strategis dalam hal pertahanan, yaitu yang berada di daerah terluar untuk dijadikan tempat memantau dan pertahanan awal apabila terjadi serangan balasan dari pihak lawan(sekutu).

Salah satu tempat yang dianggap strategis adalah Pulau Tarakan di Kalimantan Timur. Tarakan memiliki sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan Jepang yaitu minyak bumi dengan jumlah besar, serta memiliki nilai strategis sebagai sebuah wilayah yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan terintegrasi. Mengingat Philipina adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Jepang, maka diperlukan sebuah area dengan sistem pertahanan tingkat tinggi dan selain itu juga tempat terdekat untuk pengiriman minyak ke Jepang. Oleh karena Jepang merencanakan membuat sebuah benteng pertahanan yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik serta untuk menghadapi serangan balasan tentara Sekutu ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_\(1942\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_(1942))).

Disamping itu, untuk menguasai Indonesia dibagian selatan (Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya termasuk Holandia/Papua Nugini), perlu ada sebuah tempat yang akan dijadikan batu loncatan ke arah selatan dengan kekuatan sumberdaya alam yang menunjang. Maka Tarakan adalah satu-satunya pilihan yang terbaik untuk hal tersbut diatas. Tarakan menjadi target utama Jepang dalam menguasai Hindia Belanda secara lebih luas dan menyeluruh.

Untuk mengamankan Tarakan dari rencana ekspansi Jepang tersebut, maka Belanda yang lebih dulu bercokol di Tarakan, dengan segala keterbatasan persenjataan yang ada, berusaha membuat pertahanan di Tarakan. Benteng pertahanan ini, Menurut buku "*Palagan Perebutan Kota Minyak Sanga - Sanga*" yang diterbitkan oleh yayasan 27 Januari Balikpapan, pulau Tarakan diperkuat dengan I batalyon infanteri dengan 7 buah kendaraan lapis baja (1 detasemen),

4 baterai meriam pantai, beberapa seksi senapan mesin 12,7 mm, 4 seksi meriam PSU 2 cm dan 4 cm dan ditambah satuan pesawat pemburu "Bufallo Brewster", total jumlah pasukan Belanda yang ada di Tarakan ada 1600 orang dan dipimpin oleh Letnan Kolonel S. de Waal (anonymous : 1982 : 42).

Perang memperebutkan tarakan sudah mulai terjadi sejak akhir Desember 1941, walaupun bukan perang terbuka, tetapi hanya perang udara antara angkatan udara Belanda dan Jepang. Perang sesungguhnya terjadi pada minggu kedua Januari 1942, tepatnya tanggal 11 sampai dengan 12 Januari 1942. Dalam tempo 2 hari tentara Jepang bisa mengalahkan pertahanan Belanda di Tarakan. Kesatuan di bawah Laksamana Madya Hirose Sueto berangkat pada 7 dan 8 Januari dari Davao dan Jolo ke arah selatan menuju Kalimantan. Di dalamnya terdapat penabur ranjau, pemburu kapal selam, kapal pendarat cepat, dan 16 kapal angkut serta Resimen Tempur ke-56 dan Satuan Khusus Pendarat Angkatan Laut Kure ke-2. Untuk keamanan satuan tempur tersebut, Armada Perusak ke-4 di bawah Laksamana Muda dan Divisi Perusak ke-2 dan ke-9 disiagakan. Dua kapal pengangkut pesawat terbang amfibi dan 23 pesawat tempur yang berpangkalan di Jolo juga dipersiapkan untuk memberikan bantuan udara (Iwan : 2004 : 19-20).

Pada tanggal 10 Januari, sehari sebelum pecahnya pertempuran, Belanda telah terlebih dahulu merusak dan membakar ladang-ladang minyak di Tarakan, dengan harapan kalau Belanda kalah dalam pertempuran, sumberdaya minyak bumi di Tarakan tidak dapat digunakan oleh Jepang termasuk sebagian benteng pertahanan. Ketika Tarakan Jatuh ke tangan Jepang, hal yang pertama dilakukan oleh Jepang

adalah memperbaiki instalasi minyak di Tarakan sehingga bisa dimanfaatkan oleh Jepang (Iwan : 2004 : 24).

Selama tiga tahun Jepang berkuasa atas Tarakan, membawa perubahan yang sangat besar, terutama adalah pemindahan penduduk dari Jawa untuk dijadikan Romusha dan Jugun Ianfu. Hal ini menjadikan keragaman etnis di Tarakan menjadi lebih beragam, walaupun tidak semua dari penduduk yang didatangkan ke Tarakan dapat selamat.

Selain benteng pertahanan yang sebelumnya dibuat oleh Belanda dan dimanfaatkan kembali oleh Jepang, Jepang sendiri juga membuat benteng-benteng pertahanan yang memanfaatkan tenaga Romusha dari Pulau Jawa. Bisa dikatakan bahwa Tarakan tidak lagi hanya sebuah pulau yang dimanfaatkan sumberdaya alamnya untuk kepentingan ekonomis, Tarakan juga adalah sebuah sistem pertahanan militer yang terintegrasi antara pertahanan laut, udara dan darat. Sistem pertahanan inilah yang sekarang banyak terdapat di wilayah Tarakan, terutama di bandara Juwata dan kawasan Peningki Lama.

Hak milik melahirkan konsep bahwa ada batas dimana intervensi orang lain, orang luar tidak diperkenankan. Untuk itu harus dipertahankan, meskipun tidak ada yang tahu persis apa yang menjadi milik manusia pertama diluar tubuh dan dirinya sendiri. Dalam seluruh jalan pikiran androsentrik, dimana lelaki menjadi pusat dunia, hak milik pada awalnya mungkin hanya dua, yaitu istri, sekurang-kurangnya menurut Friderich Engles, dan tanah, sekurang-kurangnya menurut Rousseau. Hanya ketika keduanya menjadi milik dan hak milik maka, konsep tentang mempertahankan sesuatu itu muncul (Dhakidae, 2010 : 2).

Mempertahankan sesuatu yang berhubungan atau kedaulatan negara merupakan kewajiban semua negara di dunia kecuali swiss. Dan semua negara demokrasi mengarahkan reformasi bidang pertahanan pada profesionalisme, efektif, dan akuntabel secara politik dari konsep hingga operasionalisasinya. Maksimalisasi kekuatan pertahanan untuk menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan warga negara merupakan kondisi dasar yang bisa diterima (Riefqi Muna : 2010 : 21).

Namun demikian, sistem pertahanan tidak berdiri sendiri, ia harus berbagi dengan faktor-faktor lain seperti pendidikan social dan budaya. Dalam konsep pertahanan elemen-elemen tersebut kadang dianggap sebagai “masalah pengganggu” (*problema spoilers*), terutama masalah warisan budaya. Hal tersebut memang dapat dimaklumi karena berbicara tentang warisan budaya, khususnya tentang penguasaan dan pengaturannya adalah merupakan persoalan politik seperti yang dikatakan Laurajane Smith. Ia mengatakan bahwa “ *The issue of control of heritage is political because it is a struggle over power. Not only because deferent interest will have different and usally an equal acces to resources of power, but also because heritage is itself a political resource*”. (Smith : 2006 : 281).

Sebagai sesuatu yang bermuatan politik, maka warisan budaya dapat menjadi pendorong kooperasi dan kolaborasi diantara para stakeholder, tetapi dapat pula menjadi sumber dendam dan keruwetan. Adapun konflik itu muncul umumnya berasal dari fakta bahwa interpretasi manajemen warisan budaya adalah suatu proses yang dinamik (Leask cs: 2006: 44).

Oleh karena itu, ada dua hal yang sangat penting, saling berkaitan dan berperan dalam manajemen warisan budaya. Kaitannya dengan soal-soal politik yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber-sumber politik
2. Mencermati identitas politik untuk menegaskan dan untuk modal negosiasi serta koordinasi dengan jajaran pemerintah yang lebih luas

Dari uraian di atas akan dibicarakan contoh yang berkaitan dengan kasus benteng Tarakan, sehubungan dengan rencana TNI Angkatan Laut untuk membangun Pangkalan Utama Angkatan Laut (LANTAMAL) di Desa Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan, Kalimantan Timur.

Diawali dengan surat Komandan Pangkalan TNI-AL Nomor B/464/XII/2009 kepada Kadisbudparpora kota Tarakan yang diantara lain isinya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan KASAL Nomor KEP/834/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang penataan ulang Master Plan Kotama dan Satker dilingkungan TNI AL termasuk didalamnya Master Plan LANAL Tarakan menjadi LANTAMAL.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon dapatnya relokasi situs-situs peninggalan perang di daerah Mamburungan yang mana sebagian besar masuk dalam area rencana pembangunan MAKO LANTAMAL.

Menindaklanjuti surat tersebut, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda mengadakan koordinasi dengan Komandan Pangkalan TNI AL Tarakan dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota

Tarakan. Hasil koordinasi tersebut dibawa ketingkat pusat dan dirapatkan di tingkat Direktur yang dihadiri oleh Jajaran TNI AL dan TNI AD. Dalam rapat tersebut Angkatan Laut menyiapkan tiga alternatif berkaitan dengan keletakan sumberdaya Arkeologi di area tersebut. Adapun alternatif-alternatif tersebut adalah:

1. Memasukkan semua tinggalan kolonial ke dalam area Mako Lantamal.
2. Memindahkan semua meriam ke lokasi yang telah disediakan dan memasukan bunker serta bangunan pengintai ke dalam area rencana pembangunan Mako Lantamal.
3. Area Mako Lantamal berada di luar tinggalan kolonial.

Dalam rapat tersebut “sementara” disepakati bahwa alternatif ke tiga yang disetujui dalam perencanaan pembangunan Mako Lantamal. Berdasar pada kesepakatan rapat tersebut diatas, maka pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda menindak lanjutinya dengan menyiapkan konsep-konsep pengembangan dan pengelolaan kawasan situs Peningki Lama yang didasari oleh acuan dasar pelestarian. Adapun konsep pelestarian yang diajukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda adalah memadukan antara kepentingan pertahanan yang bersifat strategis(tertutup), dan kepentingan pengelolaan situs/benda cagar budaya yang bersifat publik(terbuka).

Paduan kepentingan ini diharapkan menjadi solusi yang dapat memuaskan semua pihak tanpa harus mengorbankan salah satu kepentingan atas kepentingan yang lain, dengan demikian nilai historis yang terkandung di kawasan situs

Peningki Lama dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan Kebudayaan serta ekonomi.

Konsep pengelolaan dan pengembangan yang diajukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda terdiri atas dua desain, yaitu :

1. Design I

Pengelolaan wilayah bersejarah dikelola oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda, Angkatan Laut dan Pemerintah Kota Tarakan. Pemeliharaan dan pengawasan BCB dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. Batas dari area umum dan militer dipisahkan oleh pagar. Pada bagian umum terdapat 6 buah Benda Cagar Budaya yang terdiri dari 4 buah meriam dan 2 buah bunker pillbox yang berhadapan langsung dengan pantai. Sementara itu bagian militer adalah bagian yang tidak dapat dimasuki oleh umum, karena merupakan wilayah yang terlalu dekat dengan fasilitas militer, yaitu jalan akses dari pelabuhan menuju ke Mako Lantamal. Pada bagian ini terdapat 6 buah Benda Cagar Budaya yaitu 2 buah bangunan pengintai di puncak tertinggi, 2 buah meriam dan 2 buah bunker pillbox.

2. Design II

Pengelolaan wilayah bersejarah dilakukan sepenuhnya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda dan pemerintah kota Tarakan. Akses jalan menuju markas dipindah ke sisi selatan batas situs. Pergeseran akses jalan ini sedikit merubah rencana yang dilakukan oleh pihak TNI AL. Design kedua ini lebih memungkinkan bagi pengelola (Pemerintah Kota Tarakan dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

Samarinda) untuk mendapat wilayah kelola situs yang lebih luas. Dari desain ini, wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat umum menjadi lebih luas dengan jumlah Benda Cagar Budaya yang lebih banyak yaitu 10 buah tinggalan yang terdiri dari 6 buah meriam, 4 bush bunker pillbox. Bangunan pengintai tetap terlarang bagi umum karena berada di puncak tertinggi bukit, sehingga bila itu dibuka bagi umum maka tingkat kerahasiaan Markas Komando akan dapat terlihat dari area tersebut.

Dari dua design tersebut ada persyaratan yang tetap ditetapkan dan berlaku secara, yaitu :

1. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda tetap menjadi bagian dari konservasi kawasan situs Peningki lama dengan keleluasan akses pada setiap Benda Cagar Budaya di situs Peningki Lama.
2. Sistem zoning yang sesuai dengan kosep pelestarian tetap diberlakukan, dan zona tersebut dibagi menjadi zona inti pada Benda Cagar Budaya sesuai dengan pemintakatan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda, zona Penyangga pada bagian tertentu untuk kelangsungan konservasi dan menyangga situs, serta zona pemanfaatan yang berada di luar kedua zona tersebut di atas sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan aktivitas.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya Situs Peningki Lama adalah sebagai berikut :

	Design 1	Design 2
Stakeholder	1. BP3 Samarinda. 2. Lantamal. 3. Pemerintah Kota Tarakan.	1. BP3 Samarinda. 2. Lantamal. 3. Pemerintah Kota Tarakan.
Pengelolaan	1. BP3 Samarinda. 2. Lantamal. 3. Pemerintah Kota Tarakan.	1. BP3 Samarinda. 2. Lantamal. 3. Pemerintah Kota Tarakan.
Batas Area	Dibagi dua wilayah secara proporsional	Penguasaan wilayah Lantamal berada di atas bukit, yang berbatasan langsung dengan Mako Lantamal, dengan alasan keamanan Mako
Batasan Kepentingan	1. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda dan Pemerintah Kota Tarakan serta Lantamal bertanggung jawab atas keamanan situs. 2. Pihak Lantamal berwenang terhadap lingkungan situs yang berada dalam wilayah Lantamal, dengan catatan pendirian bangunan baru di wilayah tersebut harus dikoordinasikan dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda. 3. Pihak BP3 Samarinda berhak melakukan pemeliharaan dan pengawasan situs serta akses menuju lokasi.	1. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda dan Pemerintah Kota Tarakan serta Lantamal bertanggung jawab atas keamanan situs. 2. Pihak BP3 Samarinda berhak melakukan pemeliharaan dan pengawasan situs serta akses menuju lokasi.

Publik	1. Daerah yang dikelola Lantamal hanya dapat dilihat. Untuk memasukinya dengan seizin Pihak Lantamal dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda.	1. Area yang dikuasai lantamal terlarang bagi publik, dan apabila publik ingin memasuki wilayah yang berada dalam penguasaan Lantamal harus mendapat ijin dari pihak Lantamal Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda.
Jumlah BCB Terbuka	6 BCB masuk wilayah Pemerintah Kota Tarakan	10 BCB masuk wilayah Pemerintah Kota Tarakan
Jumlah BCB Tertutup	6 BCB masuk wilayah Lantamal	2 BCB di wilayah Lantamal

C. Penutup

Apakah perdebatan mengenai konsep manajemen sumberdaya arkeologi dengan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi, sosial dan khususnya politik harus selalu berbau konflik ?

Politik seperti halnya sistem ketahanan matra darat adalah sangat ditentukan oleh tujuan-tujuan untuk mengamankan ideologi dan keutuhan bangsa dan negara (kepentingan nasional), sementara warisan budaya juga merupakan kepentingan politik nasional untuk membangun jati diri bangsa.

Kasus Tarakan apabila solusinya disetujui oleh semua pihak, maka nampak bahwa kepentingan politik disatu pihak (pertahanan) dengan kepentingan pelestarian warisan budaya dilain pihak akan merupakan azas keseimbangan dalam kepentingan nasional secara lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu kiranya aturan dan rambu-rambu manajemen pertahanan dengan senjata sebagai komponen utama, dapat menggunakan atau memfungsikan kembali senjata-senjata sistem pertahanan masa lampau dalam ruang yang sama.

KEPUSTAKAAN

- Australian Corps 1980, "Report on Operations. Borneo Campaign (Appendix to Japanese Monograph No. 26: Borneo Operations (1941—1945))". di dalam *Foreign Histories Division, Office of the Military History Officer, Headquarters, United States Army Japan. War in Asia and the Pacific*. Volume 6. The Southern Area (Part I), New York and London: Garland Publishing, Inc. Coates, John (2001). *An Atlas of Australia's Wars*. Melbourne: Oxford University Press.
- Anonymous, 1982, *Palagan Perebutan Kota Minyak Sanga-Sanga*, Yayasan 27 Januari, Balikpapan.
- Dhakidae, Daniel, 2010, "Hak Milik, Pertahanan dan Perang", *Prisma* halaman 2, LP3ES, Jakarta.
- Johnston, Mark, 2002, *That Magnificent 9th. An Illustrated History of the 9th Australian Division 1940-46*. Sydney: Allen & Unwin.
- L., Klemen, 1999-2000, *The Netherlands East Indies 1941-42, The capture of Tarakan Island, January 1942*, tidak dipublikasikan.
- Leask, Anna And Alan Fyall, 2006, *Managing World Heritage Sites*, Butterworth-Heinemann Is An Imprint Of Elsevier, Linacre House, Joudan Hill, Oxford.

- Long, Gavin, 1973, *The Six Years War. Australia in the 1939—45 War*, Canberra: Australian War Memorial dan Australian Government Publishing Service.
- Morison, Eliot Samuel, 2001, *The Rising Sun in the Pacific 1931 - April 1942*, University of Illinois Press, Illinois.
- Muna, Riefqi, 2010, "Dinamika Konsep Pertahanan Era Reformasi", *Prisma* halaman 21, LP3ES, Jakarta.
- Ogawa, Itsu, 1980, "Japanese Monograph No. 26: Borneo Operations (1941—1945)". di dalam *Foreign Histories Division, Office of the Military History Officer, Headquarters, United States Army Japan. War in Asia and the Pacific. Volume 6. The Southern Area (Part I)*, New York and London: Garland Publishing, Inc.
- Royal Navy, 1959, *Naval Staff History Second World War: War with Japan, Volume VI; The Advance to Japan*, British Admiralty, London.
- Santosa, Iwan, 2004, *Tarakan: "Pearl Harbor" Indonesia (1942-1945)*". Jakarta: Primamedia Pustaka.
- Smith, Laurajane, 2006, *Uses Of Heritage*, Routledge 270 Madison Avenue, New York.
- Stanley, Peter, 1997, *Tarakan. An Australian Tragedy*, Sydney: Allen & Unwin
- Womack, Tom, 2006, *The Dutch Naval Air Force Against Japan - The Defense of the Netherlands East Indies, 1941-1942*, McFarland & Company, Inc.
- [Http://cas.awm.gov.au/item/111687](http://cas.awm.gov.au/item/111687)
- [Http://referensiilmuwan.blogspot.com/2008/09/menengok-tarakan-tempo-dulu.html](http://referensiilmuwan.blogspot.com/2008/09/menengok-tarakan-tempo-dulu.html)

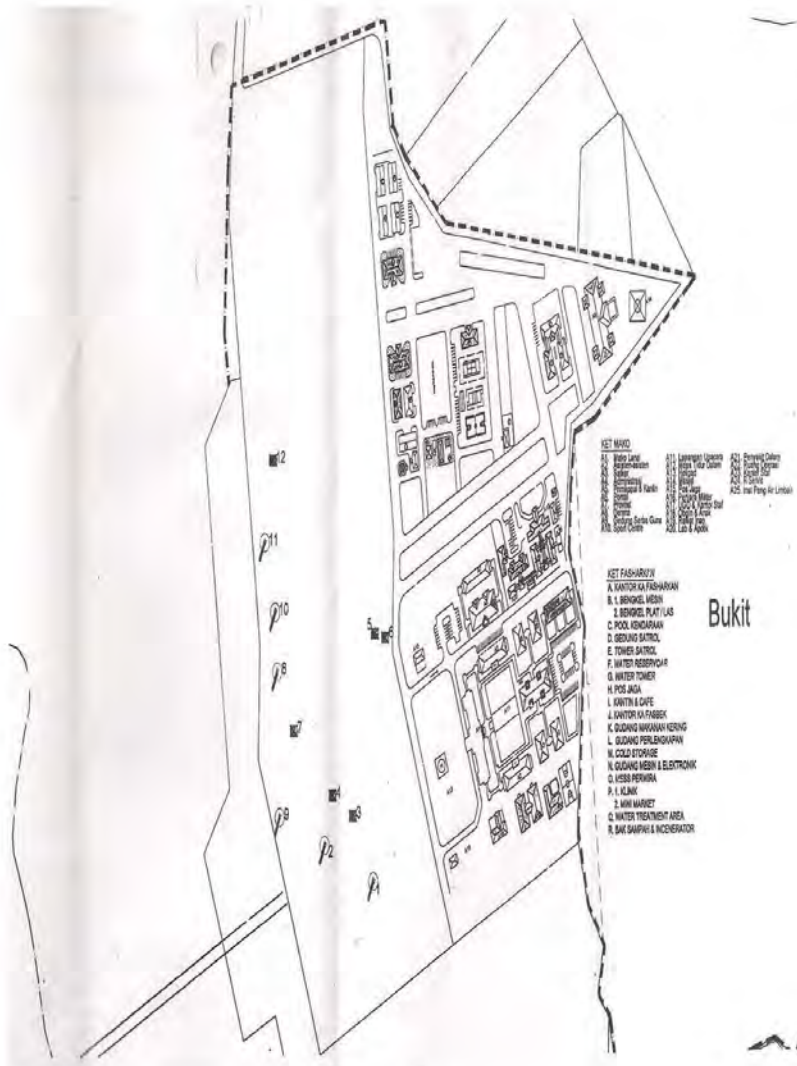
[Http://www.awm.gov.au/histories/](http://www.awm.gov.au/histories/)

[Http://www.tarakankota.co.id](http://www.tarakankota.co.id)

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_\(1942\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_(1942))

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_\(1945\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Tarakan_(1945))

Lampiran:



Gambar 1

**Gambar/Denah
Kawasan Cagar
Budaya Peningki Lama
(1)**

Keterangan:

1. Penjual Tiket
2. Pos Jaga
3. Kios Souvenir
4. Toilet
5. Mushola
6. Pusat Informasi
7. Pelataran
8. Taman tanaman rendah
9. Taman tanaman tinggi

- = Garis Batas
- ▨ = Ps. Batu Andesit
- = Pagar BRC
- = Portal

ZONA I = Zona Utama

- = Zona konservasi dengan konsep untuk mengamankan, melestarikan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk hal lain.

ZONA II = Zona Penyangga / Buffer Area

- = Zona antisipasi apabila ada penelitian lebih lanjut, sehingga tidak boleh ada bangunan di zona ini.

ZONA III = Zona Pemanfaatan

- ▨ = Zona yang disediakan untuk publik dan dimanfaatkan untuk pendirian bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan BCS.

AREA MAKO LANTAMAL = Zona untuk pengamanan strategis MAKO LANTAMAL yang terlarang bagi umum.

Akses Jalan Menuju Dermaga



KEET BUKIT

1. Kios Souvenir	11. Lapangan Olahraga	21. Pemandangan
2. Pos Jaga	12. Lapangan Parkir	22. Pemandangan
3. Kios Souvenir	13. Lapangan Parkir	23. Pemandangan
4. Toilet	14. Lapangan Parkir	24. Pemandangan
5. Mushola	15. Lapangan Parkir	25. Pemandangan
6. Pusat Informasi	16. Lapangan Parkir	26. Pemandangan
7. Pelataran	17. Lapangan Parkir	27. Pemandangan
8. Taman tanaman rendah	18. Lapangan Parkir	28. Pemandangan
9. Taman tanaman tinggi	19. Lapangan Parkir	29. Pemandangan

KEET TAPAKHUTUS

1. KANTOR GA FARMERAN
2. BANGUNAN BERSI
3. BANGUNAN PLAT LAR
4. PRODI KENDAHAY
5. JEMBATAN BATIKOL
6. WATERSHED KENDAHAY
7. WATERSHED KENDAHAY
8. POS JAGA
9. KANTOR I CAFE
10. KANTOR GA FARMER
11. BANGUNAN KENDAHAY
12. BANGUNAN KENDAHAY
13. BANGUNAN KENDAHAY
14. BANGUNAN KENDAHAY
15. BANGUNAN KENDAHAY
16. BANGUNAN KENDAHAY
17. BANGUNAN KENDAHAY
18. BANGUNAN KENDAHAY
19. BANGUNAN KENDAHAY
20. BANGUNAN KENDAHAY
21. BANGUNAN KENDAHAY
22. BANGUNAN KENDAHAY
23. BANGUNAN KENDAHAY
24. BANGUNAN KENDAHAY
25. BANGUNAN KENDAHAY
26. BANGUNAN KENDAHAY
27. BANGUNAN KENDAHAY
28. BANGUNAN KENDAHAY
29. BANGUNAN KENDAHAY
30. BANGUNAN KENDAHAY
31. BANGUNAN KENDAHAY
32. BANGUNAN KENDAHAY
33. BANGUNAN KENDAHAY
34. BANGUNAN KENDAHAY
35. BANGUNAN KENDAHAY
36. BANGUNAN KENDAHAY
37. BANGUNAN KENDAHAY
38. BANGUNAN KENDAHAY
39. BANGUNAN KENDAHAY
40. BANGUNAN KENDAHAY
41. BANGUNAN KENDAHAY
42. BANGUNAN KENDAHAY
43. BANGUNAN KENDAHAY
44. BANGUNAN KENDAHAY
45. BANGUNAN KENDAHAY
46. BANGUNAN KENDAHAY
47. BANGUNAN KENDAHAY
48. BANGUNAN KENDAHAY
49. BANGUNAN KENDAHAY
50. BANGUNAN KENDAHAY
51. BANGUNAN KENDAHAY
52. BANGUNAN KENDAHAY
53. BANGUNAN KENDAHAY
54. BANGUNAN KENDAHAY
55. BANGUNAN KENDAHAY
56. BANGUNAN KENDAHAY
57. BANGUNAN KENDAHAY
58. BANGUNAN KENDAHAY
59. BANGUNAN KENDAHAY
60. BANGUNAN KENDAHAY
61. BANGUNAN KENDAHAY
62. BANGUNAN KENDAHAY
63. BANGUNAN KENDAHAY
64. BANGUNAN KENDAHAY
65. BANGUNAN KENDAHAY
66. BANGUNAN KENDAHAY
67. BANGUNAN KENDAHAY
68. BANGUNAN KENDAHAY
69. BANGUNAN KENDAHAY
70. BANGUNAN KENDAHAY
71. BANGUNAN KENDAHAY
72. BANGUNAN KENDAHAY
73. BANGUNAN KENDAHAY
74. BANGUNAN KENDAHAY
75. BANGUNAN KENDAHAY
76. BANGUNAN KENDAHAY
77. BANGUNAN KENDAHAY
78. BANGUNAN KENDAHAY
79. BANGUNAN KENDAHAY
80. BANGUNAN KENDAHAY
81. BANGUNAN KENDAHAY
82. BANGUNAN KENDAHAY
83. BANGUNAN KENDAHAY
84. BANGUNAN KENDAHAY
85. BANGUNAN KENDAHAY
86. BANGUNAN KENDAHAY
87. BANGUNAN KENDAHAY
88. BANGUNAN KENDAHAY
89. BANGUNAN KENDAHAY
90. BANGUNAN KENDAHAY
91. BANGUNAN KENDAHAY
92. BANGUNAN KENDAHAY
93. BANGUNAN KENDAHAY
94. BANGUNAN KENDAHAY
95. BANGUNAN KENDAHAY
96. BANGUNAN KENDAHAY
97. BANGUNAN KENDAHAY
98. BANGUNAN KENDAHAY
99. BANGUNAN KENDAHAY
100. BANGUNAN KENDAHAY

Gambar 2

**Gambar/Denah Kawasan
Cagar Budaya Peningki
Lama (2)**

Keterangan:

1. Penjual Tiket
2. Pos Jaga
3. Kios Souvenir
4. Toilet
5. Mushola
6. Pusat Informasi
7. Pelataran
8. Taman tanaman rendah
9. Taman tanaman tinggi

--- = Garis Batas

▨ = Ps. Batu Andesi

— = Pagar BRC

— = Portal

ZONA I = Zona Utama

▨ = Area konservasi dengan konsep untuk mengamankan, melestarikan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk hal lain.

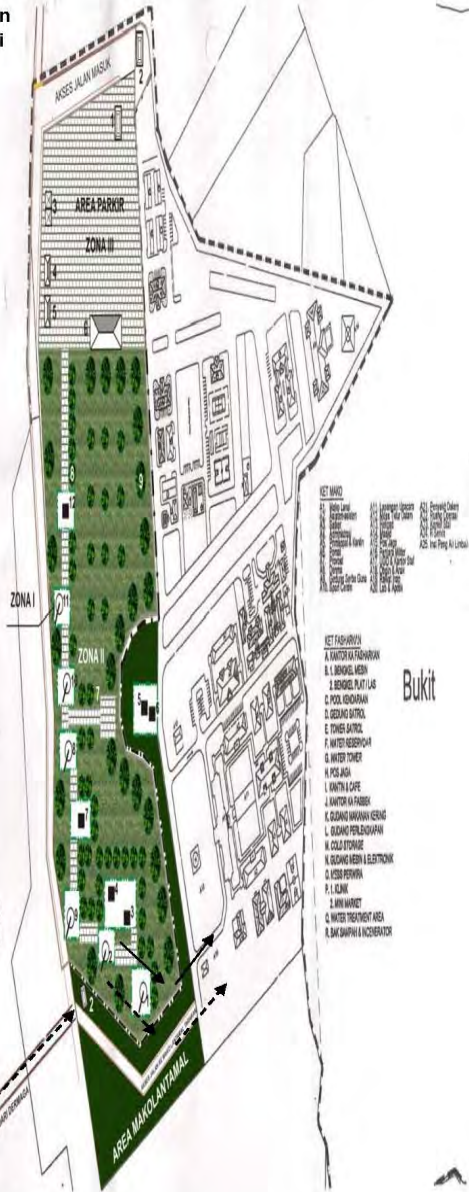
ZONA II = Zona Penyangga / Buffer Area

▨ = Area atriapsi apabila ada perelilian lebih lanjut, sehingga blek boleh ada bangunan di zona ini.

ZONA III = Zona Pemanfaatan

▨ = Area yang disediakan untuk publik dan dimanfaatkan untuk pendirian bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan BCB.



AREA MAKOLANTAMAL = Area untuk pengamanan strategis MAKO LANTAMAL yang telarang bagi umum.









Akses Jalan Menuju Dermaga





Gambar 3

Daftar Inventaris Benda Cagar Budaya Di Situs Peningki Lama

NO	NAM A	NO. INV.	ALAMAT	UKURAN	LETAK GEOGRAFIS	DESKRIPSI	PERIODE	JURPEL	FOTO
1	Bunk er	1/TRK/201 0	Peningki Lama Kel. Mamburung Kec. Tarakan Timur	l= 3,5 m; p= 9,93 m. pintu masuk: l 1,23 m; p= 1 m.		Rangunan empat persegi panjang, muncup pada bukit. Di ujung kiri dan kanan terdapat pintu masuk. Untuk menghubungkan dengan ruang utama dibuat lorong dengan lebar 1 meter. Di bagian atas dikamflase dengan ditanami semak-semak. Sudah pernah diinventaris oleh Dinas Budpar Tarakan dengan no. inv. 4/BUDPAR/2010	Perang Dunia II	tidak ada	
2	Meria m	2/TRK/201 0	Peningki Lama Kel. Mamburung Kec. Tarakan Timur	l. 2,75 m; p. 2,28 m. l. 1,8m. p muncung 1,6 m; p penggarak= 1,4 m.		Laras meriam diadukan ke laut (baru), melingkari perbukitan. Bangun- mian dilindungi oleh lembaran besi tiga sisi dan berdiri di atas landasan berbentuk genta. Di kiri kanan meriam terdapat locker tempat peluru, masing-masing locker ada 6 sisi. Sudah pernah diinventaris oleh Budpar Tarakan dengan no. inv. MI/BUDPAR/07	1902	tidak ada	

3	Meriam	3/IRK/2010	Peningki Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan Timur	F=2,75 m; P=2,28 m; f=1,8 m; P moncong= 1,6 m; p penggerak= 1,4 m.		Terletak sekitar 75 m di sebelah selatan meriam pertama. Kondisi unth. Di kiri kanan meriam terdapat loket tempat peluru, masing-masing loket ada 6 sisi. Sekelilingnya sudah dipagar oleh Dinas Budpar Tarakan, dan diberi no. inv. M2/BUDPAR/07.	1902	tidak ada	
4	Meriam	4/IRK/2010	Peningki Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan Timur	F=2,75 m; P=2,28 m; f=1,8 m. P moncong= 1,6 m.		Terletak sekitar 100 m di sebelah selatan meriam kedua, melingkari bukit. Bagian moncongnya telah lepas dari kedudukan semula. Di kiri kanan meriam terdapat loket tempat peluru, masing-masing loket ada 6 sisi. diberi no. inv. M3/BUDPAR/07.	1902	tidak ada	
5	Bangunan pengintal	5/IRK/2010	Peningki Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan Timur	P=5,25 m; f=5,75 m; l=2,55 m.		Berbentuk empat persegi panjang. Balok penyusunnya bata menggunakan perekat semen. Pinnu masak langsung berhubungan dengan ruangan dan belakang dinding timur ada lubang segi empat memanjang yang berfungsi sebagai pengintal. Sudah pernah diinventaris oleh Dinas Budpar Tarakan dengan no. inv. 06/BUDPAR/07.	Perang Dunia II	tidak ada	

6	Bunker	6/TRK/2010	Peningki Lama Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur	$p=5,2\text{ m}$; $l=4\text{ m}$; $t=3\text{ m}$.		Berbentuk empat persegi panjang. Bahan penyusunnya bata menggunakan perekat semen. Pintu masuk ada dua. Di bagian depan terdapat lorong selebar sekitar 1 m, sebelum masuk ke ruang utama. Sudah pernah diinventaris oleh Dinas Budpar Tarakan dengan no. inv. 09/BUDPAR.07.	PD II	tidak ada	
7	Bunker	7/TRK/2010	Peningki Lama Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur			Berbentuk empat persegi panjang. Terdapat sekitar 50 m di tenggara bunker no inv. 6/TRK/2010. Bahan penyusunnya bata menggunakan perekat semen. Pintu masuk ada dua. Di bagian depan terdapat lorong selebar sekitar 1 m, sebelum masuk ke ruang utama. Sudah pernah diinventaris oleh Dinas Budpar Tarakan dengan no. inv. 10/BUDPAR.07.	Perang Dunia II	tidak ada	
8	Meriam	8/TRK/2010	Peningki Lama Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur	$l=2,75\text{ m}$; $p=2,28\text{ m}$; $l=1,8\text{ m}$. $p\text{ moncong}=1,6\text{ m}$; $p\text{ penggerak}=1,4\text{ m}$.		Terdapat sekitar 50 m di sebelah selatan bunker no. 7/TRK/2010. Kondisi unik. Di kiri kanan meriam terdapat loket tempat peluru, masing-masing loket ada 6 sisi. Sudah diinventaris oleh Dinas Budpar Tarakan no. inv. M5/BUDPAR.07.	1902	tidak ada	

9	Meriam	9/10	9/10	Penangkai Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan Timur	t= 2,75 m; p= 2,28 m; l= 1,8m; p moncong= 1,6 m; p penggerak= 1,4 m.		Tertetak di sebelah tenggara bunker no. 8/10. Kondisi masih bagus, hanya bagian penggerak moncong sudah rusak. Di kiri kanan meriam terdapat loket tempat peluru, masing-masing loket ada 6 sisi.	1902	tidak ada	
10	Meriam	10/10	10/10	Penangkai Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan	t= 2,75 m; p= 2,28 m; l= 1,8m; p moncong= 1,6 m; p penggerak= 1,4 m.		Tertetak paling tepi di dekat pantai sekitar 300 meter di sebelah timur pantai. Moncong diarahkan ke laut. Di kiri kanan meriam terdapat loket tempat peluru, masing-masing loket ada 6 sisi.	1902	tidak ada	
11	Bunker/Bangunan pengintai	11/10	11/10	Penangkai Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan Timur				Perang Dunia II		
12	Bunker/Bangunan pengintai	12/10	12/10	Penangkai Lama Kel. Mambunungan Kec. Tarakan Timur	p= 5 m; l= 4 m; t= 2,5 m		Bangunan berbentuk persegi empat terbuat dari cor beton bertulang bagian atasnya dengan dikamufase semak-semak. Selain berfungsi sebagai pengintai kapal musuh juga sebagai bunker.	Perang Dunia II		

BENTENG-BENTENG KOLONIAL EROPA DI PULAU TERNATE

ANATOMI KONFLIK SUMBERDAYA ALAM DAN BUDAYA DI ABAD EKSPLORASI DUNIA

Nurachman Iriyanto

A. Munculnya Benteng Eropa di Pulau Ternate

Benteng sebagai salah satu tinggalan masa kolonial Eropa merupakan data penting dalam penelitian arkeologi Indonesia. Prospek benteng sebagai objek penelitian arkeologi cukup menjanjikan mengingat jumlahnya yang banyak, dan sebagian di antara benteng-benteng ini masih berdiri atau setidaknya masih dapat disaksikan sisa-sisanya. Mengkaji masalah benteng kolonial Eropa di Indonesia, tentunya tidak menegasi peran Pulau Ternate sebagai daerah yang berperan penting dalam pergolakan dunia di abad ke-16 hingga 19 Masehi dalam perebutan sumberdaya alam, khususnya rempah-rempah, yang dilakukan bangsa Eropa. Dimulai oleh bangsa Portugis yang datang di tahun 1512, dan Spanyol sembilan tahun setelahnya, keduanya berkepentingan

mendirikan benteng pertahanan. Kebiasaan mendirikan benteng tersebut dilanjutkan oleh bangsa Belanda yang datang kemudian. Maka kini di Pulau Ternate masih dapat disaksikan tujuh benteng kolonial Eropa dengan kategori benteng sebagai pos pengamatan, kubu pertahanan, hingga benteng pertahanan yang kompleks dengan permukiman di dalamnya. Adapun yang sudah tidak dapat disaksikan, namun disebutkan dalam sumber sejarah, terdiri atas delapan benteng yakni lain : Benteng Talangame, Fuerza Nueva, Voorburgh, Santa Lucia, Calla Boeka, Puncto Royal, Ietola, dan Redut Don Giel (Atjo, 2008;Wall, 1928). Benteng-benteng di Pulau Ternate menunjukkan perannya yang signifikan dalam peta kesejarahan sebagai representasi keberadaan bangsa Eropa. Di antara kedelapan benteng tersebut terdapat benteng pertama Portugis di Nusantara, dan satu benteng Belanda yang pernah menjadi pusat administrasi sebelum pindah ke Batavia (Lombard, 2005).

Keberadaan sejumlah besar benteng kolonial Eropa di Ternate merupakan salah satu akibat dari kedudukan daerah ini sebagai tujuan strategis penjelajah Eropa dalam perdagangan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh dunia. Seperti ungkapan Tome Pires (Reid, 1999), pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk bunga pala (fuli), dan Maluku untuk cengkeh. Barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia kecuali di tempat itu. Kedatangan bangsa Eropa ke wilayah ini dalam rangkaian aktivitas perdagangan sebagai bentuk hubungan ekonomi antar bangsa. Dalam perkembangannya, hubungan antar bangsa tersebut diikuti dengan persaingan, sengketa, dan peperangan. Peperangan yang

menyertai kegiatan ini tentunya terkait dengan perdagangan yang merupakan salah satu sumber kesejahteraan penting bagi para penguasa (Effendy, 2005). Itulah sebabnya Ternate sebagai sumber penghasil rempah-rempah, khususnya cengkeh, yang berada pada jalur penting perdagangan dipandang perlu untuk diawasi dalam rangka persaingan perdagangan antar bangsa. Dengan demikian, pendirian benteng-benteng pertahanan pada jalur perdagangan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan perdagangan bangsa-bangsa tersebut. Selain itu, fasilitas persenjataan juga ditempatkan pada kapal-kapal dagang dan permukimannya. Karena itulah, perdagangan yang disertai perlindungan senjata itu disebut *armed trade*.

Benteng sebagai sarana perlindungan terhadap rasa aman, telah mengalami perubahan. Di awal perkembangannya benteng merupakan tempat berlindung manusia terutama dari gangguan cuaca atau binatang buas. Seiring dengan perkembangan populasi manusia, maka konflik dalam bentuk fisik berupa bentrokan terkadang mulai terjadi. Begitu pula dengan berkembangnya pengetahuan manusia yang juga membutuhkan sarana perlindungan bagi rasa aman, maka dikenal bangunan untuk perlindungan dari serangan kelompok lain yang berasal dari luar. Pertahanan tersebut didukung pula secara aktif oleh pendukungnya dengan persenjataan, sehingga fungsi benteng sebagai penahan serangan semakin efektif. Di saat bangunan pagar berfungsi sebagai unsur pertahanan maka saat itu pula disebut sebagai benteng, yang berfungsi mem"bentengi" suatu lokalitas. Dengan kata lain, benteng menurut Ian Hogg, adalah "serangkaian bangunan pertahanan untuk melindungi suatu

area tertentu dan berada di bawah pimpinan satu orang” (Abbas,2001). Batasan ini agak terlalu ketat jika diterapkan, oleh sebab itu dalam tulisan ini benteng yang dimaksud adalah *serangkaian bangunan pertahanan untuk melindungi suatu area tertentu dan berada di bawah otoritas tertentu*. Dengan demikian yang dimaksud dengan benteng kolonial Eropa adalah serangkaian bangunan kuat dan kokoh yang dibangun atas prakarsa bangsa Eropa dan pernah dilengkapi dengan unsur ketentaraan beserta persenjataannya dalam pertahanan dan perlindungan terhadap serangan pihak luar atau musuh.

Dalam konteks ini, benteng yang dibangun pada daerah tertentu semestinya dilandasi oleh pertimbangan letak strategis secara ekonomis. Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi, kedatangan awal orang Eropa di Nusantara merangsang perkembangan tata niaga baru di wilayah Nusantara, dan menumbuhkan dua pusat perekonomian dengan segala kegiatannya di Asia Tenggara yaitu selat Malaka dan Kepulauan Maluku, dengan Ternate dan Banda sebagai penghasil cengkeh dan pala (Lombard, 2005). Dalam hubungan sebab akibat antara perniagaan dan pembangunan kastil², Donald B. Calne (2005) mengatakan bahwa perniagaan Eropa mulai marak bersamaan dengan ketika kastil-kastil dibangun di tepi jalur yang strategis untuk pertahanan, yang juga merupakan jalur dagang. Pada kasus di Nusantara barangkali terjadi sebaliknya, yaitu pembangunan kastil marak dilakukan seiring dengan meningkatnya perkembangan perdagangan Eropa di Nusantara.

1. Benteng-benteng Eropa di Pulau Ternate

a. Benteng Kastela



Benteng Kastela tahun 1540 (dokumentasi Safia Marsaoly)

Benteng yang kini terletak sekitar 100 meter dari garis pantai Kastela berada pada titik koordinat N $00^{\circ} 45' 67,2''$ S $127^{\circ} 18' 72,4''$. Pada tahun-tahun awal pembuatannya benteng ini merupakan bangunan yang cukup representatif sebagai basis pertahanan Portugis karena selain letaknya yang menutupi jalur keluar masuk permukiman lama Ternate melalui sungai, juga merupakan benteng yang sekaligus hunian bagi orang-orang Portugis, sehingga dikatakan sebagai kota. Benteng ini berbahan baku tembok terdiri dari batuan andesit dan terumbu karang dengan menggunakan perekat kapur dari hasil pembakaran batu karang. Benteng Kastela memiliki ketebalan dinding yang bervariasi berkisar antara 40 cm hingga 2,70 m. Dinding dengan ketebalan 40 cm berada pada sisi barat benteng

yang merupakan penyekat antar ruangan, sedangkan tebal dinding luar bervariasi antara 1,75 hingga 2,70 m. Dinding luar dengan ketebalan 1,75 m berada pada sisi selatan dan dinding dengan ketebalan 2,70 m ada pada sisi barat daya bangunan.



Struktur Donjon Di Dalam Bangunan Utama Benteng Kastela
(dokumentasi penulis)

Pada jarak 17,30 m dari dinding depan terdapat bangunan utama yang ada di dalam benteng dengan panjang masing-masing sisi dindingnya 12,50 m. Kondisi dinding pada bagian belakangnya kini ditumbuhi pohon lebat yang jika tidak dilakukan pemangkasan, dikhawatirkan akan semakin menambah kerusakan struktur bangunan. Di seberang pos penjagaan sisi utara berjarak 15 m, terdapat struktur bangunan sebagai lanjutan tembok benteng. Dilihat dari susunan pondasinya, dulu mungkin terdapat bangunan dengan satu ruang. Namun keberadaan jalan raya telah menghilangkan bukti artefaktual bangunan masa lalu yang

merupakan bagian integral benteng Kastela. Pada sisi luar dindingnya terdapat struktur dinding sepanjang 150 m, yang jika dibuktikan dengan ekskavasi akan mampu mengungkapkan kelanjutan dinding ini mengingat pada jarak sejauh 300 m dari pos penjagaan tersebut, terdapat struktur bangunan satu ruang tertentu (pos penjagaan ?) yang tepat berada pada sisi tebing jurang arah utara benteng dan telah ditumbuhi pepohonan. Di sekitar titik terakhir yang terpisah dari benteng terdapat struktur bangunan kolam persegi panjang dengan panjang 4,7 m, lebar 3 m dan kedalaman 1,3 m. Dimungkinkan ini adalah kolam persediaan air atau tempat pemandian bagi penjaga pos di lokasi ini. Di lingkungan benteng ini terdapat sungai (dalam sebutan lokal disebut *barangka*) Kastela yang menjadi prasarana penghubung di masa lalu dari dataran tinggi Foramadiyah sebagai salah satu pemukiman lama Ternate ke laut yang muaranya dekat dengan benteng ini.



Kolam Dekat Tebing Sungai Sisi Timur Laut Benteng Kastela
(foto oleh penulis)

Keberadaan benteng ini tidak terlepas dari peran Portugis yang menaklukkan Malaka di tahun 1511, dan kemudian pada akhir tahun tersebut dilakukan pelayaran menuju Maluku dalam upaya pencarian kepulauan sumber rempah-rempah di bawah pimpinan Francisco Serrao dengan singgah di Gresik. Pelayaran menuju Ternate sempat terhenti di Hitu, karena dihantam badai, dan dilanjutkan 1512 kedatangan mereka diterima dengan baik oleh Sultan Ternate (Klerck, 1938). Selama enam puluh tiga tahun berada di Ternate, hingga 1575 Portugis mengangkat Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Muda di Goa India. Gubernur Jenderal yang pertama adalah Antonio de Brito dan selanjutnya berturut-turut diganti oleh 19 (sembilan belas) orang selama Portugis berada di Ternate (Clercq, 1890).

Antonio de Brito membangun Benteng Kastela pada tahun 1522 yang dinamai Saint John, yaitu ketika peletakan batu pertamanya bertepatan dengan hari baptis Saint John, 24 Juni 1522. Di dalam benteng terdapat Gereja Saint John dan Gereja *Our Lady of the Misericordia Brotherhood* (Jacobs, 1974). Dalam sumber lain disebutkan bahwa peletakan batu pertama benteng yang juga dikenal sebagai benteng Sao Paulo ini terjadi pada hari pesta St. Yoanes Pembaptis sesudah dipersembahkan Kurban Misa mulia (Muskens dan Fr. Cornelissen, 1974:57). Benteng Gamalama, sebagai nama lain benteng Kastela yang dibangun dekat dengan istana dan pusat kota Ternate, juga menjadi inti permukiman orang Eropa (Clercq, 1890). Permukiman ini berada di bawah yurisdiksi wilayah hukum benteng Ternate, sehingga memerlukan kepemimpinan sendiri (Abdurachman, 2008).

Di benteng inilah terjadi pembunuhan terhadap Sultan Khairun 28 Februari 1570 atas perintah Gubernur Portugis Lopez de Mosquita yang dilaksanakan oleh kemenakan lelakinya, Martim Antonio Pimental. Nama Sultan Khairun sendiri dieja oleh Portugis dengan "Aeiro", Ia disebutkan berkuasa pada tahun 1534-1545, dan kembali berkuasa di tahun 1546-170 (Jacobs,1974). Atas peristiwa pembunuhan tersebut putra Sultan Khairun, Baabullah yang memerintah antara 1570-1583, bangkit memberontak melawan Portugis, dengan mengepung benteng selama ± 5 tahun serta merebut dan mendudukinya di bulan Desember 1575, dan akhirnya Portugis terusir dari benteng Kastela dan Ternate di tahun itu, untuk kemudian menyeberang ke pulau Tidore. Dengan keluarnya Portugis dari Ternate, maka benteng ini kemudian diduduki oleh Baabullah hingga penawannya pada tahun 1583. Setelah itu pendudukan benteng dilanjutkan oleh anaknya, Said Barakati.

b. Benteng San Pedro è San Paulo

Benteng yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Kotajanji, dibangun oleh Portugis di tahun 1530 (Atjo, 2008). Di benteng ini pernah bertemu dua kelompok pasukan yang dibagi oleh Don Pedro de Acuna, Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina yang pada tanggal 15 Januari 1606 mulai berlayar ke Maluku dan pada 26 Maret tiba di Teluk Talangame. Bertemunya dua kelompok pasukan yang terkoordinir dengan baik ini adalah dalam rangka serangan gabungan antara Spanyol dan Tidore terhadap kekuatan Ternate di Benteng Kastela yang dimulai pada waktu subuh tanggal 1 April

1606. Pada saat serangan terjadi benteng ini baru saja dibangun. Dari benteng inilah Don Pedro mengalihkan prajuritnya untuk mengepung Kastil dan kota Gammalamma, markas besar dan tempat tinggal Sultan Ternate pada masa itu. Namun sebelum orang Spanyol sampai ke tempat tujuannya (Kastil), Sultan Said (cucu Sultan Khairun) telah pergi (Lopez,1992).



Benteng San Pedro è San Paulo Hasil Penataan Oleh Disbudpar
Provinsi Maluku Utara (foto oleh penulis)

Benteng ini dibangun di lokasi dengan ketinggian 50 m dpl. Oleh penguasa Spanyol di tahun 1610 benteng ini dilengkapi dengan 6 meriam dan dihuni oleh 27 orang Spanyol, 20 orang Portugis dan beberapa orang Filipina (Abdulrahman, et al., 2001). Benteng yang dibangun untuk mengawasi laut antara Ternate dan Tidore ini didarati kapal-kapal Spanyol yang berlayar dari Manila. Jika angin tidak terlalu kencang kapal-kapal tersebut membuang jangkar di dekatnya dengan membawa muatan pangan dan tentara.

Namun dalam salah satu sumber sejarah disebutkan bahwa San Pedro è Paulo atau St. Pedro merupakan benteng kecil yang berdiri di dalam Gam Lamo, pernah terbakar dan runtuh pada tanggal 11 Juni 1663. Ketika itu Sultan Mandarsyah telah meninggalkan benteng ini. Dalam lampiran bukunya, Wall menyebutkan bahwa San Pedro è Paulo terletak di antara benteng Kalamatta dan benteng Gam Lamo, di lokasi yang sekarang (Wall, 1928).

c. **Benteng Oranje**



Gerbang Depan Benteng Oranje (foto oleh penulis)

Benteng ini terletak pada koordinat N 00° 47' 57,4" S 127° 23' 20,3" saat ini tepat berada di depan terminal baru Kota Ternate dan pasar yang lahannya merupakan hasil reklamasi pantai di tahun 2001. Benteng yang didirikan di atas puing-puing bekas benteng Portugis di Kampung Malayo itu dilengkapi dengan 16 *embrasure* sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pertahanan Spanyol di pantai barat pulau. Benteng Oranje berdinging

batu cukup tebal, dengan denah berbentuk segi empat dengan bastion di keempat sudutnya, masing-masing bernama : *De Punt Reaal* (Reaal) di bastion baratdaya, *De Punt Jelolo* (Gilolo) di bastion baratlaut, '*T Zeebolwerk* (Klein Zeebolwerk) di bastion timurlaut, '*T Groot bolwerk* (Groot Zeebolwerk) di bastion tenggara, ini mempunyai pintu gerbang bergaya *Barock*, dengan hiasan berbentuk mahkota di tengahnya seperti layaknya bangunan sejaman. Parit (*moat*) yang dibangun mengelilingi tidak digali sejajar dengan "*Zeebolwerk*" melainkan di sisi sebelah Timur bastion bersangkutan, sehingga di depan benteng terdapat lapangan memanjang yang kemudian dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan hukuman. Tepi parit dilapisi batu karang sementara bagian dalam dan luar dinding benteng dilapisi campuran kapur dan pasir. Terdapat empat jalan masuk ke lorong sepanjang dinding, dan tangga dari batu yang ada bordesnya menuju ke bastion Reaal (Schilder, et al., 2006).



Kumuhnya Benteng Oranje di tahun 2010 akibat permukiman masyarakat yang menempel pada dinding benteng (foto oleh penulis)

Sejak awal, benteng Oranje sebagai benteng pertama Belanda (Muskens dan Cornelissen, 1974) merupakan permukiman bagi orang-orang Belanda di Ternate, bersama dengan permukiman Belanda lainnya di benteng Gofase (Kastil Gilolo) di Jailolo, benteng Barnevelt di Bacan dan benteng Mauritius di Pulau Makian (Schilder,et,al 2006). Secara fisik tembok benteng yang berbahan baku batu bata, batu kali, batu karang dan pecahan kaca ini, ruang-ruang di lorong-lorongnya terutama pada lantai I yang terdapat di sepanjang tembok berada dalam kondisi memprihatinkan. Ke-13 meriam yang terdapat di benteng ini masih dalam keadaan *insitu*.

Namun kini Benteng Oranje tenggelam oleh kekumuhan yang diakibatkan oleh penataan ruang kota yang tidak sinergis. Area reklamasi di dekat Benteng Oranje masuk ke dalam Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Utara, yang oleh Pemerintah Kota Ternate ditujukan untuk menciptakan kualitas lingkungan di wilayah pesisir pusat Kota Ternate yang bersih dan rapi. Tujuan tersebut sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; memperkuat fungsi dan peranan kawasan pusat kota sebagai pusat perdagangan dan wisata; dan mewujudkan jati diri Kota Ternate sebagai kota berbudaya menuju masyarakat madani (Djainal, 2005). Maka kini benteng Oranje terletak berada jauh dari garis pantai.

d. Benteng Kalamata

Benteng yang kini berada tepat di bibir pantai berhadapan dengan Pulau Maitara dan Tidore terletak pada

koordinat N $00^{\circ} 45' 73,7''$ S $127^{\circ} 22' 38,4''$. Berdasarkan penelitian lapangan terhadap denah benteng beserta sumber sejarah yang didapatkan, setidaknya benteng ini telah berubah denahnya minimal dua kali. Saat ini benteng Kalamatta dikelilingi oleh bengkel kapal di seberang sisi utaranya, di sisi selatannya oleh industri penggergajian kayu, sedang di sisi timur dibatasi oleh selat hamo yang memisahkan Ternate dan Tidore dengan Pulau Maitara di tengahnya. Kini Benteng Kalamatta menghadapi ancaman serius akibat abrasi pantai yang terus mengikis benteng, meninggalkan lubang pada dasar lantai sebelah timur.



Bagian Dalam Benteng Kalamatta
(foto oleh penulis)

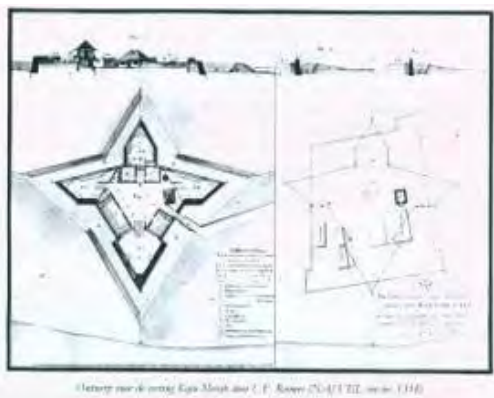
Lantai Luar Sisi Timur
Benteng Kalamatta Yang
Terkena Abrasi
(foto oleh MATAHATI)

Benteng yang mungkin dibangun oleh Belanda pada tahun 1609 dalam sumber sejarah disebut dengan nama Kalamatta. Benteng ini pada tahun 1890 telah rusak dan tersisa reruntuhan kecilnya saja (Clercq, 1890). Benteng Kalamatta juga disebut Kajoe Merah. Benteng

ini dibangun untuk menutup jalan masuk Spanyol ke pantai timur, dan terletak di pantai berhadapan dengan Pulau Tidore. Tahun 1625 benteng ini telah dirombak oleh Geen Huigen Schapenham yang kembali berlayar dari Belanda ke Ternate dengan armada Nassausche. Penambahan ini terjadi hingga 1627 ketika Ternate berada di bawah pemerintahan Gubernur Maluku ke-6, Gillis van Zeyst. Setelahnya, Belanda menelantarkan benteng ini, dan kemudian dikuasai oleh Spanyol yang menggunakan benteng Kalamatta sebagai pos perdagangan, juga sebagai pusat penyerangan terhadap Belanda. Tahun 1663 Spanyol meninggalkan benteng ini. Pada masa penguasaan Spanyol, benteng ini ditinggali oleh 80 tentara, yang dilengkapi dengan 12 meriam dan *pampanger* (orang-orang Filipina) (Wall,1928).



Denah Benteng
Kalamatta
Hingga Tahun 1891
(dokumentasi ANRI)



Denah Benteng Kalamatta Setelah Tahun 1891
(dokumentasi ANRI)

e. Benteng Tolluko

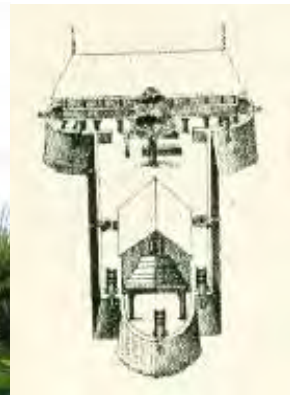
Benteng yang berada pada titik koordinat N 00° 48' 83,3" S 127° 23' 29,1" ini disebut juga dengan benteng Hollandia dan memiliki 9 *embrasure* (dudukan senjata atau lubang bidik). Benteng ini terletak di dataran tinggi 20 meter dpl, tepatnya di kampung Sangadji dan berada di pinggir jalan yang menghubungkan terminal Kota Ternate menuju terminal Dufa-dufa dengan pemandangan laut Ternate. Menurut buku *Discours van den seer vermaerden Apoloni Schot, ghebooren tot Middleburch in Zeelant, aangaende de Molucques*, benteng ini didirikan pada tahun 1610, oleh Belanda di bawah perintah Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal pertama kompeni di Maluku, karena khawatir apabila Spanyol menetap di sini akan membahayakan pangkalan laut Ternate. Benteng ketiga Belanda (Muskens dan Cornelissen, 1974) yang dibangun dengan bahan baku batu andesit serta batu karang dengan perekat kapur ini, terletak pada daya jangkauan pandangan yang memungkinkan untuk mengawasi kedatangan Spanyol dari sisi utara pulau.

Benteng ini tercatat pernah direstorasi pada tahun 1612. Ketika itu di dalamnya dihuni 15 hingga 20 tentara yang dilengkapi dengan persenjataan dan amunisi. Fungsi benteng ini selain sebagai bangunan pertahanan juga digunakan sebagai markas tentara untuk memaksa para penduduk yang melarikan diri dari kampung-kampung di pesisir di sekitarnya ke Kampung Melayu. Bentuk benteng ini berbeda dengan bentuk benteng-benteng lainnya, namun karena dari berita di tahun 1610 dan 1627 tidak didapatkan cerita tentang bentuk

benteng ini maka tidak dapat diketahui secara pasti apa yang menyebabkan keanehan bentuk tersebut.



Benteng Tolukko Tampak Dari Pintu Masuk
(foto oleh penulis)



Denah Benteng Tolukko
(dokumentasi ANRI)

Di tahun 1661 Penguasa Tinggi Hindia Belanda di Ternate memberikan ijin kepada Sultan Mandarsyah untuk tinggal dalam benteng ini. Dengan sultan tinggal di dalam benteng, maka garnisun Ternate berkurang hingga tinggal 160 orang (Wall, 1928). Apakah nama benteng ini mengikuti nama penguasa Ternate ke-10, yaitu Kaitjil Tolukko?. Di benteng ini pernah berlangsung pertempuran antara pasukan Ternate yang dibantu Belanda berhadapan dengan Kaicil Nuku, Sultan Tidore ke-19 pada 16 April 1799.

Benteng ini memainkan peranan ketika terjadi penyerpahan oleh Inggris di tahun 1801. Dengan diper-senjatai 8 meriam dan 90 tentara di bawah perintah Letnan Walter, 21 orang di bawah pimpinan Letnan Huizinga dan 30 orang Ternate di bawah pimpinannya masing-masing, pasukan ini mampu menghalau Inggris

dengan mudah. Pada tahun 1864 benteng ini dipugar kembali oleh Residen P. van der Crab. Dari data yang didapatkan, pemugaran tersebut telah meninggikan benteng setinggi 70 cm. Benteng yang berdiri di atas bukit batuan beku terletak pada 620 cm dpl, letaknya menjorok ke laut. Bukit batuan beku tempat berdirinya benteng ini membujur memanjang ke arah barat laut – tenggara. Keletakan benteng nampaknya disesuaikan dengan poros bukit. Denahnya yang tidak lazim, kemungkinan bahwa benteng ini disesuaikan dengan kondisi bentuk bukit yang ada. Bentuknya yang unik ini menjadi ciri khas benteng Tolukko dan mengundang interpretasi tersendiri, di antaranya dikaitkan dengan bentuk cengkeh terbalik. Tafsiran lain menyatakan bentuk ini sebagai bentuk palus. Namun, tidak diketahui pasti kebenaran kedua tafsiran tersebut.

f. Benteng Willemstad

Benteng ini berada di sebelah barat laut pulau, tepatnya pada titik koordinat N 000 50' 75,1" S 1270 18' 85,0" di Kelurahan Tacomi (Takome). Benteng yang terletak di pinggir sungai tua yang kini telah mengering berada pada ketinggian 30 meter dpl di tengah kebun masyarakat pada jarak 150 meter dari pantai. Takome yang merupakan pemukiman penduduk berbentuk empat persegi plaats versterkte (tempat atau daerah yang diperkuat), pada 1 April 1606 pernah menjadi persinggahan Sultan Said Barakati yang akan menyeberang ke Jailolo. Benteng pertahanan (redoute) ini merupakan benteng Belanda kedua setelah Oranje (Muskens dan Cornelissen, 1974) didirikan di bawah

perintah wakil Admiral Simon Jansz Hoen yang berlayar dari Makian ke Takome bersama 6 kapal pada tahun 1609, namun tidak dapat dipastikan tepatnya pendirian benteng ini. Hanya disebutkan bahwa Simon Jansz merekrut 100 (seratus) orang untuk membangun benteng-benteng baru termasuk Willemstad.



Lokasi Runtuhan Benteng di Atas Perbukitan Kecil dan Singkapan Struktur Tembok Benteng Willemstad (foto oleh penulis)

Benteng ini terletak di daerah ketinggian, di jalan yang rapi dan sangat cocok sebagai tempat pengumpulan cengkeh, sehingga awalnya benteng ini berperan dalam menunjang perdagangan cengkeh. Disebutkan bahwa benteng ini ditempati pada 4 November 1609 (Abdulrahman, et al., 2001). Pulau Ternate yang dibagi 2 wilayah setelah 1607 pada barat laut pulaunya dibatasi oleh benteng Belanda ini yang berfungsi melindungi Ternate Utara dari serangan Spanyol. Garnisun pertama yang menempati benteng ini dipimpin oleh Kapten Adrian Claessens yang semula bertugas di benteng Malayo (Oranje) dengan dibantu seorang letnan. Pada 1610 pasukan di benteng ini dipimpin oleh Kapten Adrian Coen yang membawahi 96 tentara Belanda, sedangkan

Takome sendiri saat itu berpenduduk 100 jiwa orang Ternate yang pernah bermukim di Halmahera.

Pada tahun 1633, benteng ini juga ditempati dan dikelola oleh 18 orang pedagang pada masa kepemimpinan Johan Ottens sebagai Gubernur Jenderal yang ke-8 di Maluku, yang menyandang gelar Dewan Luar Biasa Hindia (Clercq, 1890). Namun seiring dengan semakin berkurangnya panen cengkeh, maka benteng ini juga semakin tidak terpelihara sehingga tentara sejumlah 18 orang itu pun disarankan untuk dikurangi. Oleh penguasa pengganti setelahnya, yaitu ketika Casper van den Boogarde berkuasa (1648 - 1653) di tahun 1651 menarik mundur pendudukan pasukan dari benteng ini, sehingga benteng tersebut menjadi terlantar dan tidak berguna. Benteng yang terletak di Kelurahan Takome saat ini kondisinya berada dalam keadaan tertimbun lapisan tanah. Hanya sebagian, yaitu bagian sudut yang diperkirakan merupakan sudut belakang bangunan beserta reruntuhan batuanya yang berperekat kalero di tebing yang masih dapat disaksikan sebagai bukti tentang keberadaan benda bersejarah.

Keberadaan benteng ini dapat dilihat pada peta kuna *Carte Particuliere Des Isles Moluques* tahun 1764 dengan nama Fort Willemstal. Pada tahun 1928 hanya tersisa tanggul-tanggul pertahanan dari batu di dataran tinggi di ujung sebuah gereja, sedangkan pondasi-pondasinya telah runtuh (Wall, 1928). Begitu pula struktur tembok di salah satu bagiannya yang beberapa di antaranya telah mengalami keruntuhan, juga dalam kondisi tertimbun tanah. Salah satu bagian yang masih tampak merupakan hasil aktivitas masyarakat yang dengan sengaja

menyingkapkan tanah, yang menurut kepala desa setempat adalah untuk dapat disaksikan sebagai bukti. Bahan baku penyusun benteng ini adalah batu andesit, selain digunakan batu bata dari tanah liat yang disusun bersama batuan padat. Perekat antar materialnya adalah batu karang yang dibakar. Benteng yang terletak di atas perbukitan kecil dengan ketinggian kurang lebih 20 meter dari tanah sekitar, setidaknya memiliki fungsi strategis ketika dimanfaatkan sebagai benteng pengintaian bagi armada kapal yang datang dari arah utara Ternate. Begitu pula dengan peran benteng sebagai pos penjagaan bagi penyeberangan ke Jailolo (Iriyanto dan Radjab, 2005).

g. Benteng Santosa



Benteng Santosa Sebelum Terjadi Perubahan
(dokumentasi oleh van Fraassen 1987)

Benteng kecil berbentuk segi empat yang terletak di ketinggian 25 meter dpl ini berada pada koordinat N 00° 48' 04,9" S 127° 23' 03,3" terletak di sisi utara bagian belakang Keraton Ternate. Saat ini benteng yang juga

dikenal sebagai benteng Kota Naka telah mengalami penambahan struktur tembok dengan tinggi 1,5 meter. Begitu pun dengan bangunan di dalamnya, kini berupa rumah kecil dengan arsitektur masa kini Dinding tembok bagian depan telah berubah menjadi hiasan dinding mirip dinding kolam taman modern.



Dinding Depan Benteng Santosa Saat Ini (foto oleh penulis)

Benteng ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad XVIII, dengan dua tujuan, yaitu untuk memelihara hubungan dengan pihak kesultanan sekaligus sebagai tempat mengawasi yang seksama, baik terhadap masyarakat pribumi maupun dengan orang-orang asing lainnya (Wall, 1928). Di sisi utara benteng terdapat sungai kecil, lebih tepat dikatakan sebagai parit yang dalam bahasa Ternate disebut *barangka*, mengalir menuju kolam mata air Santosa di depan kesultanan.

Untuk mendukung fungsi benteng sebagai tempat pertahanan, benteng Santosa dilengkapi dengan 3 *embrasure* (dudukan senjata atau lubang bidik) setidaknya yang kini masih dapat disaksikan di sisi utara.

Struktur bahan baku tembok benteng terdiri dari batu andesit yang direkatkan dengan kapur (*kalero*). Menurut masyarakat sekitar, penamaan Kota Naka berkaitan dengan aroma buah nangka atau “naka” yang dapat tercium dari kejauhan. Hal ini sesuai dengan fungsi benteng ini, yaitu untuk mengawasi gerak-gerik sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan selain untuk benteng pertahanan Belanda. Biasanya, berita tentang kondisi kerajaan dari benteng ini lebih lebih cepat menyebar di masyarakat dibanding dari sumber lain, sehingga diibaratkan seperti bau buah nangka yang segera tersebar dan tercium dari jauh.

2. Pengelolaan Benteng-benteng Eropa Pulau Ternate

Dalam upaya pengelolaan sumberdaya budaya benteng-benteng colonial Eropa di Pulau Ternate, maka analisis terhadap nilai penting seperti yang diisyaratkan UU BCB merupakan tahap yang penting. Analisis merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengelolaan sumberdaya budaya (Tanudirjo, 2004). Tahap ini berkaitan dengan signifikansi, sehingga akan dapat diketahui bagaimana pengelolaan pada masing-masing benteng. Jika mengacu pada pasal 1 UU BCB, maka yang menjadi tolak ukur penentuan nilai penting adalah sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kriteria tersebut masih bersifat umum, sehingga dalam penerapan di lapangan diperlukan rumusan model lainnya dalam penentuan nilai penting. Kondisi sumberdaya budaya benteng di Pulau Ternate yang beragam membutuhkan penentuan nilai penting yang sesuai dengan kondisi masing-masing bentengnya.

a. Nilai Penting Sejarah

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan benteng-benteng kolonial di Pulau Ternate terkait erat dengan peristiwa sejarah lokal, regional bahkan secara global di masa lalu, terutama di awal abad ke-15 hingga 19 saat berkembangnya perdagangan komoditi rempah-rempah dunia. Nilai tersebut sangat terkait dengan “kemampuan” benteng-benteng kolonial Eropa dalam mendokumentasikan fenomena yang terjadi di masa lalu terutama pada saat difungsikannya benteng. Perbedaan fungsi benteng sebagai markas besar (yang dalam pembahasaan masyarakat disebut dengan “kota”) pada Benteng Kastela dan Oranje, maupun benteng lainnya yang berfungsi sebagai pos pertahanan merupakan fenomena tersendiri dalam proses kesejarahannya. Hal ini terkait dengan kandungan peristiwa penting beserta fase-fase sejarah di masa lalu yang mendasari signifikansi dalam penentuan nilai pentingnya.

b. Nilai Penting Pengetahuan

Keberadaan benteng-benteng kolonial Eropa di Pulau Ternate, kini masuk dalam wilayah administratif Kota Ternate, memiliki beragam kandungan informasi yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Secara umum nilai penting ilmu pengetahuan tersebut mengandung, potensi untuk diteliti lebih lanjut untuk menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan secara umum; informasi yang dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu, proses perubahan budaya serta proses adaptasi manusia terhadap lingkungannya; informasi yang dapat menjelaskan tindakan manusia dan

interaksi manusia dengan manusia lainnya; informasi yang dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan pengembangan metoda, teknik dan teori dalam berbagai bidang ilmu (Tanudirjo, *ibid*). Berdasar hal tersebut di atas, sumberdaya budaya benteng mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan karena merupakan data atau informasi yang (dapat) menghasilkan pengetahuan baru untuk menjawab masalah penting dalam bidang ilmu tertentu.

Beragam ilmu pengetahuan yang menyertai keberadaan benteng baik dari ilmu eksakta maupun ilmu sosial humaniora, mengindikasikan bahwa sumberdaya budaya benteng kolonial Eropa bukanlah masalah yang sepele. Diperlukan integritas lintas ilmu yang menyertainya jika pengelolaan terhadapnya akan dilakukan, meskipun nilai penting ilmu pengetahuan ini sangat tergantung pada kualitas, keterwakilan, dan keunikan atau kelangkaan sumberdaya benteng yang ada (Tanudirjo, *ibid*).

Begitu pula dengan aspek informasi teknologi yang terkandung pada masing-masing benteng dengan beragam kategori baik yang berupa markas besar maupun yang berupa pos pertahanan. Terutama yang didapatkan adalah informasi teknologi pembuatan benteng termasuk latar belakang lingkungan ditempatkannya, beragam bentuk beserta elemen benteng yang terkait dengan teknologi pertahanan dan persenjataan militernya. Penempatan sebagian besar benteng pada lokasi pantai-pantai tertentu juga terkait dengan teknologi pelayaran pada masa itu yang terdukung oleh pola angin dan arus laut di sekitar benteng.

c. Nilai Penting Kebudayaan

Sumberdaya budaya benteng merupakan produk kebudayaan sebagai hasil daya cipta manusia masa lalu. Oleh karena itu nilai penting kebudayaan pada benteng kolonial Eropa di Pulau Ternate dapat dikaitkan dengan pencapaian budaya yang mendorong proses penciptaan budaya baru. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa keberadaannya merupakan akibat pertentangan dan rivalitas antar kelompok, maka dapat dijadikan refleksi kebangsaan kini dalam konteks “penjatidirian” ke-Indonesia-an secara bersama.

Nilai penting kebudayaan sumberdaya budaya benteng mencakup nilai etnik dan estetik dan dalam hal ini ditekankan pada nilai sosial atau nilai publik yang terkandung di dalamnya. Dikatakan bernilai etnik jika memuat pemahaman latar belakang kehidupan sosial suatu bangsa atau komunitas tertentu. Bernilai estetik jika sumberdaya budaya mempunyai kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara maupun bentuk-bentuk kesenian lain. Begitu pula keselarasan antara benteng alam dan sumberdaya budaya yang disebut saujana budaya, dan menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya budaya di masa kini dan mendatang (Tanudirjo, *ibid*). Adapun nilai publik yang terkandung pada sumberdaya benteng di pulau ini mencakup kepada pemanfaatannya di masa kini dan mendatang. Pemanfaatan yang paling utama adalah bagi pemenuhan kebutuhan akan pendidikan sebagai landasan masyarakat dalam kesadaran ideologis berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pendidikan

yang dimaksud adalah bagaimana upaya untuk dapat memaknai ulang sumberdaya budaya benteng sebagai bukti konkrit bagi masyarakat dalam mengenal serta merevitalisasi identitas sosial kulturalnya. Benteng-benteng kolonial di pulau ini pun dapat dimanfaatkan secara praktis bagi kepentingan pariwisata yang dalam penerapannya tergantung kepada *political will* yang baik dari pemerintah terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sumberdaya budaya benteng.

Kondisi yang memprihatinkan di hampir semua benteng di Pulau Ternate dikarenakan pula oleh berbagai faktor, terutama adalah perencanaan yang tidak dilakukan dengan baik. Diawali dengan proses perencanaan pemugaran yang *tricke down*, pelaksanaan pemugaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi cagar budaya, hingga pemanfaatan bangunan yang selalu tanpa melibatkan masyarakat setempat. Begitu pula dengan tata ruang kota secara makro dan mikro yang tidak sesuai dengan keberadaan benteng, salah satunya berakibat kepada kekumuhan karena terdapat permukiman masyarakat yang menempel Benteng Oranje. Dengan tidak dilaksanakannya penataan ruang kawasan bersejarah, telah berdampak pada semakin “menghilangnya” sebagian tembok pondasi Benteng Kastela dan Willemstad karena terdesak oleh peruntukan tempat tinggal beserta lahan pertanian masyarakat.

Upaya pelestarian sumberdaya budaya, terutama benteng-benteng kolonial Eropa di pulau ini sebenarnya telah tegas tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 462/KEP.B-11/MU/2002 Tentang Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Benda Cagar

Budaya Yang Tersebar Di Wilayah Propinsi Maluku Utara. Terlebih Ternate sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara memiliki visi kota yang hendak “Menjadikan Ternate Sebagai Kota Budaya Menuju Masyarakat Madani”, mengindikasikan keinginan pemerintah untuk menjadikan Ternate sebagai wadah bagi keberagaman budaya yang ada di kota pulau ini. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana cita-cita bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban. Peradaban dalam konteks masyarakat Ternate bermakna sifat masyarakat yang berkaitan dengan kepercayaan, manifestasi kehidupan beragama dan penghargaan kepada keberadaan bangunan peninggalan bersejarah serta tempat-tempat ibadah yang kini masih ada (Deni, 2004).

Sementara misi kota ini adalah membangun Ternate menjadi kota budaya, kota perdagangan dan pariwisata, serta kota pantai. Penghargaan terhadap bangunan-bangunan bersejarah di Kota Ternate telah menemukan dasar pikir yang semakin jelas, baik dari aspek ideologis visi kota beserta landasan hukum bagi perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya untuk pengembangan dan pemanfaatan sebagai aset sumberdaya budaya. Untuk itu diperlukan profesionalisme dalam menjaga kelestarian benteng yang merupakan bagian dari sejarah perkembangan Kota Ternate, sekaligus mengorganisir pengelolaan benteng yang sesuai termasuk upaya pencegahan terhadap ancaman yang berakibat pada musnahnya benteng kolonial.

Mengingat bahwa kini museum sebagai media pendidikan belum tersajikan dengan baik karena masih menggunakan keraton sebagai tempatnya, maka menjadikan

salah satu ruangan di dalam benteng Oranje sebagai wadah museum dapat dijadikan kerja mendatang dalam pemanfaatan sumberdaya budaya benteng. Pemanfaatan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan benteng-benteng kolonial yang ada sebagai media budaya masyarakat dalam mengekspresikan aktivitas kebudayaannya. Namun apa pun bentuk pemanfaatan tersebut, tetap saja bertujuan kepada lestariannya sumberdaya budaya benteng, sehingga kebijakan yang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate perlu mempertimbangkan keberadaan sumberdaya budaya benteng sebagai potensi wilayah.

B. Penutup

Benteng-benteng kolonial Eropa di Pulau Ternate merupakan bukti proses kesejarahan yang pernah terjadi di dunia. Keberadaannya adalah fakta yang tak terbantahkan, sehingga peraturan perundangan Republik ini mencantumkan nilai-nilai penting di dalamnya sebagai landas pikir dalam pelestarian dan pemanfaatannya. Perkembangan fisik Kota Ternate yang semakin hari semakin tak terkendali, dikhawatirkan dapat menghilangkan sumberdaya budaya benteng. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian sumberdaya budaya benteng-benteng kolonial Eropa pada dasarnya diarahkan untuk tercapainya tujuan dari pengelolaan kawasan pulau secara integral. Hal ini tentu terkait, sekali lagi, dengan politik pemerintahan dalam politik pencitraan yang berkarakter khas dan unik melalui elemen-elemen fisik kota yang ada, di mana benteng-benteng tersebut ada.

Dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan benteng-benteng kolonial Eropa di Pulau Ternate bagi peningkatan kesejahteraan bersama masyarakat, menyitir ungkapan Sultan Ternate di abad ke-15 Zainal Abidin dalam novel Romo Mangun “Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa”, bahwa setidaknya “.. Ternate dapat berperan dalam hal-hal yang lebih mendekati hakikat kemanusiaan. Membangun kebudayaan jiwa mulia, dengan sikap peka terhadap adil dan ketidakadilan, keserakahan dan tanggung jawab, pengecut dan gerak bijaksana..”

Catatan :

1. Munculnya Ternate sebagai bandar yang ramai berkaitan erat dengan interaksi di mana orang-orang Cina telah mengadakan hubungan perdagangan langsung dengan Maluku. Sumber sejarah dari catatan Wang Ta-Yuan di tahun 1349 menyebutkan hubungan perdagangan langsung tersebut hanya terwujud hingga pertengahan abad ke-14. Sejak para pedagang Cina tidak muncul lagi di Maluku pada paruh kedua abad ke-14, peranan mereka digantikan oleh orang Jawa, Sumatra, Makassar dan Filipina. Majapahit menjadi bagian penting dari perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Mpu Prapanca dalam *Negarakertagama* (1365) mencatat adanya Maloko, yang dapat diartikan sebagai empat pusat kekuasaan di Maluku Utara, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo (R.Z.Leirissa,2001).
2. Kastil memiliki fungsi yang lebih kompleks dari pada benteng, karena kastel merupakan benteng yang menjadi pusat pemerintahan. Atau dengan kata lain bahwa kastil merupakan benteng di mana terdapat kedudukan

penguasa. Dalam Kamus Inggris Indonesia seperti pada catatan kaki nomor 3 menyebutkan, *castle* berarti juga benteng, kastil atau istana. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia seperti dalam catatan kaki nomor 4 yang juga menyebutkan bahwa *kasteel* adalah juga benteng atau kastil yang sekaligus tempat berlandung.

KEPUSTAKAAN

- Abbas, Novida. 2001. Dutch Forts of Java A Locational Study, *Thesis MA on Southeast Asian Studies Programme*, National University of Singapore. *Unpublished*.
- Abdulrahman, M. Jusuf, et.al.. 2001. *Ternate, Bandar Jalar Sutura*. Ternate : Penerbit Lintas.
- Abdurachman, Paramita R. 2008. *Bunga Angin Portugis Di Nusantara , Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis Di Indonesia*. Jakarta : LIPI dan YOI.
- Atjo, Rusli Andi. 2008. *Peninggalan Sejarah Di Pulau Ternate*, cet. I. Jakarta : Cikoro Printing.
- Calne, Donald B. 2005. *Batas Nalar, Rasionalitas dan Perilaku Manusia*, terjemahan Parakitri T. Simbolon, cet. II. Jakarta : KPG.
- Clercq, Frederik Sigismund Alexander de. 1890. *Ternate : Karesidenan Dan Kesultanan*, terjemahan Noer Fitriyani tahun 2007. Ternate : Komunitas Uma Sania.

- Deni, Aji. 2004. Ternate Dalam Konteks Masyarakat Madani dan Civil Society, dalam *Membangun Ternate Menuju Kota Peradaban*. Ternate : UMMU Press & PSPK.
- Effendy, Muslimin A.R. 2005. *Jaringan Perdagangan Makassar Abad XVI-XVII*. Wonogiri : Citra Pustaka.
- Muskens Pr., M.P.M. dan Fr. Cornelissen SVD. 1974 *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Jilid 1*. Jakarta : Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia.
- Iriyanto, Nurachman dan Umar Hi. Radjab. 2005. "Deskripsi Benda-benda Cagar Budaya Di Kota Ternate, Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Sumberdaya Arkeologi", *Laporan Penelitian*. Ternate : Universitas Khairun (tidak diterbitkan).
- Jacobs, Hubert, (ed.). 1974. *Documenta Malucensia I (1542-1572)*. Roma : Institutum Historicum Societas IESU.
- Klerck, E.S. De. 1938. *History of the Netherlands East Indies*, vol. I. Rotterdam : W.L. & J. Brusse
- Leirissa, R.Z. 2001. "Jalur Sutera: Integrasi Laut-Darat dan Ternate Sebagai Bandar Di Jalur Sutera", dalam Ade Kamaludin (eds.) *Ternate Bandar Jalur Sutera*. Ternate : Penerbit Lintas.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa : Silang Budaya, Jilid 2, Jaringan Asia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lopez, Antonio. 1992. *Spanyol dan Maluku, Galleon-galleon Mengelilingi Dunia*. Jakarta : Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di Jakarta.

- Reid, Anthony. 1999. *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 - 1680, jilid II*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Schilder, Günter, et. al. 2006. *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company*. Utrecht : Faculty of Geosciences Utrecht University.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus – 1 September 2004.
- Wall, V.I. Van De. 1928. *De Nederlandsche Oudheden In De Molukken*, 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff.
- * Disarikan dari tesis S2 penulis di Program Studi Arkeologi Universitas Gadjah Mada tahun 2010 dengan judul "BENTENG-BENTENG KOLONIAL EROPA DI PULAU TERNATE, Dalam Peta Pelayaran dan Perdagangan Maluku Utara."
- ** Staf Pengajar Jurusan Sejarah di Universitas Khairun Ternate.

PENILAIAN SKALA PRIORITAS DAN REVITALISASI KAWASAN BENTENG KOLONIAL DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

oleh:

Wuri Handoko¹

wurhand@yahoo.co.id

A. Latar Belakang

Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) mencatat hanya lima persen dari 257 benteng peninggalan masa kolonial di Indonesia, yang masih dalam kondisi utuh. Mayoritas kondisi benteng-benteng tersebut tinggal sisa dan reruntuhannya saja. Kerusakan benteng-benteng peninggalan masa kolonial lebih banyak disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat di sekitarnya. Indonesia bisa belajar dari India yang mampu merestorasi serta mengkonservasi benteng masa kolonial untuk kemudian dimanfaatkan secara ekonomis. Untuk sementara tim peneliti

1 Balai Arkeologi Ambon

yang terdiri dari Passchier Architects and Consultants (PAC), Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia (PDA), serta Ditjen Sejarah Dan Purbakala Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, merekomendasikan formulasi kebijakan untuk pelestarian dan pengembangan benteng sebagai benda cagar budaya yang dilindungi; pelestarian fisik (pemugaran, konservasi, revitalisasi); dan pemanfaatan benteng. (www.bentengindonesia.org).

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan energi untuk bisa melakukan hal itu? Lantas, bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu untuk tampil dan dapat dilihat kembali secara utuh, jika sosok dan bahan bakunya sendiri sesungguhnya sebagian besar telah musnah. Pertanyaan terakhir yang terpenting, adalah seberapa besar manfaat yang dapat dipetik dari program restorasi dan konservasi itu sendiri, sebab tentu kita juga harus berhitung, seberapa besar *cost* yang kita harus keluarkan dengan hasil yang akan tercapai.

Pertanyaan tersebut sesungguhnya berdasar pada kondisi riil di lapangan, tempat benteng-benteng kolonial itu berada. Pengalaman penulis mendampingi tim surveyor dari PDA, dapat dengan langsung melihat kondisi riil di lapangan benteng-benteng kolonial khususnya di wilayah Propinsi Maluku. Kondisi riil yang dimaksud adalah kondisi saat ini baik fisik maupun sosial dengan lingkungan sekitar benteng. Sesungguhnya penulis ingin katakan, kita perlu memilih dan memilah dengan cermat, mempertimbangkan dengan bijak manfaat dan kerugiannya, merencanakan dengan matang, serta menerapkan konsep pengelolaan dengan tepat. Sebagai contoh, hampir tidak mungkin kita melakukan restorasi,

atau rehabilitasi atau revitalisasi, pada kondisi benteng yang hampir-hampir tidak berbekas lagi, menyisakan puing-puing berserak di tengah-tengah kepungan pemukiman permanen milik warga. Sementara kita tidak semestinya membiarkan begitu saja benteng kolonial, hanya karena masih tampak utuh. Sebaliknya jangan merehabilitasi benteng kolonial, jika justru merusak keaslian dan menciderai nilai kesejarahannya.

Di Wilayah Kepulauan Maluku sendiri, hasil pendataan PDA menyebutkan jumlah Benteng dan bangunan kolonial lainnya di Propinsi Maluku sejumlah 67 buah dan di Maluku Utara tercatat sebanyak 49 buah benteng belum termasuk pertahanan yang biasanya dalam bentuk pilbox yang tersebar di sepanjang pantai dan gunung. Dari sekian banyak benteng yang terdata, baru sebagian kecil saja, yang terdaftar sebagai Benda Cagar Budaya (BCB). Artinya, dari sekian banyak benteng kolonial yang terdata, hanya sebagian kecil saja yang sudah dikelola. Masalah pengelolaannyapun juga masih belum tuntas dibicarakan dan diperdebatkan yang karena berbagai kepentingan belum diperoleh titik temu.

Makalah singkat ini berupaya menawarkan gagasan konseptual bagaimana mengelola benteng-benteng kolonial di wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara, di tengah menyeruaknya banyak masalah lain yang mengikut dalam pengelolaan benteng yang tengah berlangsung saat ini. Mula-mula, perlu dilakukan pengidentifikasian kawasan yang banyak memuat bangunan kolonial baik dalam kategori kawasan utama yang paling prioritas, maupun kawasan lain. Kawasan tersebut berupa kota maupun pedesaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam skala prioritas revitalisasi bangunan kolonial dalam skala kawasan yang

lebih luas, antara lain berkaitan dengan pengembangan rencana tata ruang wilayah dan kota.

B. Penilaian Kawasan Benteng Kolonial dan Skala Prioritas Program Revitalisasi



Gerbang Utama Benteng Victoria di Jantung Kota Ambon.

Sumber : PDA dan Balai Arkeologi Ambon (2007)

Keberadaan suatu bangunan kuno bersejarah mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Budihardjo (1989) mengatakan bahwa terdapat beberapa arti penting dari keberadaan suatu bangunan kuno bersejarah antara lain secara ekonomis. Bangunan kuno bersejarah

merupakan salah satu daya tarik wisata. Dari aspek sosial budaya terpeliharanya bangunan kuno akan menumbuhkan ikatan yang erat antara masa kini dan masa lampau, menciptakan kebanggaan serta harga diri sebagai bangsa. Menurut aspek fisik keberadaan bangunan kuno bersejarah akan memperkaya wajah lingkungan, dan menciptakan identitas kota yang khas, unik dan berkarakter. Kawasan bersejarah (cagar budaya) yang tidak tertata dengan baik dikhawatirkan nantinya akan semakin buruk kondisinya apabila tidak dilakukan penangangan yang serius. Kondisi demikian juga merupakan ancaman serius bagi kota secara tidak langsung karena dapat mempercepat penurunan kualitas fungsional, visual, dan lingkungan. Salah satu upaya perbaikan

lingkungan adalah revitalisasi kawasan. Upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan semua aspek yang terkait, baik yang sifatnya fisik, non fisik, dan para aktor pelakunya (Indrawaty, 2008).



Benteng Belgica, Ikon utama Kota Kolonial Banda Neira yang tampak masih utuh dan menjadi obyek wisata budaya di Banda Neira. **Sumber Foto:** PDA dan Balai Arkeologi Ambon (2007)

Di wilayah Kepulauan Maluku, benteng kolonial tersebar di hampir seluruh wilayah. Deretan benteng-benteng kolonial tersebut bisa mewakili adanya kawasan-kawasan yang pada masa kolonial merupakan kawasan konsentrasi pertahanan kolonial. Deretan benteng di kawasan kota menjadi penanda bahwa kawasan itu merupakan daerah strategis yang harus dikuasai dan dipertahankan oleh pihak Kolonial. Di Wilayah Maluku dapat disebut beberapa kawasan kota Kolonial, yang hingga sekarang dapat diidentifikasi spesifikasinya. Di Pulau Ambon, selain di Kota Ambon sendiri, jazirah Leihitu di bagian utara Pulau Ambon juga dapat disebut kawasan Kota kolonial. Kawasan ini ditandai oleh banyaknya benteng-benteng kolonial. Di Kota Ambon, selain Benteng New Victoria, terdapat Benteng Middlesborgh, di daerah Passo, selebihnya di dominasi oleh bunker-bunker Jepang. Sementara itu di Jazirah Leihitu, masih di Pulau Ambon hingga saat ini masih bisa disaksikan deretan

benteng-benteng Kolonial di beberapa lokasi. Di Desa Hila, terdapat Benteng Amsterdam yang masih utuh, serta deretan benteng lainnya yang berdiri pada hampir setiap negeri atau desa di Jazirah Leihitu. Di Banda Neira, bisa mewakili Kota Kolonial, yang hampir seluruh kota menggambarkan wajah kota Kolonial, oleh karena deretan benteng dan bangunan kolonial pada hampir seluruh area kota. Banda Neira, bahkan dianggap sebagai kawasan utama kota Kolonial, karena hingga sekarang berbagai bentuk arsitektur kolonial masih bertahan.

Penilaian kawasan Benteng Kolonial di Wilayah Kepulauan Maluku, dapat disejajarkan dan didasarkan oleh kondisi pencitraan kawasan Kolonial seperti yang dijelaskan oleh Dewi dan Surjono (2008) dalam memberi pencitraan kawasan kota lama Semarang, berikut ini :

- a. Jaringan jalan (*path*) adalah jaringan pergerakan berupa jalur tempat manusia akan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.
- b. Kawasan (*district*) merupakan integrasi dari berbagai kegiatan fungsional atau bentuk bangunan yang memiliki keseragaman, yang membedakan dengan kawasan lain.
- c. Batas (*edge*) merupakan suatu pengakhiran dari suatu *district*/kawasan. Batas (*edge*) kawasan Kota kolonial yang dapat diidentifikasi dengan adanya deretan deretan bangunan peninggalan Belanda yang berarsitektur kolonial.
- d. *Landmark*) merupakan suatu struktur fisik yang paling menonjol di antara struktur kota atau suatu bagian wilayah kota dan akan menjadi perhatian utama dibandingkan dengan elemen fisik lainnya.

Di wilayah Maluku citra kawasan Kolonial, secara menonjol tampak sekali di kawasan Banda Neira, selain itu juga di Pulau Ambon (Kota Ambon dan Jazirah Leihitu), Haruku dan Saparua, juga dapat diamati integrasi bangunan kolonial dalam satu kawasan, batas-batas maupun landmark. Citra kawasan kolonial yang ditunjukkan oleh jaringan jalan, terutama paling tampak adalah di kawasan kota Ambon dan Banda Neira.

Penilaian terhadap kawasan benteng-benteng kolonial, mengingat kondisi perkembangan kawasan yang diakibatkan oleh gejala penurunan kualitas lingkungan maupun dinamika perkembangan sosial budaya di kawasan tersebut. Serageldin (2000) menjelaskan, gejala penurunan kualitas fisik dapat dengan mudah diamati pada kawasan kota bersejarah, karena sebagai bagian dari perjalanan sejarah (pusat kegiatan perekonomian dan sosial budaya), kawasan kota tersebut umumnya berada dalam tekanan pembangunan (Serageldin et al, 2000). Tingkat penurunan kualitas lingkungan dan fisik kawasan benteng kolonial di Kepulauan Maluku dapat menjadi pertimbangan dalam kerangka perencanaan program revitalisasi. Hal ini agar pelaksanaan program dapat berjalan seimbang antara teknispelaksanaan, hasil yang tercapai dan kondisi kekinian kawasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian kawasan benteng kolonial di wilayah Maluku akan menghasilkan pengategorian kawasan kolonial berdasarkan peringkat atau perangkian kawasan yang berdasarkan pada kondisi citra kawasan yang masih ada. Oleh karena itu masih perlu diidentifikasi lebih lanjut lagi hasil survey bangunan Kolonial di wilayah Kepulauan Maluku untuk mengidentifikasi

kategori-kategori citra kawasan kolonial, mengingat kondisi saat ini yang sebagian besar tidak utuh lagi. Mansyur (2008) merangkum hasil survey bangunan kolonial di wilayah Propinsi Maluku dalam kategori *masih utuh*, *hampir musnah* dan *musnah* (selengkapnya lihat Mansyur, 2008:597-601).



Gambar Blokkhuis Leiden, kondisi tahun 1650.

Sumber: PDA (2007)



Kondisi kekinian Blokhuis Leiden saat ini, yang tinggal menyisakan puing-puing bekas pondasi benteng.

Gambar diambil tahun 2007.

Sumber : PDA dan Balai Arkeologi Ambon (2007)

Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang berkualitas (*Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia* 2003). Area konservasi adalah area yang memiliki karakteristik khas pada arsitektural dan nilai sejarahnya yang berpotensi untuk dilestarikan. Karakter yang khas tersebut meliputi topografi area, perkembangan sejarah, penggunaan material untuk membangun, dan kualitas keter-

hubungan area tersebut dengan bangunan, alam, dan *open space* (Ross, 1991: 120-121 dalam Eriza 2009).

Penilaian dan penentuan kawasan benteng kolonial di beberapa wilayah kota di Propinsi Maluku dan Maluku Utara adalah suatu alat yang paling efektif digunakan untuk melindungi struktur kawasan dari pembangunan bangunan baru. Menurut Katrinka Ebbe (1999) struktur kawasan adalah pola penggunaan lahan dan jaringan jalan, keragaman langgam arsitektur, dan aktifitas kehidupan masyarakatnya. Ketiga hal inilah yang akan memberikan penduduk kota suatu *sense of place* dan identitas (Ebbe, 1999 dalam Kwanda, 2001). Dengan pertimbangan itu maka perlu dibuat urutan skala prioritas revitalisasi benteng kolonial. Selain penilaian dan pengkategorian kawasan seperti yang telah dijelaskan diatas, juga perlu dilakukan kriteria penentuan skala prioritas program revitalisasi. Beberapa kriteria untuk menentukan skala prioritas yang dapat ditawarkan dalam program revitalisasi Benteng Kolonial di wilayah Maluku sebagai berikut:

- *Kriteria kemendesakan*: dalam kriteria ini lebih difokuskan terutama pada obyek-obyek yang keberadaannya benar-benar terancam dan mengandung nilai penting yang sangat tinggi terhadap sejarah dan budaya.
- *Kriteria akar Masalah/Kebutuhan*, kriteria ini mensyaratkan pada hubungan sebab akibat sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan di sektor lainnya. Dalam pembahasan ini, kriteria ini mensyaratkan agar revitalisasi benteng kolonial bertujuan menjawab permasalahan di sekitarnya.
- *Kriteria Kepentingan Publik*, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan

publik baik secara sosial maupun ekonomi, artinya pembangunan yang dilakukan benar-benar membawa kemanfaatan bagi masyarakat terutama yang bermukim di sekitar kawasan benteng Kolonial.

- *Kriteria Ketersediaan Potensi*, potensi dan sumber daya yang ada dapat mendukung kebutuhan pembangunan, sebab bertendensi pada efisiensi. Sebagai contoh mungkin lebih prioritas merehabilitasi Benteng Kolonial yang masih tampak utuh dan lebih dekat dengan kawasan yang berkembang dibandingkan merehabilitasi benteng kolonial yang tinggal puing-puing dan di wilayah padat penduduk serta kondisi kawasan yang statis.
- *Kriteria menambah pendapatan*, dalam kriteria ini hasil pembangunannya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- *Kriteria Keberlanjutan*. Kriteria keberlanjutan (jangka panjang), artinya pendanaan yang dikeluarkan menghasilkan dampak yang berkelanjutan sehingga tidak perlu melakukan pemborosan biaya pembangunan untuk kebutuhan yang sama. (lihat juga Handoko, 2008).

C. Revitalisasi Kawasan Benteng dan Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah



Benteng Midlesborgh (Benteng Passo), terletak di Kota Ambon, saat ini berada diantara kepungan permukiman penduduk kota Ambon. Tampak penulis dan Surveyor PDA, Ivan Efendy melakukan pengamatan terhadap kondisi benteng. **Sumber Foto** : PDA dan Balai Arkeologi Ambon (2007)

Dalam Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku Bab I bagian I poin 12 menyangkut pengertian tentang Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada Bagian Ketiga menyangkut Strategi Perwujudan Pola Pemanfaatan Ruang, Paragraf 1 Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung, pasal 26 poin e disebutkan Melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan/atau segenap adat istiadat, kebiasaan dan tradisi setempat, serta unsur alam lainnya yang unik. Sementara itu dalam peraturan pemerintah republik indonesia (pp) Nomor 47 tahun 1997 (47/1997) tentang rencana tata ruang wilayah nasional, menyangkut pola pemanfaatan ruang disebutkan

bahwa Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil. Berdasarkan Raperpres dan Peraturan pemerintah itu, maka kawasan benteng Kolonial dapat dikategorikan sebagai kawasan Cagar Budaya. Di wilayah Maluku pengembangan kawasan cagar Budaya dapat dikaitkan dengan pengembangan rencana tata ruang wilayah maupun kota, mengingat kawasan benteng Kolonial terdapat di hampir seluruh wilayah Maluku yang pada umumnya terdapat di wilayah kota.



Benteng Amsterdam di Desa Hila, Kecamatan Leihitu (jazirah Leihitu) Kabupaten Maluku Tengah. Secara geografis masih berada di Pulau Ambon. Benteng ini kondisi saat ini. **Sumber Foto :** PDA dan Balai Arkeologi Ambon (2007)

Kawasan kota lama biasanya merupakan kawasan bersejarah atau *heritage district* yaitu kawasan yang banyak memiliki bangunan dengan keunikan. Kawasan kota lama dengan keunikan tersebut telah menjadi Identitas Kota atau *landmark*. Benteng dalam konteks tata ruang kota di Indonesia memegan-

gang peranan penting. Bahkan ada dugaan bahwa beberapa kota di Indonesia menjadi tumbuh dan berkembang dengan bangunan benteng sebagai sentralnya (Marihandono, 2008). Demikian pula di wilayah Maluku, Ternate, Ambon, Banda, Saparua dan lain-lain merupakan wajah kota lama yang terus berkembang sebagai kelanjutan dari embrium kota dengan citra kolonial yang sangat lekat.

Mumford (1967), mengungkapkan bahwa perkembangan kota sangat berkaitan dengan fungsi waktu, hal ini mengingatkan kita bahwa kota sekarang pembentukannya didasarkan pada masa lampau. Dengan demikian aspek historis memegang peran yang sangat penting dalam “membentuk” morfologi kota (Mumford, 1967, dalam Pawitro, 2003). Sebagai *urban artifact*, kota dalam perjalanan sejarahnya telah dan akan terus membentuk suatu pola morfologi sebagai implementasi bentuk perubahan sosial-budaya masyarakat yang membentuknya. Pola morfologi kota merupakan kesatuan organik elemen-elemen pembentuk kota, yang mencakup; elemen detail (bangunan, sistem sirkulasi, open space dan prasarana kota), aspek tata bentuk kota *town scape* (pola tata ruang, komposisi lingkungan terbangun terhadap pola bentuk di sekitar kawasan), serta aspek peraturan (totalitas rencana yang memperhatikan dinamika kawasan kota). Dalam kegiatan perencanaan kota, penekanan awal yang dilakukan lebih banyak pada aspek lingkungan fisik dan ekologis kota. Kegiatan perencanaan kota tidaklah sebatas aspek fisik tetapi memuat didalamnya aspek sosial-ekonomi dan sosial-budaya. (Pawitro, 2003).

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk jua ruang-ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang

merujuk kepada aspek sosial-budaya serta aspek lingkungan (environmental objectives). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota (Wongso, 2001).

Penataan dan Revitalisasi Kawasan menurut Departemen Kimpraswil (2002) adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau atau semrawut. Penataan dan Revitalisasi Kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi baik dari segi *setting* kawasan (bangunan dan ruang kawasan), kualitas lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosio kultural, sosio ekonomi dan sosio politik

Revitalisasi pada prinsipnya tidak sekedar menyangkut masalah konservasi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam konteks kota yang tidak berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali, atau menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang sangat pesat namun kondisinya cenderung tidak terkendali.

Hilangnya vitalitas awal dalam suatu kawasan historis budaya umumnya ditandai dengan kurang terkendalinya perkembangan dan pembangunan kawasan, sehingga mengakibatkan terjadinya kehancuran kawasan, baik secara *self destruction* maupun *creative destruction* (Danisworo, 2000).

Revitalisasi merupakan sebuah program berkelanjutan mulai tahap-tahap jangka pendek hingga jangka panjang, mulai dari ruang yang kecil hingga meluas. Revitalisasi terkait dengan upaya membangun dan menggalang kekuatan masyarakat lokal membentuk denyut kehidupan yang sehat yang mampu memberikan keuntungan sosial-budaya dan ekonomi bagi masyarakatnya. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami penurunan/degradasi baik secara fisik, ekonomi dan sosial budaya. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Revitalisasi bukan hanya berorientasi pada keindahan fisik saja tapi juga harus mampu meningkatkan stabilitas lingkungan, pertumbuhan perekonomian masyarakat, pelestarian dan pengenalan budaya (Ichwan, 2004)

Menurut Daniworo (2000) dan Martokusumo (2008), program revitalisasi setidaknya mencakup beberapa tahapan substansial yakni :

a. Intervensi fisik

Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi

penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

b. Rehabilitasi ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

c. Revitalisasi sosial / institusional

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. (Danisworo, 2000; Martokusumo; 2007).

Oleh karena itu di Wilayah Maluku, kegiatan revitalisasi kawasan benteng-benteng kolonial sebagai contoh revitalisasi kawasan Banda Neira sebagai pusat wisata warisan budaya, setidaknya harus bisa menyelesaikan dua isu (masalah)

pokok, yakni revitalisasi sumberdaya arkeologi, sekaligus pemulihan (*recovery*) sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian program revitalisasi setidaknya juga mencakup *penataan kawasan*. Penataan kawasan sangat penting dilakukan mengingat hasil survei Pusat Dokumentasi Arsitektur (2007) memperoleh data bahwa disekitar obyek Benda Cagar Budaya (BCB) terdapat fasilitas umum dan sosial baik berupa perumahan (permukiman) penduduk, perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Selain itu pada umumnya kondisi kawasan di Banda Neira meliputi dua kategori yakni, *tidak berkembang* dan *sedang berkembang*. Oleh karena itu penataan kawasan patut mempertimbangkan kondisi tersebut (Handoko, 2008). Program penting lainnya adalah *Zonasi (Pemintakatan)*. Mundarjito (2006) menjelaskan zonasi bertujuan menjaga, melindungi, memastikan dan mempertahankan suasana historis. Kondisi lingkungan sejarah pada dasarnya tersusun secara harmonis dari bangunan purbakala dan sejarah, situs dan lingkungan alam sekitar, serta gaya hidup dan sikap penduduknya (Mundarjito, 2006 :8). Penentuan batas lahan yang akan dikelola sebagai taman harus dilandasi oleh metode ilmiah yang disebut dengan pemintakatan (Zonasi). *Zoning* merupakan suatu cara atau teknik yang kuat dan fleksibel untuk mengontrol pemanfaatan lahan pada masa mendatang. Pernyataan tersebut menekankan pada pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan untuk berbagai jenis kepentingan yang diatur secara bersamaan, sementara dalam pemintakatan arkeologi tujuan utamanya adalah menentukan wilayah situs serta mengatur atau mengendalikan setiap kegiatan yang dapat dilakukan dalam wilayah yang telah ditetapkan (Callcott, 1989: 38)

Menurut Soemarwoto (1987) tujuan zoning adalah untuk menghindari konflik antar kepentingan yang terkait di dalamnya. Penentuan batas zonasi didasarkan pada batas asli situs, batas geotopografis maupun batas kelayakan pandang (*Abriter*), (Prasetya dan Hartono 1997, hal 8-9). Penentuan batas zonasi ini sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya, bab IV pasal 23 (2) yang menyebutkan bahwa: "Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan". Zonasi kawasan Benteng Kolonial BCB di Kepulauan Maluku terutama diterapkan pada tiap-tiap kawasan yang memiliki *masterpiece*, misalnya benteng Victoria di Kota Ambon, Benteng Belgica dan Nassau di Banda Neira, Benteng Horn di Pulau Haruku, Benteng Duurstede di Pulau Saparua dan sebagainya.

Kasnowiharjo (2001) menjelaskan keberadaan tinggalan arkeologi menjadi kurang berarti jika tidak ditunjang dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Pengalihan fungsi bangunan-bangunan tua menjadi bangunan fasilitas umum dapat dilakukan sepanjang tidak mengalami perubahan bentuk dan sebelumnya dilakukan studi kelayakan terhadap bangunan tersebut. Selain itu di wilayah obyek-obyek wisata budaya selayaknya dilakukan pemintakatan menjadi beberapa mintakat, yaitu mintakat inti, penyangga dan pengembang. Mintakat inti adalah tinggalan arkeologi itu sendiri yang merupakan obyek utama dari tujuan wisata, mintakat penyangga merupakan wilayah di sekeliling situs yang berfungsi untuk menekan konsentrasi arus pengunjung ke zona inti sehingga kelestarian situs tetap terjaga, serta

mintakat pengembangan merupakan lahan fasilitas yang sebagian besar arealnya digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana pengujung (Kasnowihardjo 2001: 19)

Pada umumnya pola penataan ruang, lebih mengacu pada pola penataan ruang di Eropah, yakni dengan pola pemintakatan atau *zoning* yang ketat. Dalam pelaksanaannya produk penataan ruang pola *zoning* tidak efektif, sehingga terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri No.: 30 tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan, yang diikuti dengan terbitnya: (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, dan (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Kedua peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan acuan para pihak terlibat dalam penyusunan tata ruang kota, sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang. (Sunardi, 2004).

Secara konseptual, revitalisasi merupakan usaha meningkatkan vitalitas kawasan kota melalui peningkatan kualitas lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya dan karakteristik/kekhususan kawasan. Fokus dari revitalisasi sendiri adalah upaya untuk menumbuhkan pengembangan ekonomi kawasan, sehingga upaya memberdayakan, merawat dan memperkuat karakter kawasan dapat berlangsung dengan baik. Hal ini dapat berarti menghidupkan kembali aktifitas/kegiatan yang pernah ada atau secara lebih kompleks merestrukturisasi aktifitas ekonomi kawasan (Tiesdell et al., 1996 dalam Martokusumo, 2007). Dengan demikian program revitalisasi sesungguhnya ber-

dasarkan atau menyesuaikan dengan potensi lingkungan dan sumberdaya yang ada. Potensi lingkungan menyangkut baik fisik alam dan bentanglahan, sejarah lokalitas, tradisi, makna dan citra kawasan itu sendiri.



Fort Wantrow, terletak di Pulau Manipa, pulau kecil dan terpencil namun strategis sebagai basis pertahanan kolonial di masa lampau, mengingat lokasi pulau yang terletak ditengah-tengah antara pulau Buru, Pulau Seram dan Pulau Ambon. **Sumber Foto:** PDA dan Balai Arkeologi Ambon (2007)

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik, aspek sosial/budaya serta aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang kondusif untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Rehabilitasi ekonomi yang merujuk kepada aspek sosial-budaya serta pertimbangan lingkungan (*environmental concerns*) mutlak diperlukan, karena hanya dengan melalui pemanfaatan produktif, maka terwujudlah sebuah bentuk mekanisme ‘perawatan’ dan kontrol terhadap kelangsungan fasilitas dan infrastruktur kota. Artinya peman-

faatan produktif dari aset perkotaan secara tidak langsung akan menjadi sumber daya bagi upaya pemeliharaan dari aset publik tersebut. Merujuk kepada konsep keterkaitan, konservasi/pelestarian lebih dari sekedar pekerjaan teknis seni bangunan atau seni binakota belaka, tapi menjadi upaya manusia membuat penafsiran secara kontinu terhadap karya-karya yang telah dibuatnya. Bila hal ini dikaitkan dengan kegiatan pelestarian, maka pemanfaatan bangunan tua/kawasan lama untuk mengakomodasi kebutuhan baru yang relevan -melalui alihfungsi- dapat dipahami sebagai upaya interpretasi baru terhadap artefak/warisan budaya (Martokusumo, 2007). Hal yang cukup relevan adalah perlu menyiapkan sumberdaya manusia, yakni masyarakat yang handal untuk menyambut program revitalisasi kawasan. Prasodjo (2004) mengatakan pemberdayaan masyarakat diperlukan agar tidak ada ketimpangan sehingga masyarakat mampu bersaing dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Masyarakat lokal sebagai pumukim yang bertempat tinggal di sekitar kawasan memiliki potensi sosial, budyaa, politik, maupun ekonomis yang dapat dikembangkan sehingga akan menumbuhkan ketergantungan yang saling menguntungkan antara kawasan benteng Kolonial (kawasan BCB) dan masyarakat sekitar (Prasodjo, 2004:3).

Dengan demikian, menurut penulis maka langkah pemberdayaan masyarakat yang penting dilakukan antara lain: a). menggali permasalahan di tingkat masyarakat serta merencanakan penyelesaian masalah berdasarkan kondisi dan potensi yang masyarakat miliki, hal ini dikaitkan menyangkut pengelolaan kawasan Benteng Kolonial dan dampak serta manfaatnya bagi masyarakat. b.) Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Manusia. Diutamakan dengan melakukan program peningkatan ketrampilan penduduk dalam menunjang kawasan benteng Kolonial. c). Pemberdayaan ekonomi, berdasarkan masalah dan kebutuhan serta kemampuan masyarakat serta nilai-nilai budaya setempat.

D. Kesimpulan

Wilayah kepulauan Maluku meliputi Propinsi Maluku dan Maluku Utara adalah sebuah wilayah yang sangat kaya dengan kawasan-kawasan bersejarah dengan adanya deretan benteng-benteng kolonial yang merupakan citra kolonial yang sangat lekat. Keberadaan kawasan benteng Kolonial ini adalah potensi yang sangat kaya untuk pengembangan wilayah baik dalam aspek sosial budaya maupun ekonomi. Namun kondisi kekinian menggambarkan bahwa kawasan benteng-benteng Kolonial di wilayah Maluku, keberadaannya tidak mendukung pembangunan, mengingat kondisi kawasan yang tidak tertata serta kondisi fisik benteng yang pada umumnya rusak dan tidak terpelihara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya strategis sebagai bagian dari program revitalisasi yakni :

1. Program revitalisasi berdasarkan atas penilaian dan pengkategorian kawasan untuk dipertimbangkan dalam skala prioritas program. Penilaian kawasan adalah dengan mengidentifikasi kondisi kawasan baik fisik maupun sosial budaya serta kondisi atau dinamika kawasan sekitar. Penilaian dan pengkategorian kawasan akan menghasilkan perangkungan atau daftar urutan prioritas kawasan

mana yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan program revitalisasi. Penilaian dan pengategorian kawasan juga didasarkan oleh kondisi pencitraan kawasan kolonial yang masih dapat diidentifikasi baik jaringan jalan, batas-batas dan integrasi kawasan maupun *landmark*. Selanjutnya program revitalisasi juga dilakukan efektif dan efisien mungkin, oleh karena itu perlu dibuat urutan skala prioritas dengan kriteria-kriteria tertentu.

2. Program revitalisasi kawasan benteng kolonial disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan kota, sehingga keberadaan kawasan benteng kolonial merupakan kawasan cagar budaya yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah. Keberadaan kawasan benteng Kolonial yang umumnya berada dalam kawasan kota, sehingga proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota, serta mencakup pula pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan benteng kolonial.

KEPUSTAKAAN

- Budiharjo, Eko (1989), *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gajah Mada, University, Press, Yogyakarta
- Danisworo, Muhammad dan Martokusumo, Widjaya 2000. *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam*

Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota, www.urdi.org (urban and regional development institute, 2000).

Dewi, Parawaty dan Surjono, Antariksa 2008 *Pelestarian Kawasan Eks Pusat Kota Kolonial Lama Semarang*. *Arsitektur e-Journal*, Volume 1 Nomor 3, November 2008

Eriza Faizal, 2009 *Arahan Konsep Perancangan Kawasan Konservasi Benteng Marlborough Kota Bengkulu*. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas teknik Universitas diponegoro. Semarang

Handoko, Wuri 2008 *Revitalisasi Banda Neira Pasca Konflik*. Kumpulan Makalah. Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) XI. Jakarta. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.

Ichwan, Matari Rido 2004 *Penataan dan Revitalisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Dukung Kawasan Perkotaan*. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Indrawaty, Yanthi Lydia 2008 *Peranserta Stakeholder Dalam Revitalisasi Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta*. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang

Kasnowiharjo, H Gunadi, 2001, *Manajemen Sumberdaya Arkeologi*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanudin, Makasar

Kimpraswil, 2002. *Pedoman Umum Program Penataan dan Revitalisasi Kawasan*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Jakarta.

Kwanda, Timoticin 2004 *Potensi Dan Masalah Kota Bawah Surabaya Sebagai Kawasan Pusaka Budaya*. The 1st

- International Urban Conference, August 23rd-25th, 2004. Surabaya.
- Mansyur, Syahrudin 2008 *Inventarisasi dan Identifikasi Benteng Kolonial di Propinsi Maluku*. Kumpulan Makalah. Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) XI. Jakarta. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Marihandono, Djoko 2008 *Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota*. Wacana. Vol. 10 No. 1, April 2008
- Martokusumo, Ir. 2007 *Mendaur Ulang Kota Tambang Sawahlunto. Beberapa Catatan tentang pendekatan Konservasi dalam Revitalisasi*. Program Magister Rancang Kota (RK) Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Bandung Institut Teknologi Bandung
- Mundarjito, 2006 *Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Candi Borobudur: Pendekatan Integratif dan Partisipatif*. Badan pengembangan Sumberdaya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta
- Museum Nasional dan Benteng di Indonesia, 2009 dikases dari www.benteng indonesia.org
- Pawitro, Udjiyanto 2003 *Mengenal Arsitektur Jalan Sebagai Bagian Arsitektur Kawasan Kota (Telaah Taksonomi Ilmu, Elemen-Elemen Fisik Kota, Dan Tinjauan Kasus)*. Jurnal Itenas.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tanggal : 30 Desember 1997. Jakarta
- Prasodjo, Cahyono 2004 *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi*. Disampaikan dalam

Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Tingkat Dasar. Asisten Deputy Urusan Arkeologi Nasional Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala. Kementerian kebudayaan dan Pariwisata.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku. Edisi Desember 2005. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum.

Spreiregen, Paul (1965), *Urban Design; The Architecture of Town and Cities*, Mc. Grow Hill Books Co, New York.

Sunardi, 2004 *Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota*. Workshop dan Temu Alumni Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM 9 – 11 September 2004. Yogyakarta.

Serageldin, Ismail, Ephim Shluger, Joan Martin-Brown (eds.), 2000. *Historic Cities and Sacred Sites, Cultural Roots for Urban Futures*, The World Bank, Washington.

Wongso, Jonny, 2001, *Perkembangan Pola Ruang Kota Bukittinggi, Dari Koto Jolang ke Kotamadya*, Tesis, Program Studi Teknik Arsitektur, UGM – Yogyakarta

POTRET BETENG VASTENBURG KEMARIN, KINI, DAN AKAN DATANG

oleh:

Drs. Soedarmono, SU¹

A. Setting Bandar Perdagangan

Beteng itu, sedari dulu pada awalnya dibangun memang berada disana, ditengah-tengah kota yang cukup strategis untuk ukuran Bandar perdagangan Bengawan Sala. Karena beteng itu menempati lokasi urutan ke dua yang cukup strategis di jantung kota, setelah istana Kasunanan. Jangan menganalogikan beteng Vastenburg itu tiba-tiba muncul dan berdiri disana agar menimbulkan kesan ada dua kekuatan militer yang saling bersaing (kraton dan kumpeni), menjadi penjaga gawang militer di kota ini. Memang ada realitas sejarah kota, bila dibentangkan benang merah sejarahnya, yaitu muncul sosok beteng perdagangan Belanda, berdiri hanya sejengkal tanah dari lokasi itu, namanya *grootemudigheid*. Dijaman era peradaban air masih memegang

¹ Dosen Jur. Sejarah Fak. Sastra UNS

peranan penting, dari fungsi Bengawan Sala sebagai alat transportasi sungai menjalankan peranan penting dalam dinamika perdagangan antara pantai utara Jawa dengan pedalaman Jawa bagian selatan. Kumpeni, sudah lama mengincar armada perdagangan Jawa ini sehingga mereka mempertimbangkan untuk membangun lebih dahulu, semacam beteng perdagangan disana, sekitar awal abad 15. Aktifitas kumpeni disana, terasa membaaur menyesuaikan diri dengan kegiatan perdagangan local - pesisiran, tetapi pemilihan lokasi yang sudah ditetapkan, persis di pinggir kali *pepe*, tampaknya mengandung *grand design* yang bakal menentukan nilai strategis dibidang tata letak, dan tata kota berikutnya. Itulah sebabnya mengapa peran Mayor Hohendorp dirasa penting untuk mempertimbangkan kedudukannya disana, disaat sesudah geger pecinan surut.

Sekali lagi, bila dianalogkan dengan pendekatan periodik sering abad pada system dinasti Mataram, angka abad 15, 16 dan 17 adalah angka peradaban sungai yang masih menjadi andalan selama dinasti Mataraman itu masih mendominasi kekuasaan kerajaan di Jawa. Bila tahun 1745 juga dianalogikan menjadi peringatan untuk *adege kutho Solo*, padahal keberadaan beteng *grootemudigheid* sudah berdiri tegak dipinggir kali *pepe* itu sudah ada sejak abad 15, ini sudah menganalogikan bahwa Kumpeni sudah menyiapkan perencanaan besar untuk menggiring kemauan raja PB II lebih mempertimbangkan pemilihan letak tata ruang kotanya, berada di dekat(kan) dengan keberadaannya beteng dagang itu. Coba bayangkan, hanya sejengkal tanah, ibarat hanya se *dumuk-bathuk* maka seluruh kekuatan *jerohan kraton* sudah bisa diketahaui oleh Kumpeni. Peristiwa ini menurut saya,

harus dicermati tentang perencanaan strategis (grand-desain) dari sosok Mayor Hehendorf, yang senantiasa memerankan konsepsi adu domba antar pribadi raja PB II dengan para pangeran kerajaan di Mataram itu.

Analoginya bukan terletak pada peran para pujangga kerajaan yang dipercayakan pada segala macam jenis-jenis tahayul yang disampaikan pada rajanya, melainkan ada konsep strategis yang sudah dirancang Mayor itu, memaksa raja untuk menentukan tata letak yang dirasa cukup strategis bila berdekatan dengan letak beteng. Mayor yang satu ini memang juga harus dicermati kecerdasannya, karena hanya dari pikirannya ruang gerak sejarah Mataram dikota ini, bisa menjadi kacau-balau dalam perencanaannya. Pembangunan perkotataan yang nantinya bakal tumbuh berkembang mengikuti rujukan teori pembangunan berkelanjutan, agaknya sudah ditetapkan oleh Mayor yang satu ini, karena sudah ada proyeksi ke depan berkaitan dengan penutupan kali bathangan yang melintas di depan dua kraton itu.

Memang nyatanya, ada gagasan pembangunan kota berkelanjutan, bila peradaban air dirubah fungsinya menjadi jalan darat. Oleh karena itu bila teori futuristic Mayor Hohendorf mau diikuti dengan kajian ekologi kota, maka Sala yang berbasis kota air bakal berubah menjadi kawasan daratan yang bermodalkan lingkungan ekologi perkebunan.

B. Kolonial vs Kerajaan

Awal pembangunan kota-kota Jawa yang orientasinya berakar pada konsep panutan tata ruang kraton, agaknya sudah memudar pancaran sinar *kawahyu*-anya karena

tata letak kraton, dianggap sangat mistis bagi gaya hidup orang Jawa. Sementara orang Jawa lebih simple, praktis dan pragmatis. Sehingga kraton Sala tidak patut menjadi panutan untuk model-model bangunan orang Jawa, kecuali peruntukan tata-ruang *njobo* kraton yang lebih banyak menyiratkan pada nilai-nilai filosofi keseimbangan antara Pasar (duniawi), vs Masjid sebagai simbol akhirat.

Meletakkan dasar pembangunan tata-ruang kota Sala, tampaknya muncul *dual-ekologi* tata ruang dalam sumbu poros, antara konsep kraton dan kolonial. Penataan kawasan kota sudah memunculkan jejak-jejaknya yang cukup permanen kedalam sifat-sifat dual ekologi tadi sehingga tampilannya menjadi sangat ekstrim. Tahun 1745 ketika kraton ditetapkan dalam deklarasi *adege kraton*, tidak lama kemudian juga muncul bangunan resmi beteng *vastenburg*, yang berdiri pada tahun 1755. Kemudian kraton membangun konsep sumbu poros-sakral yang melintang dari arah selatan-utara (kraton-tugu pemandhengan), juga berfungsi menjaga keseimbangan antara bangunan sosok pasar gedhe (simbul kehidupan/ duniawi), di imbangi dengan fungsi bangunan *masjid Agung* sebagai lambang akhirat. Sementara itu pihak kolonial juga membangun poros timur-barat, yang juga difungsikan untuk menghidupkan sector pertumbuhan perekonomian kota. Poros ini nantinya menjadi jalan protocol utama kota yang berdiri diatas artifact *kali bathangan*. Disamping itu Kompeni saat itu menamakan jalan ini sebagai *jalan patrol*, yaitu berfungsi sebagai jaringan jalan untuk mengontrol kepentingan militer Kompeni yang menghubungkan jalan darat antara poros Gubernement Semarang, Sala, Yogya dan Magelang. Sebenarnya keberadaan Beteng di Sala, tidak

berdiri sendirian melainkan sesudah Vastenburg dibangun, juga disertai munculnya beteng-beteng di kawasan Jawa Tengah, yaitu kota-kota Salatiga, Boyolali, Kartasura, Klaten, Vredenburg Yogyakarta dan kawasan perbentengan di kota Magelang.

Selanjutnya pada proses perjalanan waktu, kraton tampaknya juga berminat membangun *bondho-lumakso* yang fungsinya mengurus segala macam kegiatan perekonomian istana, disusul kemudian Belanda juga membangun kantor *Javaaschebank* yang berfungsi mengurus moneter perbangkan kota karena kegiatan eksport-import untuk menampung hasil bumi *onderneming* dikawasan *vorstenlanden*. Ini nampaknya juga mengharuskan prasyarat lahirnya bank Jawa itu. Kegiatan perdagangan di kota ini juga memunculkan komunitas dagang kampung Belanda yang nilai pertumbuhannya tidak sehat, karena berjalan tidak bersinergi dengan kampung pecinan, kampung Arab, kampung priyayi Jawa dan kampung sewu dan kampung dagang batik di Laweyan. Pertumbuhan kampung dagang Laweyan, kampung dagang Sewu pertumbuhannya juga berjalan tidak bersinergis karena menampakkan antisipatif komunitas dengan kalangan bangsawan priyayi kraton. Ternyata proses dinamika lingkungan untuk mengukur semangat etos kerja mereka terjadi pemutusan hubungan dengan symbol-simbol kemapanan kaum bangsawan di kota ini.

Untuk kajian Sosiologis perkotaan, tumbuhnya bangunan-bangunan model *counter* perkotaan sebagaimana kota Sala ini, nampaknya ada fenomena pertumbuhan yang tidak sehat, karena mereka berada dititik persilangan gladhag yang bersifat antagonis. Dengan demikian, titik persim-

pangan jalan Gladhag ini selalu mengandung nilai-nilai konflik. Misalnya menjadi titik persilangan konflik antara kraton vs rakyat, pedagang vs Kolonial dan Penjajahan vs Republik. Bagaimanapun dilihat dari sosok dua bangunan itu sendiri, sudah mencerminkan nilai-nilai kontra-produktif bila diadakan kajian pada ekologi sosial, budaya. Lebih lebih ketika diproyeksikan pada kajian politik ketataprajaan, antara Kumpeni VS istana Kerajaan. Fenomen itu, jelas-jelas nampak ada unsure pemaksaan, dalam segala aspeknya, utamanya pada dinamika masyarakat yang mencerminkan *dual-ekonomik* sebagaimana teori Boeke. Sosok Kraton yang mencerminkan gaya hidup berfoya-foya ala bangsawan, hampir seirama dengan styl kehidupan mapan Kumpeni Belanda, sangat tidak cocok ditampilkan untuk typology masyarakat kotanya yang lebih mencerminkan pola hidup kerakyatan dan burjuis perkotaan bagi komunitas warga pedagang

Ini memang gambaran pertumbuhan kota, ketika terjadi potret persaingan yang kontroversi pada dinamika kehidupan sosial-ekonomi kota. Setidaknya ini fenomena dari awal abad 19 sampai awal abad 20. Bangunan-bangunan gedung societeit, muncul dimana-mana (ada 7 gedung selevel *harmoni* dan *habiproyo*), seolah-olah menjadi ruang pameran untuk warga masyarakat kolonial yang dipamerkan masih saja mencerminkan gaya hidup kaum penjajah di kota.

Beteng Vastenburg dalam perjalanan waktu, memang selalu bermasalah, terutama untuk warga kotanya. Tetapi, bangunan itu sudah pasti menyimpan ingatan pada warga kotanya akan memori kolektif yaitu tindak kekerasan pada siapa saja yang membuat ketidak harmonisan lingkungan. Disana ada simbol gerakan nasional yang sengaja ditutupi

pihak penguasa sekarang, agar terhapus dari benang merah sejarah kekerasannya. Lebih-lebih, ketika ada rekayasa dari seseorang warga yang merasa mampu menepuk dada unjuk kekayaan dikota. Ia merasa bisa mengerdilkan kebijakan dinas tata kota, bisa mempengaruhi policy-maker BPPP Jateng, bahkan sampai institusi S-2 Lingkungan Hidup UNS bisa dikebiri pencitraan akademiknya untuk ikut-ikutan melegalkan mendukung kehadiran IMB yang bermasalah disana. Bila IMB saat itu benar-benar direstui kehadirannya oleh Walikota, maka habislah simbol heritage kota yang masih tersisa dipertahankan oleh warga kota Sala saat itu.

C. Potret Vastenburg Masa Kini

Pertemuan dari kalangan seniman-budayawan (siang itu), dihadiri datang dari kalangan penjurur kota, sengaja diundang di rumah Walikota. Maksudnya untuk men-jaring aspirasi mereka dihadapkan pada pemilik syah (pemegang sertifikat Beteng). Pertemuan itu dijadwalkan untuk membangun opini dari kalangan warga kota agar dicari titik temu kesepakatan antara warga kota dengan pemilik beteng. Memang suasananya agak timpang karena warga masyarakat berhadapan dengan pemilik beteng yang memperoleh dukungan kuat dari kalangan Dinas Tata Kota, Surat ijin dari Lingkungan Hidup Pasca Sarjana UNS dan BP3 Propinsi Jateng.. Terjadi perdebatan yang cukup sengit antara perwakilan Seniman-Budayawan Sala versus pemilik atau pemegang sertifikat beteng. Pertemuan berakhir deadlock, kemudian permasalahan diambangkan, sambil menunggu surat terbitnya SK yang dilayangkan oleh

Dirjen Kebudayaan RI di Jakarta. Akhirnya surat itu datang yang nota keputusannya menghimbau kepada pemilik beteng untuk mengembalikan citra heritage kota seperti aslinya (padahal heritage beteng terlanjur dihancurkan oleh pemiliknya hingga rata dengan tanah). Sampai hari ini, kondisi beteng itu masih *mangkrak*, penuh tumbuhan perdu yang tak terurus, dan ada kesengajaan diabaikan imbauan SK Direktorat Jendral Kebudayaan RI itu. Selama hampir dua tahun, periode 1999-2010, keadaan beteng itu masih saja mangkrak, terbengkalai, tidak ada kepedulian untuk merawat akan nilai-nilai heritage kota yang senantiasa masih dibanggakan bagi warga kota Sala.

Jeritan ini, adalah suara komunitas kota yang pantas disebut orang kota yang masih mau memperhatikan citra heritage perkotaan. Atau boleh jadi warga kota yang patut diperhatikan loyalitasnya pada pencitraan pengabdianya pada jati diri wong Sala yang mengalami krisis heritage untuk jejak-jejak bangunan masa lampau. Mereka masih sangat peduli pada pencitraan kota budaya., Dimulai dari pinggiran hingga pusat kota, warga Sala masih tetap komitmen pada cita-cita terbentuknya ikon kota kebudayaan yang menjadi tujuannya kini sengaja dianalogikan sebagai Sala masa lalu yang lengkap dengan sosok beteng Vastenburg sebagai bagian dari heritage kota. Beteng itu memang menempati posisi tata-letak strategis kedua setelah lingkungan kraton yang masih menyimpan banyak misteri lokal. Bagaimana sejarah beteng itu bila dibandingkan dengan jejak peninggalan lama di kota Sala ini, jawabannya masih misterius, karena seluruh kebijakan kota mengenai heritaganya juga masih menjadi dimasalahkan di lembaga legislatif. Ada perkiraan

atau prejudice masyarakat, alotnya DPR memutus mata rantai heritage kota itu disebabkan peninggalan sejarah kota lama, agaknya masih menunggu pembeli yang datang selaku investor. Otomatis, ya DPR enggan ketok palu untuk memutus Perda tentang heritage kota.

D. Harapan Vastenburg Masa Depan

Sudah menjadi komitmen bersama bagi masyarakat warga kota, bahwa Sala harus menjadikan diri sebagai kota yang beridentitas budaya. Sudah barang tentu ikon kebudayaan seharusnya ikut melekat didalam seluruh aktifitas kesenian dan kebudayaan di kota ini. Salah satu momentum yang bercirikan kota kebudayaan ialah lahirnya perguruan tinggi seni, Taman Budaya Jawa Tengah dan bengkel-bengkel kesenian yang tersebar di kota ini, nampaknya juga ikut menyemarakkan ikon kota kebudayaan itu. Juga belum adanya perwakilan seperti aktifitas kantor cabang untuk menampung aktifitas heritage kota di Sala.

Vastenburg bila dijadikan rujukan pusat heritage kota, sebenarnya cukup strategis, bila dilihat pada tata letaknya. Eksistensinya beteng itu :

1. Berada di jantung kota, dititik pusat kerajaan demikian seterusnya berada di titik persilangan segi tiga emas perdagangan kota Sala.
2. Keberadaanya diapit oleh dua kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran yang menjadikannya cukup strategis bila melakukan rekreasi perjalanan wisata di kota Sala.

3. Vastenburg juga sangat strategis karena diapit dua pasar, yaitu pasar Gedhe dan pasar Klewer, dua pasar yang menjadi andalan perekonomian kota.
4. Himbauan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI selama ini terkesan diabaikan oleh pemiliknya, ada kesan mereka melecehkan SK tersebut, hanya karena pertimbangan ekonomi semata bukan mempertimbangkan masalah heritage kota yang menjadi kebanggaan warga kotanya
5. Melalui himbauan ini perlu diingatkan terhadap pimpinan BPPP Propinsi Jawa Tengah yang memberikan surat rekomendasi kepada pemiliknya, sehingga menimbulkan salah tafsir pada Dinas Tata Kota, Dinas Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum dalam memberikan pertimbangan kepada Walikota Sala (sebelum dilakukan hearing dengan kalangan seniman-budayawan se-Surakarta).

REINKARNASI VASTENBURG: TINJAUAN PSIKOLOGI ARSITEKTUR MENYOAL MEMORI KOLEKTIF MASYARAKAT SURAKARTA

oleh:

Deddy K. Halim, PhD¹

A. Pendahuluan

Tidak perlu dipungkiri bahwa benteng-benteng peninggalan sejarah memiliki nilai yang sangat tinggi, bukan saja karena merupakan warisan dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya yang mengandung berbagai pesan dan wasiat di dalamnya, namun juga memiliki nilai-nilai baik kultural, arsitektural, maupun ekonomikal. Beberapa negara maju memberikan perhatian khusus terhadap warisan sejarah

¹ *Postdoctoral Fellow di LIVE (Laboratoire Image, Ville, Environnement), Université de Strasbourg dengan dana hibah Pemerintah Perancis, terpilih menjadi UNESCO Young Planner 2005, tim perencana ISoCaRP (International Society of City and Regional Planning) untuk Redevlopment distrik kota tua La Vieja, Bilbao, Spanyol. Penerima Penghargaan Internasional CARFAX Award 2005, Penulis buku Psikologi Lingkungan Perkotaan (Bumi Aksara, 2008) yang mendapatkan hibah penulisan buku teks dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.*

ini, sehingga dengan kreatif berusaha bukan saja hanya sekedar mempreservasikannya sebagai objek tontonan yang mati, tetapi juga cara merevitalisasi dan meng"hidup"kan kembali warisan sejarah tersebut sehingga memiliki roh baru sesuai dengan roh jaman (*Zeitgeist*) agar warisan budaya tersebut tidak berhenti pada jaman tertentu saja.

Dari sekitar 455 benteng yang ada (Djauhari, 2010) di Indonesia, sedikit sekali benteng yang terpelihara dan dimanfaatkan dengan cukup baik, jauh lebih banyak jumlah benteng yang terbengkalai dan dalam kondisi memprihatinkan. Contoh benteng yang masih terpelihara dengan cukup baik disamping juga memiliki fungsi yang baru adalah Vredenburg di Yogyakarta, Rotterdam di Makassar, dan Marlborough di Bengkulu. Oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sebuah visi yang dapat diimplimentasikan secara konkrit dan realistis dalam melakukan upaya konservasi kawasan benteng sebagai warisan sejarah dengan semangat *win-win solution* yang mengakomodasi kegelisahan para pemangku kepentingan. Karena benteng merupakan salah satu objek yang menarik dalam peranannya sebagai bagian kekayaan warisan sejarah Indonesia, maka secara psikologis, benteng tidak lepas dari persoalan memori kolektif sebuah bangsa, yang mau tidak mau juga harus dikaji secara psikologis jika kita ingin mendapatkan solusi yang mampu memuaskan sebanyak mungkin pihak, karena tidak mungkin untuk memuaskan semua orang yang memang memiliki cara pandang dan nilai-nilai yang berbeda.

B. Memori Kolektif

Memori kolektif adalah istilah yang pertama kali dipakai oleh sosiolog Perancis, Maurice Halbwachs (1877-1945) untuk membedakannya dengan Memori Individual. Dia merupakan profesor sosiologi dan pendidikan di Universite de Strasbourg. Memori Kolektif disebarkan, diteruskan dan juga dikonstruksikan oleh kelompok atau masyarakat modern. Secara substansial definisinya hampir mirip dengan terminologi Bawah Sadar Kolektif (*Collective Unconsciousness*) yang dipostulatkan Carl Jung (1875-1961), tokoh psikoanalisis Swiss yang juga murid Sigmund Freud (1856-1939). Berdasarkan definisinya, secara umum Bawah Sadar Kolektif adalah "*ingatan yang dimiliki oleh banyak orang yang membentuk sikap bersama tertentu terhadap sesuatu.*" (Jung, 1990). Biasanya ingatan ini tersimpan dalam wilayah bawah sadar manusia, karena ingatan tersebut tidak selalu dipakai/dipanggil (*recall*) dalam aktifitas kehidupan seseorang, sehingga wilayah memori sadar (*consciousness*) lebih banyak dipakai untuk hal-hal lain terkait rutinitas sehari-hari. Seringkali ketika ingatan tersebut dipanggil, informasi yang tersedia tidak lagi utuh, sebagian hilang (*decay*), dan sebagian lagi tercampur/terasosiasi dengan informasi lainnya yang tersimpan bersama di gudang ingatan (*memory storage*). Oleh sebab itu, seseorang dapat dengan mudah diprovokasi oleh orang lain akibat ketidaklengkapan atau bercampurnya informasi yang diterimanya/dimilikinya di wilayah bawah sadar tersebut. Dalam ranah Memori Kolektif, Henry Bergson (1859-1941), filsuf Perancis yang banyak melakukan studi tentang memori dalam buku klasiknya "*Matière et*

mémoire” membedakan dua jenis memori, yaitu Intensional dan Spontan. (Bergson 2004 terj.)

Memori Intensional terdiri dari proses menyandi (*encoding*) dan mendapatkan kembali (*retrieval*) informasi yang diterima, oleh sebab itu memori Intensional bersifat disengaja, dapat dipisah-pisahkan, dan bersifat kuantitatif, seperti misalnya menghafal Pancasila atau mata pelajaran sekolah. Memori Intensional juga termasuk mengingat peristiwa-peristiwa G-30S-PKI atau Tragedi Mei 1998 dan berusaha merekonstruksi kerusuhan yang telah memprorakporandakan sendi-sendi kehidupan masyarakat Surakarta tersebut. Informasinya bersifat kuantitatif dan dapat diakses oleh siapa saja. Memori Spontan adalah *impromptu*, artinya tanpa persiapan terlebih dahulu. Memori ini dibentuk sebagai sebuah hasil sampingan (*byproduct*) dan bersifat kualitatif. Ketika kita teringat akan suatu suara atau perasaan tertentu atau sebuah kalimat yang diucapkan seseorang, maka sebenarnya ada sesuatu dalam pikiran yang melatarbelakanginya dibalik memori Intensional.

Memori-memori Intensional dapat hilang perlahan-lahan seiring dengan berjalannya waktu ketika ada memori yang lebih bermakna menggantikannya, namun memori spontan bersembunyi dalam pikiran kita dan siap menjadi pemicu pikiran (kognisi), perasaan (afeksi) dan perilaku (konasi) sepanjang hidup kita. Seringkali, ketika para orangtua kita yang hidup di jaman revolusi mendengar suara tembakan meriam atau melihat tayangan tentara yang sedang menembaki warganya di televisi, maka mereka langsung teringat peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami di masa mudanya. Namun demikian, ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan terkait dengan proses asosiasi yang dilakukan otak manusia dalam mengingat sesuatu, gambaran ingatan yang salah, bahkan yang sebenarnya tidak dimiliki dapat muncul akibat informasi lain yang masuk dan bercampur dengan memori-memori yang dimiliki, akibatnya seringkali orang dapat memiliki pemikiran yang keliru terhadap sesuatu dan menjadi emosional ketika hal tersebut memicu memori-memori negatif yang dimiliki sebelumnya. Ketidak-lengkapan dan ketidak-akuratan informasi yang diterimanya secara serta-merta dijadikan satu-satunya sumber pembenaran tanpa terlebih dahulu memvalidasi informasi yang diterimanya. Hal ini juga dapat terjadi secara kolektif, bukan hanya pada orang-perorang tetapi terhadap sekelompok yang mungkin tidak memiliki informasi yang lengkap dan/atau dengan sengaja diberikan informasi yang keliru sehingga tercipta citra negatif terhadap sesuatu. Provokator massa biasanya sangat piawai dalam menggunakan kelemahan proses berpikir manusia ini sebagai alat untuk menghasut dan mendapatkan dukungan dari kelompoknya.

Hal ini juga dapat saja terjadi pada Vastenburg, sebuah peninggalan Cagar Budaya yang telah menjadi memori kolektif masyarakat Solo dan latar pikiran masyarakat yang sewaktu-waktu siap memicu perasaan sentimental tertentu warga kota Solo. Terlebih lagi, akibat ketidak-mampuan pemerintah kota dalam memelihara Cagar Budaya ini, membuat benteng bersejarah tersebut semakin tidak terawat, hancur dan ditutupi semak belukar serta pohon-pohon liar yang akhirnya perlahan hilang dari pandangan dan segera dilupakan, sebagaimana memang menjadi sifat memori intensional seperti diuraikan diatas.

Ketidak-konsistenan Pemerintah Kota akibat desakan sekelompok orang yang mengatas-namakan masyarakat (entah masyarakat yang mana?) telah membuat pihak swasta yang tadinya ingin ikut serta mendayagunakan, dan mengembangkan asset ini secara optimal menjadi takut ikut serta membangun kota Solo. Akibatnya Pemerintah Kota yang sudah memberikan ijin pembangunan kompleks hotel Vastenburg menjadi terkesan populis (untuk tidak memakai istilah oportunist dan plin-plan) dan memberikan contoh yang buruk bagi ketidak-pastian hukum di kota Solo, terutama terkait dengan investasi dalam negeri, yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surakarta sendiri.

Kecurigaan berlebihan dari kelompok masyarakat tertentu diatas terhadap pihak swasta yang akan menjadi pengembang, potensial memicu ketegangan dan perpecahan yang tidak perlu didalam masyarakat. Tentu terhadap kegelisahan beberapa orang akan kepentingan sejarah dan aspek warisan budaya juga perlu diperhatikan, dan pihak Pemerintah Kota berkewajiban untuk tetap mengontrol serta menjaga komitmen pihak pengembang dalam mengelola dan memelihara aset kota tersebut, apalagi karena telah menjadi aset bangsa. Namun demikian menjadi tidak adil dan akan menjadi preseden yang sangat buruk, ketika pihak swasta yang secara legal telah sah menjadi pemilik tanah benteng tersebut kemudian menjadi tidak diperbolehkan memanfaatkannya.

C. Melestarikan penjajahan ?

Salah satu sumber kekuatiran, terutama dari mereka yang memiliki latar belakang arkeologis dan sejarah adalah bahwa bangunan baru yang akan muncul akan membuat warga kota Solo tidak lagi memiliki pemahaman sejarah yang benar karena kehadiran bangunan modern dengan multi-fungsinya yang baru akan menutupi jati-diri benteng tersebut. Apakah kekuatiran dan ketakutan ini berlebihan? Tentu tidak, namun pertanyaan yang lebih mendasar dan perlu dipikirkan terkait dengan aspek memori kolektif masyarakat adalah: *“Apakah sebagai bangsa harus terpenjara selama hidup kita dengan memori penjajahan yang menyakitkan?”* Hal itu pada akhirnya hanya akan memupuk rasa benci terhadap bangsa tertentu yang pernah menjajah kita, dan secara tidak sadar mendidik generasi muda menjadi diksriminatif dan memiliki kepribadian *paranoid* dan *vigilante*. Generasi muda secara sengaja dicekoki dengan informasi (yang kemudian menjadi memori kolektif yang keliru!) bahwa bangsa tertentu itu kejam. Penularan atau pembentukan sikap seperti ini dikenal dengan istilah *stereotype* yang dalam psikologi Kelompok (*Group Dynamic*) sering menjadi sumber konflik antar kelompok (baca: bangsa), yang seharusnya dihindari dan bukan dipupuk atas nama memori kolektif. Di era Global saat ini, waktu dunia tidak lagi dibatasi sekat-sekat geografis, dibutuhkan pikiran yang terbuka dan sikap egaliter yang mampu membuang jauh-jauh nasionalisme sempit yang seringkali dijadikan alasan mempertahankan sikap primordialisme.

Holocaust yang dilakukan NAZI terhadap bangsa Yahudi adalah sebuah contoh bagaimana memori kolektif negatif menghasilkan sebuah sikap primordial yang berbahaya dan membuat Israel menjadi bangsa yang *vigilante* terhadap bangsa lain akibat penganiayaan oleh Hitler tersebut. Pembentukan Karakter Bangsa (*Nation Character Building*) Israel yang seperti itu terjadi akibat mereka merasa harus ekstra waspada dalam mempertahankan diri mereka agar tidak kembali dianiaya bangsa lain, meskipun akhirnya sikap tersebut menjadi sangat berlebihan.

Tembok Berlin adalah contoh memori kolektif negatif lainnya dan bagaimana seharusnya kita tidak memelihara memori negatif (namun juga bukan berarti sama sekali dilupakan) yang akhirnya dapat merusak mental bangsa. Betul, bahwa sebuah tempat tanpa bangunan tua ibarat seorang individu tanpa memori. Namun yang lebih penting adalah bagaimana menyikapi memori tersebut, dan menjadikannya sebuah cara untuk memacu diri menjadi lebih baik dan mampu berkembang dengan optimal, dan sekali-kali bukan untuk membuat kita menjadi tidak berani maju dan sentimental karena terperangkap dalam kenangan masa silam. Lebih ekstrim lagi, kita menjadi sangat curiga dengan hal-hal baru dan modernisasi yang akhirnya memasung kreatifitas bangsa, termasuk potensi ekonomi kreatif kota Solo.



Potsdamer Platz tahun 1986 adalah *no man's Land* (tanah tak bertuan) yang dibatasi tembok Berlin (kiri), saat ini menjadi salah satu inner city development yang dibangun oleh warga Jerman(kanan).

Sumber: Lyricmac Gallery & Michael J. Zirbes.

Meruntuhkan Tembok Berlin yang resmi dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961 adalah salah satu bukti bahwa tidak seluruh memori kolektif perlu terus dipertahankan dalam makna yang sempit (sejarah *an sich!*). Adalah benar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, tetapi bangsa yang lebih besar adalah bangsa yang mampu membuat sejarah baru dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada sejarah masa silam. Akibat Tembok Berlin diruntuhkan maka lahirlah sebuah persatuan yang membuat Jerman semakin kuat sebagai bangsa karena mampu mempertemukan kapitalisme dan sosialisme dalam sebuah *platform* yang memberikan peningkatan kesejahteraan bagi warganya, dan menjadi salah satu tumpuan harapan investasi asing dan penciptaan pasar yang baru di tengah-tengah ancaman mengerutnya pasar domestik akibat pertumbuhan penduduk yang negatif.

Postdamerplatz saat ini menjadi *showcase* (lemari pajang) bangunan-bangunan modern berbagai bangsa (baca:

Penanaman Modal Asing) dan sekaligus menjadi simbol keterbukaan dan kerjasama antar bangsa. Ketika Sony Tower hadir di Postdamer Platz, apakah Jerman berarti telah dijajah oleh Jepang? Tentu tidak. Hanya orang yang berpikiran sempit dan picik saja yang melihat hal tersebut sebagai bentuk penjajahan ekonomi Jepang terhadap Jerman. Bahkan sebaliknya Jerman patut bangga karena salah satu raksasa ekonomi Asia memiliki kepercayaan dengan menaruh investasinya di sana, dan akhirnya citra negatif yang disandang oleh Jerman akibat peristiwa *Holocaust* sedikit demi sedikit dapat dilupakan. Dalam konteks psikologi kognitif, strategi ini mampu menggantikan ingatan buruk pada *long-term memory*.



Sony tower di waktu malam & siang hari. Sumber: Andreas Tille & Jaminnun

Tentu implikasinya terhadap Vastenburg bukan berarti harus dibongkar dan diruntuhkan akibat mengandung memori negatif penjajahan yang menyakitkan. Sama sekali tidak ! bahkan tembok Vastenburg tidak boleh diruntuhkan,

setidaknya karena ada tiga pertimbangan, yaitu: 1) usia tembok benteng ini jauh lebih tua dari tembok berlin (pertimbangan arkeologis), 2) memiliki bentuk arsitektur yang bernilai unik sebagai benteng, bukan hanya sekedar bidang rata tembok yang memanjang (pertimbangan arsitektur), dan 3) menaikkan nilai ekonomis kawasan jika dapat dikemas secara menarik dengan strategi *city marketing* yang tepat.

Namun, yang tidak kalah pentingnya dari ketiga pertimbangan diatas adalah pertimbangan psikologis, yaitu perlunya Solo memiliki sebuah “icon” sebagai jati diri kota Solo yang dapat men“jual” dan membuat Solo mampu bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah: Icon seperti apa yang perlu diciptakan untuk Solo ? Penderitaan akibat penjajahan atautkah supremasi kebangkitan terhadap penjajahan. Pilihannya tentu akan tercermin dari semiotika bentuk arsitektur yang akan muncul di kompleks Vastenburg. Menggunakan kembali langgam arsitektur kolonial Belanda pada bangunan-bangunan baru dalam kompleks tersebut tentulah bukan pilihan yang tepat, karena hanya akan menciptakan memori kolektif negatif yang kesannya mengganggu kembali era kolonialisme belanda. Lalu bagaimana ?

D. Kebutuhan akan Simbol Kota

Kevin Lynch (1918-1984), perencana kota dan salah satu pelopor kajian Psikologi Arsitektur dalam buku klasiknya “*The Image of the City*” telah banyak memberikan berbagai kajian tentang bagaimana kota-kota di Amerika dipandang dan dipersepsikan oleh warganya, dan memposisikan

kota-kota tersebut pada skala nasional untuk mengetahui bagaimana masyarakat Amerika lainnya mengenal kota-kota tersebut, sehingga akhirnya setiap kota memiliki *positioning*-nya masing-masing (Lynch, 1960). Saat ini sudah bukan saatnya lagi saling menyalahkan diantara para pemangku kepentingan benteng Vastenburg, tetapi sesungguhnya diperlukan kerelaan masing-masing pihak untuk melepaskan ego-sektoralnya masing-masing, dan bergandeng tangan bersama untuk membangun kota Solo dan menjadikannya lebih berdaya-saing.



Museum Modern Guggenheim karya Frank Gehry arsitek Canada, hadir ditengah-tengah ensanche (bagian kota tua) dan menjadi icon baru kota Bilabo, Spanyol. Sumber:Dokumentasi pribadi.

Jika Bilbao dengan strategi *city-branding* melalui Guggenheim dan karya-karya arsitektur lainnya di sepanjang Bilbao Ria (Sungai Bilbao) mampu menjadi etalase para arsitek (lokal, nasional & internasional) dengan karya-karyanya yang mengangkat kembali kota Bilbao yang pernah hampir mati, mengapa tidak kita lakukan terhadap Solo? Strategi *City Branding* Bilbao tersebut berhasil menjadikan Bilbao dengan sungainya menjadi salah satu kota eksotis baru sebagai alternatif tujuan wisata Spanyol selain Barcelona dengan

ramblasnya. Maka tantangannya sekarang adalah bagaimana Solo mampu memposisikan dirinya untuk bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia seperti Jakarta dengan Monasnya, Bandung dengan Gedung Sate-nya, Bogor dengan Istana dan Kebun Raya-nya, atau bahkan berusaha membuat Solo siap untuk bersaing pada skala regional dengan Singapura dan Esplanade-nya, Taipei dan 101-nya serta berbagai icon arsitektur kota-kota dunia lainnya yang layak dijadikan memori kolektif masyarakat secara positif.



Bilbao Ria (Sungai Bilbao) awal abad 20 (kiri) dan kondisi saat ini dimana tepi kiri & kanan sepanjang sungai menjadi etalase karya arsitektur.

Sumber: Bilbao Municipality & Dokumentasi pribadi.



Promenade Bilbao Ria dengan berbagai karya arsitektur moden yang berjejer di sepanjang sungai . Sumber: dokumentasi pribadi.

Oleh sebab itu tugas utama yang lebih penting bagi para pemangku kepentingan adalah bagaimana mencari sebuah bentuk icon kota yang bukan saja mampu merepresentasikan kota Solo, tetapi juga dapat mewakili Jawa Tengah, dan mudah-mudahan dapat menjadi icon baru Indonesia. Sekedar mengembalikan Vastenburg menjadi benteng perbekalan tidaklah memiliki nilai tambah apalagi berdaya saing, bahkan akan segera tersingkir oleh kedigdayaan Vredenburg tetangganya di Yogyakarta yang memiliki nilai historis lebih kuat dengan bentuk benteng yang lebih kompleks. Dari perspektif psikologi, upaya mengekor Vredenburg hanya akan merefleksikan mental masyarakat Solo yang tidak berkepribadian dan hanya menjadi pengikut tanpa jati-diri. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Lynch (1980) untuk bagaimana mempertahankan jati diri daerah melalui karya-karya arsitektur lokal untuk memenangi persaingan global. Saya menyebutnya *Glokalisasi!*

Jika Bali sebagai sebuah pulau kecil pernah menjadi lebih dikenal dunia Internasional daripada Indonesia sebagai negara yang menaunginya, maka merupakan sebuah kesempatan bagi Pemerintah Kota Surakarta jika mampu memposisikan Solo setidaknya sejajar dengan Bali atau bahkan menyalib Bali dengan Vastenburg-nya yang baru. Oleh sebab itu, reinkarnasi Vastenburg dalam wujud yang baru, tanpa harus mengganggu Benda Cagar Budaya (BCB) harus menjadi sebuah tujuan bersama dengan komitmen teguh para pemangku kepentingan untuk membuat Solo menjadi lebih dikenal dan dipersepsikan dengan lebih baik. Strategi seperti ini sebenarnya telah dilakukan kota-kota lain di dunia dan menjadi salah satu model bagi sebuah kota untuk memenangi persaingan yang ada diantara kota-kota tersebut dengan menjadi simbol regional kawasan (Lynch, 1960). Kini saatnya bagi Solo untuk mengambil kesempatan tersebut, setidaknya dalam skala persaingan segitiga Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang). Mampukah Solo dengan Vastenburg yang barunya menjadi simbol Jawa Tengah ?

E. Benteng & Hotel Butik

Salah satu isu yang membuat para pemangku kepentingan sulit memiliki visi dan tujuan bersama adalah ketika pemilik lahan ingin membangun Hotel Butik di kompleks Vastenburg. Meskipun pihak pemilik telah berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan merekonstruksi tembok benteng, namun kecurigaan yang berlebihan muncul dari sekelompok masyarakat yang menganggap seakan para pemilik tidak sanggup merawat barang milik-nya sendiri

(meskipun Vastenburg juga merupakan milik rakyat Surakarta, bahkan milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk saya!). Pertanyaannya adalah; apakah tidak boleh membangun Hotel Butik di Vastenburg apalagi peruntukkan hotel sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Adakah contoh konservasi yang berhasil yang mengawinkan benteng bersejarah dengan Hotel Butik? Banyak !



Hotel Butik bintang lima The Fullerton Hotel Singapore yang menggunakan bangunan benteng Fullerton yang dibangun pada tahun 1829.

Sumber: Wikipedia.

Fullerton Hotel Singapore adalah salah satu contoh sebuah Hotel Butik bintang lima yang berlokasi tepat di mulut Sungai Singapura, di daerah pusat kota. National Heritage Board (2002) mencatat bahwa awalnya bangunan benteng ini dikenal sebagai The Fullerton Building lalu menjadi Kantor Pos Umum. Sisi utara bangunan mencakup situs Benteng Fullerton, yang dibangun pada tahun 1829 untuk melindungi pemukiman di dalamnya dan mempertahankannya dari setiap serangan/ ancaman yang datang dari laut. Pada tahun 1843, benteng tersebut kemudian dikembangkan setelah

sandstone monolit yang dikenal dengan nama *the Singapore Stone* yang memiliki inskripsi yang mengindikasikan jejak peninggalan abad ke-13 kemudian dipindahkan dan disimpan menjadi koleksi Museum Nasional di Stamford Road. Benteng ini lalu dijadikan Kantor Pos Pusat dan menjadi Bursa Saham pada tahun 1874. Rencana pengembangan Benteng Fullerton ini pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1924 (95 tahun setelah berdirinya) dengan biaya \$ 4,1 juta dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Hugh Clifford pada tanggal 27 Juni 1928, dan sejarah mencatat bangunan benteng ini dipergunakan oleh setidaknya lima pengguna dengan fungsi yang berlainan sebelum menjadi Hotel Butik, yaitu: 1) Kantor pos, 2) Bursa Saham, 3) Klub Singapura, 4) Angkatan Laut, dan 5) Department Ekspot-Import (sekarang Kementerian Perdagangan dan Industri) dan Kantor Kamar Dagang (*Chamber of Commerce*) sebagaimana dikutip Clara Chow (2001).

Dari perspektif psikologi, apakah Pemerintah dan masyarakat Singapura kemudian menjadi tidak menghargai bangunan bersejarah dengan mengubah benteng bersejarah menjadi hotel butik bintang lima ? Tidak ! Sebaliknya, justru Singapura saat ini menjadi salah satu panutan bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia, khususnya para tetangganya di Asia dalam hal konservasi dan preservasi bangunan. Bahkan Fullerton mampu memenangkan Heritage Award (Sim, 2001) yang sangat bergengsi di bidang konservasi warisan budaya. Hal ini juga sekaligus mencerminkan mental masyarakat Singapura yang berpikiran terbuka dalam merespon perkembangan jaman, oleh sebab itu tidak aneh jika bangsa Singapura melesat maju meninggalkan

tetangga-tetangga lainnya di Asia Tenggara. Jadi bagaimana dengan kita ? Masihkah primordial dan setengah hati dalam merespon modernisasi dan kemajuan jaman ? Sudah saatnya masyarakat Surakarta menunjukkan kepada dunia bahwa kota Solo siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan jaman yang pada akhirnya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia dalam hal konservasi bangunan-bangunan bersejarah yang kreatif, inovatif dan progresif.

The Hilton Hanoi Opera Hotel adalah contoh lain bagaimana bangunan bersejarah dapat hidup berdampingan dengan bangunan modern dan saling mendukung satu sama lainnya secara mutualistik. Hanoi Opera House di sebelahnya dibangun di pusat kota Hanoi pada jaman penjajahan Perancis antara 1901-1911 dengan mengadopsi arsitektur Perancis, dan merupakan replika dari Palais Garnier sebuah Opera House di Paris dengan ukuran yang lebih kecil (catatan: Henry Bergson, filsuf Perancis yang disebut di bagian depan tulisan ini juga lahir di sebuah rumah di Rue Lamartine seberang Palais Garner). Meskipun Hanoi Opera House menjadi satu dengan kompleks Hilton Hanoi Opera Hotel yang dibangun pada tahun 1999 namun atas alasan sejarah perang dengan Amerika akhirnya diberikan nama terpisah sendiri dan tidak memakai nama Hilton.



Hotel Butik bintang empat Hilton Hanoi Opera Hotel yang ada dalam kompleks Hanoi Opera House (kiri) dan pintu masuk (entrance) Hilton Hanoi yang memakai bentuk modern dan menggabungkannya dengan langgam arsitektur kolonial Pernacis (kanan). **Sumber:** [www.-hotles-in-vietnam.com](http://www.hotels-in-vietnam.com).

Adalah sangat menarik ketika bangsa Vietnam tidak mau memakai nama Hilton sebagai *brand* Amerika dan sebaliknya memakai nama Hanoi, namun nampaknya masyarakat Indonesia justru lebih suka memakai dan mempertahankan nama Belanda dengan alasan sejarah. Tentu jati diri penting, tetapi bukankah dengan demikian kita juga melestarikan memori kolektif negatif dari penjajahan Belanda sampai kepada anak cucu kita dengan memasang papan nama Vastenburg sebagai penanda kompleks jika fungsi awalnya sebagai benteng dikembalikan (rekonstruksi). Apakah hal ini tidak malah mencerminkan sikap feodalisme yang baru? Tidak bisakah hal itu dicatat dalam sejarah tetapi tidak untuk diagung-agungkan kembali pada jaman ini waktu kedaulatan RI sudah seharusnya menjadi harga mutlak. Kevin Lynch (1972) juga mempertanyakan hal tersebut dalam bukunya *"What Time is this Place?"* Bahkan Shakespeare juga mengatakan, *"What's in a name? That which we call a rose, by any other*

name would smell as sweet.” Jika ingin tetap memakai nama Vastenburg sebaiknya dilakukan alih fungsi. Salah satu upaya pelestarian kreatif yang berhasil di Indonesia adalah rekonstruksi Istana Pagaruyung di Batusangkar yang menjadi bukti bahwa sebuah rekonstruksi dapat dilakukan bukan pada lokasi aslinya. Pada dasarnya, sebenarnya hal ini sama saja dengan membuat replika Palais Garner di Paris menjadi Hanoi Opera House.

F. Skenario Konservasi

Sebagaimana telah direkomendasikan dalam Rancangan Peraturan Zonasi Kota Surakarta, didukung dengan pemberian Ijin pembangunan kawasan berikut hotel butiknya dari Walikota, dan Rekomendasi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah berupa Laporan Studi Teknis - Arkeologis Benteng Vastenburg 2008, maka sebenarnya secara legal formal upaya pembangunan kembali kawasan Benteng ini tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Namun silang pendapat dan polemik yang dimunculkan oleh segelintir orang belakangan ini nampaknya dikarenakan para pemangku kepentingan tidak dapat memisahkan antara persoalan penanganan dengan pemafaatan yang sebenarnya telah diatur UU No.28/2002 dan PP No.36/2005 mengenai pelestarian BCB meskipun keduanya saling terkait. Penanganan menyangkut aspek teknis seperti perawatan dan pemeliharaan, pemugaran, dan rekonstruksi yang harus dilakukan menurut kaidah-kaidah rekonstruksi yang berlaku secara Internasional.

Adapun pemanfaatan termasuk mengembalikannya seperti semula atau perubahan fungsi. Perlu dicatat bahwa perubahan fungsi membawa konsekuensi-konsekuensi penyesuaian bangunan sesuai PP No.36/2005.

Tidak perlu dipungkiri bahwa Vastenburg adalah BCB yang juga dinyatakan oleh SK Walikota 1997. Pertanyaannya, ketika BCB tersebut tinggal tembok tebal yang mengelilingi “tanah kosong,” lalu bangunan mana yang perlu dilestarikan? Kesepakatan Kyoto melarang rekonstruksi bangunan jika tidak ada dokumen lengkap dari BCB tersebut. Dokumentasi yang masih tersedia dan diperlukan dalam penelitian untuk perencanaan rekonstruksi berupa peta, denah berskala, dan foto-foto yang tersedia tidak lagi memadai. BP-3 Jateng dalam laporannya tidak memiliki cukup data yang memadai untuk merekonstruksi ulang bangunan-bangunan yang ada di dalam benteng. Salah satu jalan yang belum ditempuh adalah mencari dokumen-dokumen tersebut pada lembaga-lembaga terkait di Negeri Belanda.

Selain tidak mungkin mengembalikan seluruh bangunan yang pernah ada di dalam benteng akibat keterbatasan dokumentasi dan status kepemilikan yang bukan lagi berada di tangan Pemerintah, maka nampaknya sulit untuk melakukan rekonstruksi terhadap seluruh bangunan. Kecuali jika, dan hanya jika, Pemerintah Kota/Daerah mengambil alih kepemilikannya dengan membelinya kembali dari tangan para pemilik, sehingga benteng dapat menjadi ruang publik dan media pendidikan sejarah yang sifatnya non-profit, artinya potensi ekonomi BCB tidak lagi menjadi pertimbangan utama yang harus diusahakan

secara optimal. Ketika Pemerintah Kota/Daerah telah menjadi pemiliknya, maka pemanfaatannyapun dapat disesuaikan dengan “selera” pemilik barunya. Tentu skenario proposal ini membawa sejumlah konsekuensi, misalnya penyediaan dana yang besar, termasuk dana pembelian kembali lahan dan dana operasional perawatan, belum lagi persoalan klasik mengenai sumber daya manusia dan jaminan kesinambungan komitmen ketika rezim kekuasaan dan politik berganti di kemudian hari.

Skenario yang lebih realistis adalah bekerja sama dengan para pemilik swasta yang telah sah memiliki kawasan tersebut tanpa harus dicurigai secara berlebihan karena adanya sentimen pribadi sekelompok masyarakat. Untuk mewujudkan skenario ini, perlu disediakan ruang yang menjanjikan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya, karena tidak ada satupun investor yang mau memelihara BCB tanpa ada keuntungan bagi dirinya. Dukungan dari Pemerintah Kota/Daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kepentingan ekonomis para pemilik tetap diperhatikan. Pemanfaatan secara ekonomis ini dapat berbentuk galeri ataupun wahana ekspo, disamping juga museum yang dapat dikelola secara komersial, atau hotel butik (seperti yang terjadi pada Hotel Tugu Malang atau Losari Plantation) lengkap dengan sarana niaga (fasilitas perbelanjaan) untuk mendukung keberlanjutan perawatan kawasan. Dengan *need assessment* yang tepat dan kerendahan hati para pemangku kepentingan, maka ruang pengembangan ekonomi kreatif yang baru dapat diidentifikasi.

G. Integrasi antara Konservasi dan Pengembangan Kota

Dalam dunia global saat ini, warisan budaya tidak bisa lagi ditafsirkan secara sederhana sebagai sebuah eksistensi materi (BCB *an sich* !), tetapi juga harus dimaknai sebagai informasi dan gagasan. Ruang kota harus dipandang sebagai artifak manusia yang mampu memodifikasi dirinya sendiri ke dalam sebuah citra hasil proses agregasi ruang-waktu yang berkesinambungan. Kota-kota di Indonesia sudah seharusnya berpikir bahwa kita saat ini berada dalam jejaring kota-kota dunia yang saling terkait, terutama karena kemajuan teknologi informasi yang telah memaksa kita untuk berbenah diri dan siap untuk memasuki persaingan global. Ketika Adi Sumarmo sudah resmi menjadi Bandar Udara Internasional, maka saatnya sekarang kita mengundang para wisatawan asing agar mau datang dan betah menimakti kota Solo, karena keterbukaan Adi Sumarmo juga bisa menjadi kontra-produktif ketika justru masyarakat Surakarta yang pergi ke kota-kota lain yang lebih menarik. Kawasan benteng Vastenburg juga harus dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk menarik wisatawan internasional jika kita mau bersaing pada jaman ini. Globalisasi ekonomi, politik dan budaya telah menciptakan ketidakseimbangan spesifik antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai baru yang belakangan ini tercipta. Kontraksi ruang dan waktu, pertumbuhan dan perkembangan perkotaan menjadi keharusan global, sementara itu kompetisi dalam memperebutkan posisi puncak (atau setidaknya berada di deretan atas) dalam jaringan kekuatan global dapat merefleksikan karakter dari kota-kota modern (termasuk Solo!). Pada saat yang bersamaan, simpul-simpul (*nodes*)

kota, termasuk benteng Vastenburg, yang didukung oleh kapitalisme global dan perubahan sistem produksi, jasa, pasar, dan format jaringan internal maupun eksternal telah meredefinisi arti ruang dan pergerakan manusia sehingga kota menjadi meta-simbol dari tatanan dunia baru, sebuah presentasi ulang dari hirarki dan persepsi global, seperti sebuah metafora dari sebuah model eksistensial yang ingin diwujudkan, tentunya melalui pergumulan batin dan logika warga kota (Halim, 2008).

Vastenburg juga harus ditempatkan dalam perspektif pengembangan kota secara integratif dengan visi pengembangan kota Solo ke depan dan bukan sebagai sebuah proyek konservasi yang berdiri sendiri dan terisolasi. Kita patut mencontoh negara-negara maju dalam hal mengintegrasikan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai modern dalam sebuah rangkaian sejarah yang dinamis. Bilbao di Spanyol dan Paris di Perancis adalah beberapa contoh bagaimana mengintegrasikan konservasi dengan pengembangan kota secara harmonis. Jika bagian sebelumnya pada tulisan ini telah menguraikan kota Bilbao yang berhasil membuat Sungai Bilbao sebagai media untuk mencatat sekuen sejarah, maka Paris menjadikan jalan legendaris Champs-Élysées sebagai media utamanya.

Di ujung barat jalan utama Champs-Élysées berdiri kokoh *Arche de Triomphe de l'Étoile* atau Gerbang Kemenangan, sebuah monumen BCB di tengah kota Paris yang tepat berdiri di pusat plaza Charles de Gaulle, yang juga juga dikenal dengan Plaza de l'Étoile. Gerbang ini dibangun untuk menghormati mereka yang berjuang untuk Perancis, khususnya selama perang Napoleon. Di bagian dalam dan

atas gerbang terukir semua nama jenderal dan peperangan yang dihadapinya. Dibawahnya ada makam para tentara Perang Dunia I yang tidak dikenal. Gerbang ini merupakan sumbu sejarah (*axe historique*) - jalur sekuen masa lampau dan masa kini yang terdiri dari berbagai monumen dan BCB lainnya, dimulai dari Istana Louvre dengan museum piramid modernnya yang terkenal karya arsitek I.M. Pei sampai distrik bisnis *La Défense*. *Arche de Triomphe* sendiri dirancang oleh Jean Chalgrin pada tahun 1806, dan menjadi simbol iconografik perlawanan anak muda Perancis yang polos (*nude*) melawan tentara Jerman yang berjenggot tebal. Jadi sebenarnya, ada pesan kebebasan dan perlawanan terhadap “saudara tua” (baca: masa lalu) yang “menyeramkan” di jaman tersebut. Revolusi Perancis yang mengusung *egalite* (persamaan), *fraternite* (persaudaraan), *liberte* (kebebasan) terefleksi pada monumen yang tingginya 50 m, lebar 45 m dan tebal 22 m tersebut. *Arche de Triomphe* juga menjadi simbol kemenangan Perancis pada Perang Dunia-I tahun 1919.

Di ujung lainnya hadir dengan megah *La Grande Arche de la Défense* yang sering juga dikenal dengan *La Grande Arche de la Fraternité* atau Gerbang Utama Persaudaraan, monumen sekaligus bangunan kantor di distrik bisnis *La Défense* (bandingkan dengan jalan Jendral Sudirman di Surakarta tempat benteng Vastenburg berada). Sebuah karya Denmark Duo, arsitek Johann Otto von Spreckelsen (1929–1987) dan Insinyur Erik Reitzel mengangkat tema *Arche de Triomphe* versi abad 20 yang dibangun sebagai sebuah monumen humanisme sebagai antitesis militerisme. Pembangunan dimulai tahun 1985, namun Spreckelsen mengundurkan diri pada bulan Juli 1986 dan mengalihkan semua tanggung

jawab arsitekturalnya kepada kolega Perancisnya, arsitek Paul Andreu dan akhirnya selesai pada tahun 1989. Tinggi keseluruhannya adalah 110 meter atau lebih dari 2 kali ketinggian dari Arc de Triomphe.



La Defense di ujung barat sebagai wujud reinkarnasi dari Arc de Triomphe di ujung Timur mengapit jalan raya legendaris Champ Elysees di kota Paris, kedua gerbang ini seakan menunjukkan keberlangsungan sejarah yang tidak berhenti di jaman Napoleon. Sumber: Anthony Atkielski (kiri atas), AndrewHorne (kanan atas), Palagret (kiri bawah), Hardouin (kanan bawah)

Jika kita mau rendah hati belajar kepada Paris, maka perdebatan antara kubu yang mati-matian ingin mempertahankan romantisme “penjajahan” dengan kubu kapitalis yang progresif tidak perlu berlarut-larut karena jika masing-masing pihak tetap kukuh pada pendiriannya maka akibatnya hanya akan membuat benteng Vastenburg semakin hancur dimakan zaman tanpa ada tindakan apa-apa. Yang diperlukan sekarang adalah langkah nyata, bukan lagi seminar dan diskusi !

Proposal yang dapat diajukan untuk mempertemukan kedua kubu adalah dengan menggali langgam arsitektur modern yang diilhami warisan budaya Indonesia untuk mengisi lahan kosong di tengah benteng jika rekonstruksi tidak lagi mungkin dilakukan. Jika Paris mampu mereinkarnasikan *Arc de Triomphe* ke dalam bentuk modern *Arche de la Défense*, maka tidaklah sulit untuk mereinkarnasikan bentuk unik Borobudur misalnya, ke dalam proses kelahiran kembali benteng Vastenburg. Strategi ini mampu menciptakan sumbu sejarah (*axe historique*) baru Jawa Tengah atau bahkan sumbu ekonomi & pariwisata Joglosemar, sekaligus memperkuat *city branding* kota Solo. Karena *benchmarking* terhadap Borobudur yang memiliki citra kuat sampai ke seluruh pelosok dunia akan dapat mengangkat Solo naik kelas, dan berdiri sejajar dengan kota-kota Internasional lainnya.



- BOUTIQUE HOTEL
- SHOPPING ARCADE
- CONVENTION CENTRE



Proposal arsitektur Borobudur sebagai wujud reinkarnasi Vastenburg dapat menjadi icon baru kota Solo. **Sumber:** Sketsa Pribadi

Pengembangan Vastenburg sesungguhnya merupakan penyesuaian struktur perkotaan yang perlu menemukan kembali beberapa segmen yang dilupakan sebagai generator dari mutasi serta perubahan bentuk kota tradisional menjadi metropolitan dan secara simultan menciptakan konstruksi mental dari ruang-waktu, usaha ini seperti melakukan eksperimen-eksperimen dalam sebuah Laboratorium besar (Halim, 2007, 2008). Simbol atau icon Jawa Tengah dapat menjadi sebuah instrumen unik komunikasi global, dan di atas semuanya, suatu ungkapan jaman, yang relatifitasnya kelihatan sebagai jati diri masyarakat Surakarta yang tidak lagi sekedar ingin kembali ke jaman penjajahan tetapi mampu menunjukkan kepribadiannya sebagai masyarakat modern. Seperti halnya seorang individu, proses menemukan jati diri sebagai pribadi yang unik merupakan masalah utama masyarakat modern (Jung, 2006). Polivalensi simbolik ruang kota yang terglobalisasi harus membentuk identitas kota yang memancarkan pesan-pesan tradisi, kosmopolitanisme dan kemajuan teknologi. Kota-kota global akan saling berhubungan dan berkompetisi menciptakan citra baru kota, yang tidak hanya modern tetapi juga harus unik & menarik. Pertanyaannya sekarang : Siapkah kita ?

KEPUSTAKAAN

Bergson, Henry (2004). *Matter and Memory* (terj *Matière et mémoire*, 1896). London: Dover Publications.

- Chii, Wong Yunn (2005). *Singapore 1:1 City: A Gallery of Architecture & Urban Design*. Singapore: Urban Redevelopment Authority.
- Chow, Clara (2001). "It was more than just the GPO". *The Straits Times*. hal. L5. 31 Oktober 2001
- De Seneneville, Gérard (1992). *La Défense: Expression Des Arts Urbains du XX^e Siècle*. Paris : Albin Michel
- Djauhari, Sumintardja (2010). *Komunikasi Pribadi*, Rabu, 16 Juni 2010 pkl. 12.15-12.45 wib di Benteng Vredeburg, Jogjakarta dalam rangka Seminar Pemanfaatan Kembali Benteng-Benteng Masa lalu di Indonesia.
- Halim, Deddy K. (2005). *Psikologi Arsitektur*. Jakarta : Gramedia Sarana Indonesia.
- Halim, Deddy K. (2007). "A Big Laboratory Named City". *Journal Architecture & Urban Planning – SPATIUM*. Belgrade: No.15-16, hal. December 2007.
- Halim, Deddy K. (2008). *Psikologi Lingkungan Perkotaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jung, Carl Gustav (1990). *Analytical Psychology: Its Theory and Practice (The Tavistock Lectures)*, (Ark Paperbacks).
- Jung, Carl Gustav (2006). *The Undiscovered Self: The Problem of the Individual in Modern Society*. New American Library. hal. 14 & 45.
- Lynch, Kevin (1960), *The Image of the City*, Cambridge MA: MIT Press.
- Lynch, Kevin (1972), *What Time is this Place?*, Cambridge MA: MIT Press.

Lynch, Kevin (1980), *Managing the Sense of a Region*, Cambridge MA : MIT Press

National Heritage Board (2002). *Singapore's 100 Historic Places*. Singapore: Archipelago Press.

Sim, Arthur (19 July 2001). "Fullerton wins heritage award". *The Straits Times*. hal. L7.

BENTENG VASTENBURG DAN BENTENG-BENTENG KOLONIAL LAINNYA DALAM PERBANDINGAN¹

oleh:

H. Gunadi Kasnowihardjo
gunbalar@yahoo.com

A. Pendahuluan

Vastenburg adalah benteng pertahanan sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Surakarta pada saat ini secara fisik tinggal sedikit yang dapat diamati. Dengan memperhatikan lokasinya yang sangat dekat dengan Kraton Kasunanan Surakarta, dapat diduga benteng tersebut dibangun oleh pemerintah Belanda setelah mereka secara total menguasai wilayah tersebut. Dengan dibangunnya benteng Vastenburg, maka segala gerak gerik penguasa setempat akan dapat dengan cepat dipantau oleh penjajah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

1 Artikel ini telah dipresentasikan pada Diskusi Ilmiah Arkeologi, di Benteng Vredeburch Yogyakarta, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Purbakala ke 97, Tahun 2010.

berdirinya benteng-benteng bercirikan arsitektur Eropa merupakan bukti fisik adanya penjajahan bangsa Belanda atas bangsa Indonesia. Vastenburg dibangun setelah Paku Buwono II dapat ditundukkan. Hal ini memperjelas bahwa Benteng Vastenburg dibangun kira-kira pada abad XVIII. Walaupun dibangun pada waktu yang hampir bersamaan serta memiliki fungsi yang sama pula dengan benteng-benteng yang lain, Vastenburg yang berada di pusat Kota Solo ini rupanya mempunyai nasib dan sejarah yang berbeda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, Vastenburg dikuasai oleh Pemerintah Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Setelah melalui proses tukar guling dan jual – beli dengan beberapa pihak, terakhir Vastenburg dimiliki oleh Robby Sumampouw.

Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa benda cagar budaya tertentu dapat dikuasai dan dimiliki oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benda cagar budaya yang : Dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan. Jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara. Sebagai pemilik sah versi Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sejauh mana Robby Sumampouw dapat memanfaatkan Vastenburg yang termasuk benda cagar budaya tersebut? Mengapa dalam proses pemanfaatan kawasan Benteng Vastenburg proyek tersebut “digagalkan” oleh Pemerintah cq. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

yang didukung pula oleh berbagai elemen masyarakat? Proses tukar guling yang dilakukan antara Kementerian Pertahanan dan Keamanan dan beberapa pihak yang akhirnya jatuh ke tangan Robby Sumampouw apakah dapat disejajarkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya? Apabila proses kepemilikan tersebut tidak melanggar undang-undang, maka yang menjadi permasalahan pokok berikutnya adalah bagaimana mengelola kawasan situs tersebut?

Kasus yang terjadi di kawasan situs cagar budaya Benteng Vastenburg tidak dapat dibiarkan “menggantung” dan seolah-olah tidak ada solusi. Hak-hak seorang pemilik benda cagar budaya dalam ikut mengelola sumberdaya budaya harus pula diperhatikan. Untuk itu, sistem pengelolaan sumberdaya budaya dengan *win-win solution*, merupakan model yang ideal, karena pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan merasa dirugikan. Berbagai hal lain terkait dengan kawasan Benteng Vastenburg yaitu pertama kondisi fisik sumberdaya budaya yang secara kasad mata terlihat tidak dipedulikan dan terlantar. Kedua, keberadaan sumberdaya budaya yang terletak di jantung kota Solo tersebut jelas-jelas memiliki potensi yang luar biasa apabila dapat dimanfaatkan secara bijak. Contoh-contoh pengelolaan sebuah benteng tinggalan kolonial baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya arkeologi seperti Vastenburg.

Atas dasar uraian di atas, maka “benang merah” permasalahan yang dapat ditarik dalam kasus Benteng Vastenburg adalah tidak adanya koordinasi lintas lembaga baik lembaga

pemerintahan maupun swasta dalam pengelolaan kawasan situs Benteng Vastenburg. Akhirnya konflik kepentingan tidak dapat dihindari, akan tetapi secara finansial pihak yang paling dirugikan adalah Robby Sumampouw pemilik sah kawasan tersebut dari hasil tukar guling dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Namun demikian, koordinasi tersebut dapat diwujudkan apabila telah ditemukan akar permasalahan yang menjadi substansi atau materinya. Untuk mendapatkan substansi atau materi tersebut perlu dilakukan penelitian-penelitian kolaboratif antar berbagai disiplin seperti arkeologi, sejarah, arsitektur, dan teknik sipil, serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Rekomendasi hasil penelitian ini yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan “kawasan strategis” Benteng Vastenburg ke depan.

B. Pengelolaan Benteng-Benteng Kolonial dalam Perbandingan

Benteng-benteng kolonial baik yang ditemukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, saat ini pada umumnya dikuasai oleh pemerintah. Adapun pemanfaatan serta fungsinya beberapa di antaranya dijadikan sebagai museum khusus, seperti di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Adapula yang dimanfaatkan untuk museum umum dan kantor pemerintah, yaitu Museum “La Galigo” Propinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang menempati Fort Rotterdam,

Makassar. Kondisi serupa juga ditemukan di Manila yaitu pemanfaatan Fort Santiago yang difungsikan sebagai museum dan perpustakaan, walaupun tidak semaksimal seperti yang

ditemukan di Indonesia. Satu benteng yang dieksploitasi secara berlebihan dialami Benteng Van der Wick di Gombong, Jawa tengah, “dijual” sebagai obyek wisata dan fasilitas jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedang dua benteng lain yaitu Vastenburg dan Willem II sampai saat ini masih sarat akan konflik kepentingan antar berbagai pihak yang belum dapat diselesaikan. Salah satu contoh pengelolaan benteng yang profesional dapat dilihat dalam rencana *reuse* Fort Monroe yang ada di Virginia, Amerika Serikat. Setelah benteng tersebut dibersihkan dari fungsi awal sebagai benteng pertahanan militer, saat ini oleh pemerintah Virginia diserahkan kepada Badan Otoritas Fort Monroe yang kemudian akan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai *National Park Service Site*. Setelah bersih dan militer meninggalkan lokasi tersebut, maka langkah awal disiapkan dana 80 juta US dollar untuk penataan kawasan tersebut.



Kompleks Fort Rotterdam, Makassar awal tahun 1990 an

1. *Fort Rotterdam di Makassar*

Fort Rotterdam yang terletak di Jalan Ujung Pandang No. 1, Kota Makassar, hanya beberapa meter dari garis pantai Selat Makassar. Benteng yang dikenal dengan nama Benteng Makassar, sebelumnya dikenal pula dengan nama Benteng Panyua maupun Benteng Ujung Pandang, adalah salah satu peninggalan sejarah keperkasaan kerajaan masa lalu di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa merupakan kerajaan yang sangat kuat dan berjaya pada abad XVII, dengan kota perniagaannya Makassar. Kerajaan Makassar pada masa itu dilihat dari arah laut adalah sebuah wilayah yang dilengkapi dengan perbentengan. Kerajaan Gowa mempunyai 17 benteng yang melindungi ibukota Makassar dan sekitarnya.



Bagian dalam Fort Rotterdam dengan pertamanan modern Kondisi tahun 2005

Pada tahun 1677 ketika kekuatan Gowa dikalahkan oleh Belanda, semua benteng dimusnahkan kecuali benteng Rotterdam. Adapun benteng Somba Opu setelah dua tahun kemudian dihancurkan secara total oleh Belanda. Benteng Rotterdam awalnya dibangun oleh Raja Gowa X pada

tahun 1545 yang bernama “Imarigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung”, yang juga terkenal dengan nama “Tunipallangga Ulaweng”. Bentuk dasar benteng ini adalah segi empat dengan gaya arsitektur Portugis. Tembok benteng terbuat dari tanah liat, dengan model yang sama dengan benteng-benteng di Eropa pada abad XVI dan XVII, dengan tambahan tonjolan keluar yang melekat pada bentuk dasar benteng, sehingga mirip dengan bentuk seekor penyu. Selama masa pendudukan Belanda benteng ini dibangun kembali dan diberi nama “Fort Rotterdam”. Nama Rotterdam diambil dari kota kelahiran Cornelis Speelman yang berhasil menaklukan Makassar. Sebagai penghargaan kepadanya maka benteng yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Kolonial Belanda ini diberi nama Fort Rotterdam. Pada masa itu benteng juga menjadi pusat pemerintahan dan perniagaan. Selanjutnya selama masa pendudukan Jepang, benteng ini berfungsi sebagai Pusat Studi Pertanian dan Bahasa.



Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan 2010 masih cukup banyak

Pada masa kemerdekaan, hampir semua bangunan yang ada di dalam benteng dimanfaatkan untuk kegiatan perkantoran beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan seperti Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (sekarang Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar), Taman Budaya, Balai Bahasa dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (sekarang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional), Museum Negeri La Galigo, dan Balai Arkeologi Makassar. Saat ini, instansi pemerintah yang masih memanfaatkan kompleks Fort Rotterdam tinggal Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dan Museum Negeri La Galigo. Selain itu, ada 3 (tiga) ruangan yang masih “dipinjam” oleh Dewan Kesenian Makassar, Kelompok Pelukis Makassar, dan sebuah lembaga yang menyelenggarakan kursus bahasa Belanda.

Fort Rotterdam selain selain dimanfaatkan sebagai perkantoran dan museum, pada hari – hari tertentu terutama hari libur juga dimanfaatkan sebagai ruang publik yang sangat ideal bagi sebuah kota seperti Makassar, karena lokasi yang menyendiri tetapi strategis. Beberapa kelompok belajar bahasa Inggris memanfaatkan teras-teras gedung untuk belajar dan “*practice in English*” baik antar anggota kelompok ataupun dengan *native speakers* wisatawan mancanegara yang berkunjung ke tempat tersebut. Pemanfaatan Fort Rotterdam untuk kepentingan umum seperti telah disebutkan di atas tidak harus ditafsirkan sebagai “pencemaran” kawasan heritage, melainkan merupakan nilai tambah yang dapat menambah panjang sejarah dan memperkuat jatidiri bangsa. Bahkan pada saat penulis bertugas di Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan

dan Tenggara, pernah “mencoba” bekerjasama dengan Hotel Marannu di Makassar mengadakan “Royal Dinner” di salah satu bastion di kompleks Fort Rotterdam. Hal – hal seperti ini janganlah buru – buru dikatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya.

2. *Benteng Vredeburg di Yogyakarta*

Benteng Vredeburg terletak di ujung Jln. Jenderal Ahmad Yani atau yang lebih dikenal dengan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Benteng ini semula bernama Fort Rustenburg yang mempunyai arti “Benteng Peristirahatan”,. Fort Rustenburg dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 di atas tanah Keraton. Berkat izin Sri Sultan Hamengku Buwono I, sekitar tahun 1765 - 1788 bangunan disempurnakan dan selanjutnya diganti namanya menjadi “Benteng Vredeburg” yang mempunyai arti Benteng Perdamaian. Bangunan ini sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami berbagai perubahan fungsi. Pada tahun 1760 - 1830 berfungsi sebagai benteng pertahanan, pada tahun 1830 -1945 berfungsi sebagai markas militer Belanda dan Jepang, serta pada tahun 1945 - 1977 berfungsi sebagai markas militer RI. Setelah tahun 1977 pihak Hankam mengembalikan kepada pemerintah. Oleh pemerintah melalui Mendikbud yang saat itu dijabat Bapak Daoed Yoesoep atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemilik, ditetapkan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara pada tanggal 9 Agustus 1980. Pada tanggal 16 April 1985 Benteng Vredeburg dipugar menjadi Museum Perjuangan dan dibuka untuk umum pada tahun 1987. Kemudian pada tanggal 23 November 1992 resmi menjadi “Museum Khusus

Perjuangan Nasional” dengan nama “Museum Benteng Yogyakarta”. Bangunan bekas Benteng Vredenburg dipugar dan dilestarikan. Dalam pemugaran pada bentuk luar masih tetap dipertahankan, sedang pada bagian dalamnya direnovasi disesuaikan dengan fungsinya yang baru sebagai ruang museum.



Halaman Benteng Vredenburg yang difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor terkesan semrawut dan akan mengurangi nilai heritage tersebut

Sejak pengelolaan Benteng Vredenburg oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980an, setelah dilakukan penelitian dan berbagai studi, maka kompleks benteng ini dimanfaatkan dan difungsikan sebagai museum. Koleksinya dikonsentrasikan pada peristiwa-peristiwa penting masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Berbagai peristiwa tersebut sebagian besar digambarkan dengan diorama, foto, dan gambar, tetapi ada pula beberapa artefak yang berkaitan. Pemanfaatan Benteng Vredenburg yang dilatar belakangi pemikiran *non profit oriented*, akan tetapi dari pengamatan sekilas jumlah kunjungan ke Museum Benteng Vredenburg cukup banyak

terutama di waktu-waktu libur sekolah, sehingga hasil dari tiket masuk dapat menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup signifikan bagi pemerintah. Namun demikian, apabila dikembalikan pada biaya perawatan atau pemeliharaan bangunan yang termasuk benda cagar budaya, apakah PNBP tersebut memenuhi kebutuhan? Untuk menuju swasembada dalam pemeliharaan serta perawatan kompleks bangunan cagar budaya tersebut perlu langkah-langkah menuju profit oriented, namun tetap dalam koridor pelestarian. Sementara ini sebagai salah satu ruang publik bagi Kota Yogyakarta, Benteng Vredenburg telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh masyarakat, baik dalam event-event tahunan yang bersifat rutin seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) maupun yang bersifat insidental.

3. *Benteng Van der Wijck di Gombong*



Di atas pintu masuk Benteng Van der Wijck ditempatkan stasiun kereta api mini

Benteng Van der Wijck terletak di Kota Gombang, Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya di bagian Utara kota Gombang kira-kira 300 meter dari jalan raya Jogjakarta-Gombang. Nama Van der Wijck diambil dari nama salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Carel Herman Aart Van der Wijck yang bertugas di Jawa antara tahun 1893-1899. Akan tetapi beberapa sumber menyatakan bahwa benteng ini dibangun pada tahun 1818 (awal abad XIX). Bahkan ada yang berpendapat bahwa Benteng Van der Wijck dibangun pada abad XVIII sejaman dengan benteng-benteng kolonial lainnya seperti Benteng Vredenburg di Yogyakarta dan Vastenburg di Surakarta.



Sisi lain Benteng Van der Wijck

Berbeda dengan Fort Rotterdam maupun Benteng Vredenburg, pengelolaan Benteng Van der Wijck dilakukan oleh investor swasta sehingga dilatar belakangi pemikiran *profit oriented*. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila di kawasan tersebut disajikan berbagai atraksi yang diperkirakan menarik perhatian para wisatawan. Bahkan di

atas konstruksi dinding keliling benteng yang terbuat dari pasangan bata tersebut dibangun jalur kereta api kelinci sepanjang kira-kira 400 meter. Hal-hal yang rasanya tidak mungkin terjadi, dalam kenyataannya dapat ditemui di kawasan yang termasuk benda cagar budaya tersebut. Dengan demikian objek wisata sejarah tersebut oleh investor dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi objek wisata “umum” dengan berbagai macam atraksi diluar konteks sejarah maupun pengelolaan *cultural heritage*. Dengan model pengelolaan seperti yang diterapkan di Benteng Van der Wijck tersebut, adakah yang dirugikan dan siapa saja yang merasa diuntungkan? Tampaknya selama ini berbagai pihak yang berkepentingan rasanya tidak ada yang peduli terhadap beberapa fenomena mutakhir yang ditemukan di kawasan cagar budaya tersebut.

4. *Benteng Willem di Ungaran*



Angka MDCCLXXXVI dianalogikan sebagai angka tahun pembangunan benteng ini

Benteng Willem II terletak di Kota Ungaran tepatnya di tepi jalan raya antara Ambarawa – Semarang. Benteng ini dibangun pemerintah Belanda pada tahun 1786 seperti tertulis pada prasasti pendek (MDCCLXXXVI) di atas pintu gerbang masuk benteng tersebut. Sejarahnya, antara tahun 1755 - 1797 (setelah perjanjian Giayanti), sejumlah benteng berukuran relatif kecil dibangun antara Semarang – Solo atau Semarang – Yogya, seperti misalnya di Ungaran dan Ambarawa. Saat itu di Ungaran dibangun Fort Outmoeting, yang berarti Benteng Pertemuan. Penamaan Benteng tersebut untuk memperingati pertemuan bersejarah antara Pakubuwono II dengan Gubernur Jendral Van Imhoff pada 11 Mei 1746. Beberapa benteng yang dibangun baik di Ungaran maupun Ambarawa, substansinya adalah untuk dijadikan pos pemantauan kegiatan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dengan berbagai pihak yang menggunakan akses jalan darat Solo-Semarang dan Yogya-Semarang. Pada tahun 1849, tanpa perlawanan benteng itu oleh Belanda diserahkan kepada Inggris. Sejak itulah bangunan benteng dijadikan rumah peristirahatan untuk proses penyembuhan pasien. Maka saat itu diangkat seorang perwira kesehatan untuk memimpin misi kemanusiaan itu. Karena memang tidak direncanakan untuk rumah sakit, maka bentuk dan struktur bangunan tidak seperti umumnya rumah sakit. Persisnya benteng ini terdiri dari 2 bangunan bertingkat dengan dikelilingi tembok setebal 1 meter. Di tengah terdapat lahan kosong, dengan sayap kanan (dari depan) berupa lorong. “Konon ruang ini dulu pernah dipakai tempat sembahyang Pangeran Diponegoro,” jelas Budiarto yang dikutip oleh Harian Suara Merdeka. Bahkan ketika zaman Jepang, lorong

ini pernah dipakai untuk menyiksa para tahanan perang, sedangkan ruang lain dipakai untuk ruang tahanan (Suara Merdeka Cybernews, 11 Juni 2010).



Bagian lain benteng Willem yang telah rusak berat
dan tidak terawat

Lorong bawah tanah
konon tempat ruang
tahanan

Sejak beberapa tahun terakhir ini Benteng Willem Ungaran ramai dibicarakan dalam berbagai media massa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan benteng tersebut oleh pemerintah Kabupaten Semarang. 16 keluarga penghuni benteng berhasil dipindahkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dengan imbalan tiap-tiap keluarga sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Akhirnya pada tahun 2006-2007 Benteng Willem Ungaran telah kosong dan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan dana APBD sebesar 1.53 milliard untuk pembangunan dan pengembangan Benteng Willem Ungaran. Akan tetapi sampai sekarang anggaran dan rencana pembangunan serta pengembangan Benteng Willem Ungaran tidak kunjung terealisasi, karena adanya kepentingan pihak lain yang belum dapat menerima rencana tersebut.

Kepolisian Resort Semarang yang mengklaim sebagai pemilik sah asset tersebut minta ganti rugi atau tukar guling dengan pembangunan gedung asrama. Oleh karena belum ada titik temu antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kepolisian Resort Semarang, maka DPRD Kabupaten Semarang belum menyetujui dana yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Benteng Willem Ungaran tersebut (Kompas, 10 Juni 2010). Hingga sekarang Benteng Willem Ungaran masih tetap dalam keadaan kosong, belum ada kepastian perlakuan apa yang akan diberikan kepadanya.

5. *Fort Santiago di Manila*



Salah satu bangunan dalam kompleks Fort Santiago



Pintu masuk Fort Santiago, Manila, Phillippina

Di kota Manila, ada benteng atau Fort Santiago yang dibangun dengan bentuk dan arsitektur mirip dengan Fort Rotterdam di Makassar. Fort Santiago terletak di kompleks Intramuros, sebuah kawasan peninggalan keraton Raja Sulaiman, seorang raja muslim yang berkuasa di Manila pada saat itu. Dalam pemugarannya, hanya beberapa bagian bangunan yang masih dapat dikembalikan kepada bentuk semula. Sebagian besar dari Fort Santiago tersebut dibiarkan

begitu saja, hanya dinding-dinding yang masih berdiri diperkuat dengan kerangka dari plat besi. Walaupun dinding-dinding tersebut sudah tidak lagi menahan konstruksi atap, tetapi karena kondisinya yang sudah rapuh, maka perlu penguatan. Diantara sisa-sisa bangunan dalam benteng, ada salah satu bangunan yang berhasil dipugar dan sekarang difungsikan sebagai museum. Beberapa bagian lain yang masih berada dalam kompleks benteng tersebut ada yang difungsikan sebagai souvenir shops dan kantin. Penataan Fort Santiago terutama dalam model pertamanannya tidak terlalu bergaya formal seperti di Fort Rotterdam sekarang. Di kompleks Fort Santiago pohon-pohon tinggi dan rindang tetap dibiarkan tumbuh dan dipelihara, sehingga tetap kelihatan alami. Demikian pula dengan lorong-lorong di bawah tanah, walaupun sebagian besar telah runtuh, akan tetapi sejauh mungkin masih dipugar, dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.



Sisi lain bagian dalam Fort Santiago

Fort Santiago awalnya terbuat dari kayu dan tanah, dibangun pada pertengahan tahun 1500. Benteng itu dibangun saat masa kepemimpinan Rajah Sulayman, pemimpin masyarakat Melayu Muslim di kawasan yang bernama Maynilad, artinya tempat tanaman air berbunga seperti bintang tumbuh. Kata Maynilad kemudian berubah menjadi Manila. Tahun 1570, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Martmn de Goiti, Juan de Salcedo, dan Miguel Lspez de Legazpi, datang ke Manila dan menyerang masyarakat muslim. Tahun 1571 pasukan Spanyol menang perang dan menjadikan Manila sebagai pusat pemerintahan kolonialnya. Spanyol terus melakukan pendudukan hingga menguasai nyaris seluruh wilayah Filipina sekarang.

Sejarah Fort Santiago diawali dari tahun 1571, setelah Spanyol di bawah pimpinan Fuerza de Santiago berhasil menghancurkan penguasa Muslim setempat yaitu Raja Sulaiman. Tahun 1574 -1575 Spanyol berhasil mengalahkan orang-orang Cina yang menduduki wilayah Manila dan berprofesi sebagai bajak laut. Rekonstruksi benteng dengan menggunakan batu-batu andesit baru dilakukan pada tahun 1589 dan selesai tahun 1592 dan dikenal Fort Santiago. Nama benteng tersebut diambil dari nama pimpinan pasukan Spanyol Fuerza de Santiago yang berhasil menduduki wilayah Manila dan sekitarnya. Di bawah kekuasaan Spanyol selama 333 tahun Fort Santiago dijadikan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah baik ke Amerika maupun ke Eropa (www.en.wikipedia.org/wiki/fort_santiago).

6. *Fort Monroe di Hampton, Virginia*

Fort Monroe yang terletak di sebuah teluk di kota Hampton, Virginia ini merupakan benteng pertahanan tentara Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1818. Teluk Hampton ini sejak awal abad XVII AD sudah menjadi tempat transit terutama bagi orang-orang Eropa yang melakukan ekspedisi ke benua Amerika, karena lokasinya yang sangat strategis untuk berlandung. Oleh karena itu pasca Perang Dunia I Amerika Serikat memanfaatkan lokasi tersebut untuk dijadikan benteng pertahanan mereka. Sejarah menjelaskan bahwa benteng tersebut menampung sedikitnya 600 pasukan disaat – saat negara aman, dan mampu menampung 2.625 pasukan dalam masa peperangan.



Benteng “Fort Monroe” dilihat dari udara, parit keliling benteng masih aktif berfungsi



Fort Monroe dari arah depan dengan latar belakang Laut bebas

Terlepas dari latar sejarah yang tidak dapat diuraikan secara kronologis, dalam kaitannya dengan pengelolaan bangunan tinggalan masa lalu, pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan kembali (*reuse*) Fort Monroe yang dilakukan oleh pemerintah setempat, berdasarkan penelusuran penulis di dunia maya, merupakan upaya pelestarian dan

pemanfaatan tinggalan pusaka budaya yang benar – benar profesional. Upaya membangun, mengembangkan, dan memanfaatkan kembali Fort Monroe tidak hanya memugar bangunan lama, akan tetapi dilakukan pula penambahan bangunan ataupun konstruksi baru dengan harus mengikuti peraturan pemerintah dan tidak menyalahi undang – undang. Selain dari pada itu dalam pemanfaatan kembali Fort Monroe ini harus dipertimbangkan :

1. Strategi dampak ekonomi
2. Pertimbangan lingkungan
3. Strategi Kepariwisata
4. Transportasi dan infrastruktur

Berdasarkan keempat hal tersebut di atas, maka dalam perencanaannya ada beberapa hal penting yang harus diprioritaskan yaitu :

- a. Perlindungan tempat bersejarah dan tetap dijaga kepentingannya
- b. Terbuka (untuk pemanfaatan)
- c. Membangun taman atau ruang terbuka dalam skala besar
- d. Mencari keberlanjutan ekonomi
- e. Memungkinkan pengembangan baru, dengan batas-batas yang ketat

Hasil dari sistem pengelolaan yang diterapkan pada proyek pemanfaatan kembali benteng Fort Monroe ini dapat dikatakan sangat sempurna, karena telah mempertimbangkan berbagai kepentingan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Yang lebih penting lagi yaitu tidak adanya pihak-pihak terkait yang dirugikan atau merasa dirugikan.

C. Kawasan Strategis Benteng “Mangkarak” Vastenburg



Parit keliling benteng Vastenburg



Pintu gerbang sisi timur Benteng Vastenburg

Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan salah satu pusat pemerintahan di Jawa, sudah pasti memiliki potensi berbagai sumberdaya. Oleh karena itu bagi Belanda merupakan sasaran yang harus dapat dikuasai apabila akan melanggengkan penjajahannya. Setelah Pemerintahan VOC “menaklukkan” Sunan Paku Buwono III, maka dibangunlah Benteng Vastenburg di tempat yang tidak jauh dari Keraton Kasunanan. Benteng Vastenburg terletak di pusat kota Surakarta, di ujung jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Secara diplomatis pembangunan Benteng Vastenburg akan membantu mengamankan Kraton Kasunanan dari serangan lawan-lawannya. Namun pada hakekatnya adalah upaya Belanda dalam mengantisipasi adanya kekuatan dari Keraton Kasunanan yang mungkin sewaktu-waktu akan menyerangnya. Strategi seperti ini rupa-rupanya oleh Belanda dijadikan sebuah model yang dapat ditemukan di beberapa tempat lain seperti Benteng Vredenburg yang dibangun tidak jauh dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.



Sudut luar benteng sisi barat-daya

Fungsi Benteng Vastenburg yang dibangun oleh Baron Van Imhoff pasca Perjanjian Giyanti ini adalah pusat pemerintahan dan pertahanan kolonial Belanda yang ada

di Surakarta. Selain benteng, Belanda juga membangun beberapa gedung lain di sekitar Vastenburg baik untuk keperluan perkantoran maupun perumahan mereka. Benteng dan gedung-gedung megah bercorak arsitektur Eropa ini merupakan saksi sejarah bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Surakarta khususnya, sehingga harus dilestarikan. Tentang upaya pelestarian bangunan peninggalan kolonial ini kadang-kadang masyarakat memiliki persepsi yang salah, misalnya mempertahankan tinggalan kolonial sama dengan mengingatkan kesengsaraan bangsa. Oleh karenanya segala sesuatu yang berciri kolonial harus dihapuskan. Persepsi seperti ini harus diluruskan.

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berangsur-angsur orang-orang Belanda dan Jepang kembali ke negara mereka masing-masing, selanjutnya segala asset milik kolonial dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk pula benteng Vastenburg dan bangunan-bangunan lain di kawasan tersebut. Fungsi Benteng Vastenburg “part two” pun berubah, yang dahulunya merupakan sarana pertahanan kolonial, maka pada saat pasca proklamasi Vastenburg

menjadi pusat atau markas pertahanan Tentara Nasional Indonesia. Terakhir benteng ini dimanfaatkan untuk markas Kompi Brigade Infanteri Komando Strategi Angkatan Darat.

Berdasarkan prasasti yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam IV Diponegoro tanggal 29 Oktober 1990 yang ditemukan di kompleks ini diketahui bahwa selama revolusi Vastenburg dijadikan basis atau kedudukan Batalyon IV Pulanggeni, Resimen I, Divisi X. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan di Dalem Purbonegaran, Solo pada tanggal 17 Oktober 1945, tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Adapun berdasarkan prasasti yang ditanda tangani oleh Menteri Sosial Prof. Dr. Haryati Soebadio pada tanggal 1 Maret 1989 diketahui bahwa Vastenburg juga dijadikan sebagai Markas Laskar Putri Indonesia Surakarta yang dibentuk pada tanggal 11 Oktober 1945.

Selanjutnya pemanfaatan Benteng Vastenburg "*part three*" pada tahun 1986 terjadi saat Walikota Surakarta dijabat oleh Pak Hartomo. Berdasarkan SK Walikota, akhirnya markas Brigif Kostrad dipindahkan. Kemudian pada tahun 1992, pemerintah berinisiatif untuk menyerahkan pengelolaan tanah sekitar Benteng Vastenburg kepada investor swasta, karena pemerintah kota membutuhkan dana guna pemindahan Brigif Kostrad. Semenjak itu, kepemilikan Benteng Vastenburg jatuh ke tangan individu atau investor swasta. Terkait dengan status kepemilikan Benteng Vastenburg saat ini, informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa kepemilikan dibagi ke dalam sembilan bagian tanah dan seluruhnya hanya mempunyai Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah sekitar Benteng Vastenburg (periksa tabel di bawah).

Bagian	Pemegang Hak: Atas Nama	Luas Tanah (m ²)
B. 383	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	3.545
B. 384	PT. Benteng Perkasa Utama, Sukoharjo	3.210
B. 385	PT. Benteng Gapuratama, Surakarta	20.260
B. 386	PT. Benteng Perkasa Utama, Sukoharjo	2.875
B. 387	PT. Benteng Gapuratama, Surakarta	9.260
B. 388	PT. Benteng Gapuratama, Surakarta	7.485
B. 380	PT. Benteng Perkasa Utama, Sukoharjo	3.210
B. 606	Ny. Indri. Luas Tanah	3.673
B. 607	Ny. Indri.	3.348
Luas Keseluruhan		56.866

(Sumber data : Badan Pertanahan Nasional Surakarta, disunting dari: Rohmad Suryadi Dkk.)



Sisa-sisa reruntuhan bangunan yang ada di dalam kompleks Benteng Vastenburg

Dalam wawancara langsung dengan Bapak Robby Sumampouw pada tanggal 29 Mei 2010 di Rumah Makan Hailay, Solo, dikatakan bahwa Bank Danamon bisa mem-

bangun gedung baru, mengapa yang lain dilarang? Benteng Vastenburg dapat dibayangkan betapa megahnya apabila dapat dikembalikan baik fisik maupun ruhnyanya seperti kondisi pada abad XVII AD yang lalu. Bangunan yang memiliki gaya dan arsitektur Eropa tersebut merupakan bukti sejarah yang monumental tentang penjajahan bangsa Belanda atas bangsa Indonesia, yang sekaligus juga menjadi saksi atas perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila bangunan-bangunan sejenis Benteng Vastenburg perlu dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang amat tinggi.

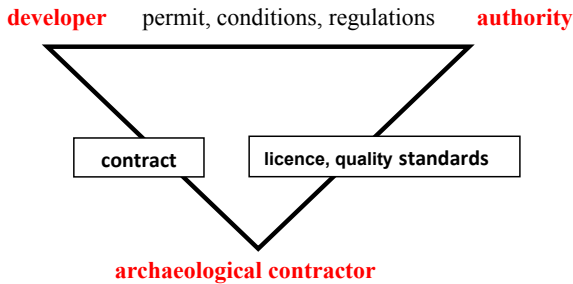
Kondisi Benteng Vastenburg saat ini tinggal tembok keliling dan beberapa bastion, sedangkan komponen bangunan yang ada di dalamnya telah rata dengan tanah. Walaupun demikian saya yakin apabila dilakukan kajian dan penelitian oleh para ahli arkeologi, sejarah dan arsitek akan mampu merekonstruksi kembali kompleks Benteng Vastenburg ke bentuk semula. Apabila bentuk fisik bangunan tersebut telah utuh kembali, maka ruh dapat ditiupkan dengan cara memfungsikan atau memanfaatkan bangunan tersebut yang berguna bagi masyarakat luas. Lokasi Benteng Vastenburg yang berada di jantung kota jelas akan menjadi pusat perhatian setiap orang yang berkunjung ke Kota Solo. Dengan kata lain keberadaan Benteng Vastenburg akan menjadi salah satu ikon menarik dan akan menjadi salah satu *center point* Kota Solo.

D. Bagaimana Mengelola Benteng Vastenburg?

Sebelum kita membahas bagaimana mengelola Benteng Vastenburg ke depan, sebaiknya kita simak dahulu tentang sistem pengelolaan benteng – benteng lain seperti yang telah diuraikan di atas. Beberapa catatan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini ada beberapa model pengelolaan benteng kolonial baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia yang semuanya dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan benteng di masa depan. Beberapa model yang dapat kita simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Model non profit oriented, seperti yang dilakukan di benteng Fort Rotterdam, Vredeburg, dan Fort Santiago;
2. Model profit oriented, seperti yang terjadi di benteng Van der Wijck di Gombong;
3. Model campuran seperti pengelolaan yang diterapkan di Fort Monroe;

Sistem pengelolaan Sumberdaya budaya pada umumnya di Indonesia hingga saat ini masih terkesan didominasi oleh pemerintah. Selain kurangnya peran serta masyarakat, di sektor pemerintahan yang terkotak-kotak antara tugas penelitian, pelestarian, dan pemanfaatannya sehingga rentan akan *mis communication* akibat munculnya egoisme sektoral. Terlepas dari semua itu, saya yakin diantara para pemerhati sumberdaya budaya akan setuju agar ada upaya pelestarian dan pemanfaatan Benteng Vastenburg sehingga tidak “mangkrak” seperti yang kita lihat sekarang. Namun demikian, dalam kasus Benteng Vastenburg ini terkait beberapa pihak yang berkepentingan, terutama antara



“Lemahnya” sistem manajemen sumberdaya arkeologi di Indonesia, kadang-kadang muncul berbagai kasus terkait dengan pengelolaan tersebut antara lain misalnya dalam rencana-rencana pemanfaatan kembali suatu obyek sumberdaya arkeologi seperti benteng-benteng tinggalan masa kolonial.

Kasus yang terjadi pada Benteng Vastenburg, Surakarta dan Benteng Willem di Ungaran, sudah saatnya kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Berbagai *stake holders* yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya budaya tersebut harus dapat menyatukan persepsi dan menentukan langkah konkrit demi pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya tersebut. Kasus lain seperti yang dilakukan oleh pengelola Benteng Van der Wijck, dapatkah dibenarkan oleh undang-undang tentang Benda Cagar Budaya?

F. Penutup

Kasus pengelolaan Benteng Vastenburg yang sampai saat ini belum diketahui bagaimana mencari solusi yang tepat, sehingga memberikan kesan kepada masyarakat bahwa masing-masing pihak yang berkepentingan baik pemilik asset maupun pemerintah yang menguasainya seolah-olah

tidak mempedulikan asset tersebut. Benteng Vastenburg yang terletak di pusat kota Solo mestinya merupakan properti yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Mengapa kawasan situs Benteng Vastenburg dibiarkan (kata orang Solo: “mangkrak”) seperti yang kita lihat sekarang ini? Solo sebagai kota budaya akan menimbulkan suasana dan kesan yang bertolak belakang apabila sumberdaya budaya yang berada di jantung kota tersebut dibiarkan tidak terpelihara.



Pemanfaatan Fort Monroe di Hampton, Virginia, USA Tampak beberapa bangunan baru dalam benteng

Sebagai salah satu sumberdaya budaya yang termasuk benda cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang, maka dalam pengelolaan kawasan situs Benteng Vastenburg tersebut akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Benteng Vastenburg yang utama adalah pemilik dan

pemerintah sebagai penguasa yang hingga saat ini belum mendapatkan bagaimana mengelola obyek benda cagar budaya tersebut, agar masing-masing *stakeholder* tidak merasa dirugikan. Memang, pada beberapa tahun yang lalu telah terjadi mismanajemen dalam pemanfaatan kawasan situs Benteng Vastenburg karena ketidak tahuan masing-masing pihak tentang bagaimana mengelola sumberdaya budaya tersebut. Oleh karena itu agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, maka perlu langkah-langkah akademis agar permasalahan yang selama ini “tergantung” dapat *diundhuh* yang hasilnya dapat dinikmati oleh berbagai pihak.

Perlunya penelitian terpadu lintas disiplin guna mengungkap keaslian Benteng Vastenburg baik dari sudut pandang arkeologi, sejarah, dan arsitekturnya. Selanjutnya terkait dengan permasalahan pemanfaatan, pentingnya mengintegrasikan antara data arkeologi, sejarah, dan arsitektur pada kebijakan manajerial dalam pengelolaan kawasan Benteng Vastenburg. Akhirnya akan didapatkan model pengelolaan yang tidak merugikan salah satu pihak yang terkait dalam berbagai kepentingan. Salah satu diantaranya ialah model pemanfaatan (*reuse planning*) kawasan situs Benteng Vastenburg. Diharapkan model seperti tersebut merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan salah satu kasus pengelolaan sumberdaya budaya yang ada di Kota Solo. Vastenburg hanyalah satu contoh kasus, masih banyak kasus yang serupa di beberapa kota dan wilayah di Indonesia yang belum dapat diselesaikan. Mudah – mudahan tulisan ini dapat memberikan wawasan kita semua dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa atau yang mirip dengan apa yang terjadi di Benteng Vastenburg.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan satu gagasan tentang bagaimana mencari win-win solution dalam pengelolaan Benteng Vastenburg. Bagian bangunan benteng yang masih tertinggal seperti tembok dan parit keliling serta reruntuhan bangunan di dalam benteng tetap dilestarikan. Bangunan baru dapat didirikan di dalam benteng tersebut dengan ketentuan beberapa meter dari pagar/tembok benteng (tugas arsitek dan peneliti lain). Demikian pula untuk tetap dapat memberikan tentang komponen bangunan lama yang ada didalam benteng, maka lantai pertama dari bangunan baru tersebut harus beberapa meter di atas bangunan yang dilindungi. Selanjutnya tidak perlu dibatasi berapa lantai bangunan yang akan didirikan semisal hotel ataupun mall, tergantung dari perhitungan para ahli sipil dan investor maupun pemilik. Apabila hal ini dapat disetujui, saya yakin Vastenburg akan segera dapat dikelola dengan baik dan akan bermanfaat bagi kota dan masyarakat Surakarta pada umumnya.

KEPUSTAKAAN

Kasnowihardjo, Gunadi, 2001. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, ISBN.

Kasnowihardjo, Gunadi, 2004. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi-2*, diterbitkan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat Daerah Kalimantan, ISBN.

Rohmad Suryadi (D0305058), Isnaini Rahmat (D 0305041), Ivan Andimuhtarom (D0206060), Tanpa tahun terbit, *Keberadaan Benteng Vastenburg, Diantara Realitas dan Harapan: Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Cagar Budaya Benteng Vastenburg Di Kota Surakarta*.

Suara Merdeka Cybernews, tanggal 11 Juni 2010, "Benteng Willem Ungaran".

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/10/15090963/benteng.ungaran.dijadikan.penanda>

www.bentenggombong.com

[www.dailypress.com/.../fort-monroe-PLGO100101154020000.topic-Amerika Serikat](http://www.dailypress.com/.../fort-monroe-PLGO100101154020000.topic-Amerika%20Serikat)

www.intramurosadministration.com/fort.html

www.philippines-travel-guide.com/fort-santiago-photos.html

www.rendez-vous-batavia.nl/photogallery/sulawesi/fort_rotterdam.pdf

www.en.wikipedia.org/wiki/fort_santiago

**KEHIDUPAN DI BALIK TEMBOK
BENTENG DI MASA LAMPAU:
HASIL PENELITIAN BALAI ARKEOLOGI
YOGYAKARTA DI BENTENG SUMENEP
DAN BENTENG LODEWIJK, JAWA TIMUR**

oleh:

Novida Abbas

A. Pendahuluan

Aspek pertahanan dikatakan telah ada sejak peradaban manusia dimulai, dilandasi oleh tujuan untuk mengantisipasi ancaman yang datang. Pada masa prasejarah, manusia telah menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan hidup, baik dari ancaman binatang buas, alam, maupun kelompok manusia lainnya, mereka harus berada di suatu posisi yang strategis yang memungkinkan untuk melihat apabila ancaman datang dan sekaligus mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi (Hogg, 1975: 8). Di masa-masa selanjutnya aspek pertahanan diwujudkan dalam berbagai bentuk, dari yang sederhana

sampai rumit, di antaranya benteng, yang juga berkembang dalam bentuk dan ukuran yang beragam, sesuai dengan tuntutan zamannya. Pada umumnya benteng selalu berkonotasi dengan kemiliteran, peperangan, taktik dan strategi, maupun penguasaan wilayah. Namun demikian, sebagai data fisik, benteng bukanlah semata-mata sebuah fenomena militer. Benteng didirikan di suatu tempat tentunya dilandasi oleh pertimbangan baik strategi maupun ekonomi tertentu. Benteng dipertahankan maupun diserang oleh sekelompok pasukan, dan juga jatuh bangunnya suatu benteng tentunya ditentukan oleh kekuatan salah satu pihak tertentu (Duddy, 1979: xi). Benteng juga dapat dikategorikan sebagai permukiman, karena benteng umumnya dihuni dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya pada masa perang. Bahkan di masa damai biasanya benteng juga dihuni oleh sekelompok pasukan yang menjaga keberadaan benteng tersebut.

Benteng-benteng yang dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, baik yang didirikan oleh penguasa lokal/pribumi, maupun yang didirikan oleh penguasa kolonial, sudah dikaji dalam berbagai penelitian. Sebagai contoh pada zaman Belanda, Wall (1930/1931) pernah meneliti beberapa benteng Belanda di Sulawesi dan Nusantara Timur. Setelah kemerdekaan, sejumlah studi pernah dilakukan antara lain terhadap benteng-benteng Inggris dan Belanda di Sumatra (Tim Ditlinbinjarah, 1986), Maluku (Tim Ditlinbinjarah, 1982/1983), Sulawesi (Sarjiyanto, 2002), Kalimantan (Wibisono et al., 1995), dan Jawa (Hatmosuprobo, 1979; Abbas, 2001). Studi-studi tersebut pada awalnya tidak dilakukan secara spesifik, melainkan sebagai bagian dari

studi yang lebih luas terhadap suatu daerah/wilayah tertentu, atau studi kelayakan dalam kaitannya dengan pemugaran terhadap sebuah benteng tertentu. Sebagai contoh adalah studi yang dilakukan di Benteng Belgica, Bandaneira, Maluku (Tim Ditlinbinjarah, 1982/1983), yang ditekankan pada aspek disain Benteng Belgica untuk menyiapkan *master plan* bagi pemugaran benteng tersebut. Contoh lain adalah studi terhadap Benteng Speelwijck di Banten oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dalam suatu proyek jangka panjang untuk mengungkapkan berbagai aspek yang terdapat di kota Banten (Mundarjito et al., 1978). Dari beberapa contoh di atas tampak bahwa kajian arkeologis terhadap benteng masih bersifat umum, dalam arti belum dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik atas aspek-aspek tertentu dari sebuah benteng, misalnya situasi ekonomi dan sosial yang terjadi pada masa guna benteng tersebut. Pada umumnya yang dijadikan objek bahasan dalam penelitian-penelitian tentang benteng adalah aspek rancang bangun benteng serta aspek kesejarahannya. Dari studi-studi tersebut dapat diketahui misalnya tentang perkembangan rancang bangun benteng, peta politik, serta peta sejarah, dan perkembangan perekonomian di masa lampau.

Sebenarnya banyak aspek yang dapat diungkapkan dari penelitian terhadap sebuah benteng. Namun demikian belum banyak yang mengungkap kehidupan di dalam benteng itu sendiri pada masa gunanya. Padahal di dalam benteng tentunya pernah terjadi/pernah berlangsung kehidupan keseharian di luar aspek kemiliteran. Hal ini sebenarnya juga tercermin dari berbagai komponen yang ada di dalam benteng, yang menyiratkan adanya aspek kehidupan lain

di dalamnya selain aspek militer, misalnya saja tempat peribadatan, tempat rekreasi (kamar bola), dan dapur.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang hasil penelitian terhadap dua buah benteng Belanda, yaitu Benteng Sumenep dan Benteng Lodewijk, khususnya mengenai temuan artefaktual yang diperoleh di kedua benteng tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah: (1) mendeskripsikan temuan penelitian tentang sisa kehidupan masa lampau di dalam benteng; dan (2) mendeskripsikan, berdasarkan literatur, aspek-aspek non-militer yang umum dijumpai di balik benteng pada masa lampau. Benteng yang dibahas adalah 2 benteng yang pernah diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, yaitu Benteng Sumenep di Kalimo'ok, Sumenep, Madura (Abbas, 2006), dan Benteng Lodewijk di Pulo Mengare, Gresik, Jawa Timur (Abbas, 2007).

B. Hasil Penelitian di Benteng Sumenep dan Benteng Lodewijk

1. Benteng Sumenep

Situs Benteng Sumenep terletak sekitar 7 km di sebelah tenggara kota Sumenep, yaitu ke arah pelabuhan Kalianget. Lokasi ini secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Kalimo'ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Benteng Sumenep terletak sekitar 200 m di sebelah utara Sungai Marengan atau sekitar 3 km dari pantai. Benteng ini didirikan pada tahun 1785 dan awalnya dihuni oleh 25 sampai 30 serdadu Eropa (Hageman, 1858). Saat ini bekas benteng tersebut digunakan oleh Proyek Pengembangan Ternak Kecil. Dengan fungsi barunya tersebut, sejumlah

bangunan baru telah didirikan di bagian dalam maupun di sekitar benteng. Di sebelah utara dan timur benteng terdapat bangunan-bangunan kandang sapi dan kantor proyek, serta jalan setapak dari semen, sementara di sebelah barat ditumbuhi semak belukar yang cukup lebat, dan di sisi selatan terdapat jalan masuk menuju benteng.

Benteng Sumenep telah diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta sejak tahun 2003 sampai tahun 2006. Dari ekskavasi yang dilakukan di bagian dalam benteng, selain ditemukan struktur bangunan, juga ditemukan sebanyak 7535 fragmen artefak dan ekofak. Temuan tersebut terdiri atas fragmen tembikar sejumlah 2863 (37.9%), fragmen keramik sejumlah 738 (9.8%), fragmen kaca/gelas sebanyak 3063 (40.7%), fragmen logam sejumlah 704 (9.4 %), serta 166 fragmen tulang dan gigi binatang dan 1 fragmen tulang manusia (2.2%).

Temuan tembikar berasal dari 7 jenis wadah, yaitu kuali, jambangan, mangkuk, tempayan, cobek/*cowek*, kendi, dan anglo. Wadah-wadah tersebut memiliki variasi warna permukaan dari merah terang, coklat kemerahan, hingga coklat kehitaman. Fragmen-fragmen wadah tersebut mayoritas polos, hanya sejumlah kecil fragmen yang menunjukkan penggunaan hiasan dengan teknik gores bermotif geometris.

Analisis terhadap temuan fragmen keramik menunjukkan adanya 4 jenis wadah, yaitu piring, mangkuk, cangkir, dan botol. Sebagian besar temuan berupa keramik Eropa (Belanda) dari abad XIX-XX, dan sisanya merupakan keramik Cina, baik dari dinasti Qing abad XVIII-XIX maupun keramik Cina modern dari abad XX. Fragmen keramik tersebut sebagian besar berbahan porselin berwarna putih, dan sebagian kecil berbahan batuan (*stoneware*).



Temuan terbanyak adalah fragmen kaca/gelas dan berasal dari 6 jenis wadah, yaitu gelas, botol, toples, lampu minyak, cepuk, dan ampul. Fragmen kaca ditemukan dalam warna putih, hijau, coklat, coklat kekuningan, dan biru. Temuan

terbanyak berasal dari bentuk botol dengan berbagai variasi, baik yang berleher pendek maupun panjang, serta berdasar bulat, lonjong, dan persegi. Pada beberapa botol terdapat tulisan di bagian badanya, di antaranya: *...lever ...scho... haarlem; Ryks eigendom; dan ..nheym ...et*. Selain itu banyak dijumpai bagian dasar botol yang mempunyai tulisan maupun angka, di antaranya: *Patent V Torley, MGD 750 B, MGD 500 B, MGD 400 M, dan 1500*. Kemungkinan angka-angka ini mengacu pada volume botol tersebut. Angka terkecil yang ditemukan di bagian dasar botol adalah 30, sementara angka terbesar adalah 1500. Fragmen botol memiliki 4 warna, yaitu putih, hijau, biru, dan coklat. Sementara itu fragmen gelas ditemukan dalam 2 jenis, yaitu gelas berkaki dan gelas tanpa kaki, dalam warna hijau dan putih. Fragmen toples memiliki 4 warna, yaitu putih, hijau, biru, dan coklat. Selanjutnya terdapat pula temuan berupa ampul yang dulunya berisi cairan obat/cairan suntikan, terlihat dari lubang pada bagian tutup ampul yang kecil tempat memasukkan jarum suntik.

Benda-benda logam yang ditemukan dalam ekskavasi seluruhnya telah teroksidasi, sehingga permukaannya kasar dan penuh karat berwarna coklat tua dengan bercak-bercak jingga. Sebagian besar temuan logam berupa elemen

bangunan seperti engsel dan paku, selain itu juga ditemukan pegangan pintu, teralis, dan kawat. Temuan logam lainnya



berupa mata uang, yang ditemukan sebanyak 5 buah. Salah satunya bertulisan *V.O.C.* dan berangka tahun 1760, sebuah lainnya bertulisan *Nederlandsch Indie* dengan angka tahun 1840. Sisanya tidak dapat diidentifikasi karena sangat aus.

Terakhir adalah temuan fragmen tulang dan gigi binatang serta tulang manusia. Sebagian besar berupa tulang dan gigi binatang merupakan sisa dari *bovidae*, sisanya berupa tulang *aves*. Tulang maupun gigi binatang tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas pengerjaan. Sementara sebuah fragmen tulang manusia merupakan fragmen tulang lengan manusia.

2. Benteng Lodewijk

Situs Benteng Lodewijk terletak sekitar 17 km di sebelah utara kota Gresik. Lokasi ini secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan Tanjung Wido, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Benteng ini terletak sekitar 200 m di sebelah utara muara Sungai Cemara, tepat di tepi Selat Madura bagian ujung barat. Areal benteng ditumbuhi vegetasi yang cukup lebat. Saat ini bekas benteng tersebut tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai. Benteng Lodewijk diteliti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta mulai tahun 2006 hingga tahun 2009 melalui serangkaian survei dan ekskavasi.

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, di benteng ini ditemukan struktur bangunan maupun temuan non-bangunan (artefak dan ekofak). Temuan artefak dan ekofak hasil ekskavasi seluruhnya berjumlah 10.626 fragmen, yang terdiri atas fragmen tembikar sejumlah 5.717 (53.8%), fragmen keramik sejumlah 1524 (14.3%), fragmen kaca sebanyak 1417 (13.3%), fragmen logam sejumlah 586 buah (5.5%), dan 1.382 fragmen tulang dan gigi binatang (13.1%).

Temuan yang dari segi kuantitas terbanyak jumlahnya adalah tembikar. Fragmen tembikar dari situs ini berasal dari 8 jenis wadah, yaitu kendi, teko, kual, jambangan, wajan, piring, mangkuk dan tempayan. Bekas-bekas striasi pada permukaan menunjukkan bahwa wadah-wadah tersebut dibuat dengan menggunakan roda pemutar. Sebagian besar fragmen berasal dari wadah tembikar polos, hanya sedikit temuan yang berhias, yaitu hiasan bermotif geometris dengan teknik gores.

Analisis terhadap temuan fragmen keramik menunjukkan adanya 7 jenis wadah, yaitu piring, mangkuk, cangkir, teko, sendok, botol, dan tem-



payan. Sebagian besar temuan berupa keramik Eropa dari abad XIX-XX, dan sisanya merupakan keramik Cina dari dinasti Qing abad XVIII-XIX. Fragmen keramik yang ditemukan berbahan dasar porselin serta batuan. Temuan sendok keramik dari benteng ini berupa sendok yang dikenal juga dengan istilah *sendok bebek*. Sementara botol keramik berbahan

batuan ada yang bertulisan di bagian badannya, di antaranya: *Brunnen Ludwigs – Grosherzogthum Hessen*.

Berikutnya adalah temuan fragmen kaca/gelas, yang berasal dari 3 jenis wadah, yaitu botol, toples, dan gelas. Warna temuan fragmen kaca adalah putih transparan, hijau terang, hijau gelap coklat, dan coklat kekuningan. Temuan terbanyak berupa botol dengan berbagai variasi, baik yang berleher pendek maupun panjang, serta berdasar bulat, lonjong, dan persegi. Sementara fragmen gelas ditemukan dalam bentuk gelas berkaki dan gelas tanpa kaki.

Benda-benda logam yang ditemukan dalam ekskavasi terdiri atas unsur bangunan, yaitu engsel dan paku; kancing logam; dan mata uang. Seluruh temuan tersebut telah teroksidasi, sehingga permukaannya kasar dan penuh karat berwarna coklat tua dengan bercak-bercak jingga. Temuan kancing baju berbahan logam berupa kancing dengan permukaan membulat dan rata tanpa lubang, sementara di sebaliknya terdapat lubang untuk mengaitkan kancing dengan baju. Sementara temuan mata uang sebagian besar berada dalam kondisi sangat aus. Di antara yang masih dapat dikenali terdapat salah satu mata uang dengan tulisan angka tahun “18..” dan tulisan *Nederlandsch Indie*. Pada beberapa mata uang lainnya masih terlihat lambang VOC dan angka tahun “..790”; dan pada mata uang lainnya tertera angka tahun “..85”. Angka-angka tahun yang telah aus tersebut seluruhnya tertera di bawah lambang VOC.

Temuan non-bangunan lainnya adalah fragmen tulang dan gigi binatang. Sebagian besar berupa tulang dan gigi *bovidae*, dan sisanya berupa *aves*. Selain itu ditemukan pula pipa, kancing baju, dan sikat gigi yang terbuat dari tulang.

Fragmen pipa rokok yang ditemukan berupa pipa dengan gagang lurus dan di bagian ujungnya terdapat bagian membulat untuk meletakkan tembakau. Temuan kancing baju berbentuk bulat dengan sebuah lubang di bagian tengahnya. Sementara itu temuan berupa fragmen sikat gigi adalah bagian kepala sikat gigi, yang ditunjukkan dengan adanya empat deret lubang-lubang tempat bulu sikat.

C. Diskusi dan Rangkuman

Dari analisis terhadap temuan di kedua benteng tersebut diketahui adanya penggunaan alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari para penghuni benteng di masa lalu. Pemenuhan kebutuhan keseharian itu di antaranya kebutuhan mengolah dan menyimpan bahan pangan, menyajikan makanan dan minuman, kebutuhan sandang, kebutuhan untuk kebersihan diri, serta alat bayar. Selain itu juga terlihat adanya pemenuhan untuk kebutuhan akan penerangan.

Kebutuhan mengolah bahan pangan, menyimpan serta menyajikan makanan dan minuman jenis temuan utamanya mengacu pada kategori wadah, seperti wajan, kuai, tempayan, piring, cobek, sendok, gelas, cangkir, botol, dan toples. Dari segi kuantitas, terlihat bahwa pemakaian wadah tembikar lebih menonjol dibandingkan dengan penggunaan wadah keramik atau kaca. Menilik jenis temuannya, terlihat bahwa wadah tembikar digunakan untuk memasak, menyimpan, dan menyajikan. Sementara itu temuan keramik umumnya berupa wadah untuk menyajikan dan menyimpan makanan maupun minuman, baik berupa sendok, piring, cangkir, teko, maupun botol. Sementara temuan kaca berupa wadah,

baik untuk menyimpan maupun menyajikan makanan dan minuman seperti botol, toples dan gelas; maupun non-wadah yaitu semprong lampu minyak untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan.

Di luar temuan-temuan tersebut, terdapat pula alat bayar berupa mata uang, yang secara umum berasal dari masa guna kedua benteng tersebut di atas (antara abad XVIII-XIX). Selain itu, terdapat pula temuan berupa kancing baju, baik dari logam maupun tulang, serta sikat gigi yang juga terbuat dari tulang, yang keduanya merupakan bagian dari perlengkapan pribadi penghuni benteng, yaitu menyangkut sandang/pakaian dan kebersihan pribadi.

Temuan berupa benda-benda perlengkapan hidup keseharian tersebut dapat memperkaya pengetahuan tentang benteng, di samping aspek-aspek lainnya seperti misalnya rancang bangun benteng. Kehidupan keseharian para penghuni benteng di masa gunanya dapat dilihat dari artefak yang tertinggal di dalam benteng, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kehidupan keseharian di balik tembok benteng di masa lalu. Aspek kehidupan di dalam benteng juga dapat diperoleh dari sumber sejarah, misalnya dari catatan Belanda. Faber (1931) menceritakan bahwa serdadu Belanda di abad XIX mendapat jatah makan (ransum) yang disediakan dengan menu sederhana. Pada pagi hari disediakan roti kering yang keras bersama kopi encer. Biasanya para serdadu memakan roti keras tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam kopi encer. Makan siang disediakan pada pukul 10 pagi, berupa semangkuk sup berisi sepotong daging ditambah dengan sepiring nasi dan sambal. Selanjutnya jatah makan terakhir dalam sehari disediakan pada jam 3 sore,

yang dikenal dengan istilah *souper*, berupa sepiring nasi dengan lauk sepotong perkedel, teri, dan sambal. Diceritakan pula bahwa dengan menu seperti di atas para serdadu sering menghabiskan gajinya untuk membeli makanan yang lebih enak bagi mereka.

Temuan berbagai peralatan keseharian untuk menyimpan, mengolah, maupun menyajikan makanan dari kedua benteng tersebut di atas sebagai hasil penelitian arkeologi, dapat melengkapi gambaran tentang kisah-kisah kehidupan keseharian para serdadu penghuni benteng di masa lalu yang diperoleh dari catatan sejarah. Sebagai perbandingan, dari penelitian terhadap Benteng Beauséjour, New Brunswick, Inggris, ditemukan kualiti-kualiti tembikar yang di dalam dokumen militer Inggris disebutkan sebagai tempat menyimpan daging untuk konsumsi para serdadu Inggris (Sussman, 2000).

Hasil-hasil penelitian semacam itu selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memberi “nyawa” pada pemanfaatan benteng tersebut selanjutnya. Sebagai contoh, Benteng Cochius (atau sekarang disebut Benteng van der Wijk) di Gombong yang sekarang telah dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, memiliki banyak ruang yang sebagian digunakan untuk memamerkan foto-foto pejabat militer dan sebagian dibiarkan kosong. Sekiranya di benteng tersebut telah dilakukan penelitian arkeologi terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, maka temuan hasil penelitian dapat dipamerkan di ruang-ruang tersebut yang tentunya akan menjadi tambahan atraksi tersendiri yang sekaligus dapat menambah wawasan dan pengetahuan pengunjung tentang benteng itu sendiri. Dengan demikian

riwayat benteng itu secara lengkap pada masa gunanya akan dapat diketahui oleh para pengunjung. Hal seperti ini sudah dilakukan di Benteng Rotterdam, Makassar, tempat hasil ekskavasi dari dalam benteng dipamerkan dalam sebuah museum mini di salah satu bangunan di dalam benteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Novida. 2001. Dutch Forts of Java: A Locational Study. Thesis. Singapore, National University of Singapore.
- _____. 2006. *Rancang Bangun dan Peran Benteng Sumenep*, Berkala Arkeologi Tahun XXVI Edisi No. 1. Hlm. 1-11. Yogyakarta. Balai Arkeologi.
- _____. 2007. *Aktivitas Kehidupan Masa Lalu di dalam Benteng Lodewijk*, Berita Penelitian Arkeologi No. 22. Yogyakarta. Balai Arkeologi.
- Duffy, Christopher. 1979. *Siege Warfare: The Fortress in the Early Modern World 1494-1660*. London/Henley. Routledge & Kegan Paul.
- Faber, G.H. von. 1931. *Oud Soerabaia*. Gemeente Soerabaia.
- Hageman, J. *Bijdrage tot de Kennis van de Residentie Madoera (eerste gedeelte)*, T.N.I. 20ste jaargang, 1ste deel. Hlm. 321-352. Zalt Bommel. Joh. Norman en Zoon.
- Hatmosuprobo, Suhardjo. 1979. *Kota Yogyakarta dan Benteng Vredeburch* (tidak diterbitkan). Yogyakarta. Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.

- Hogg, Ian V. 1975. *Fortress. A History of Military Defence*. London. MacDonald and Jane's.
- Mundardjito et al. 1978. *Laporan Penelitian Arkeologi Banten, Berita Penelitian Arkeologi No. 17*. Jakarta. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Sarjiyanto. 2002. *Benteng Balangnipa di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Pola Tata Ruang dan Arti Penting Kedudukannya)*, Berkala Arkeologi XXI No. 1. Hlm. 81-95. Yogyakarta. Balai Arkeologi.
- Sussman, Lynne. 2000. *British Military Tableware, 1760-1830*, Historical Archaeology Vol. 12. Hlm. 93-104.
- Tim Ditlinbinjarah. 1982/1983. *Studi Kelayakan Benteng Belgica dan Istana Mini Banda, Maluku* (tidak diterbitkan). Jakarta. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- _____. 1986. *Pemugaran Benteng Ujung Pandang, Sulawesi Selatan; Malborough, Bengkulu; Duurstede, Maluku*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Wall, V.I. van de. 1930/1931. *Nederlandsche Oudheden in Celebes*, N.I.O.N. 15de jaargang. Hlm. 293-305. Den Haag.
- Wibisono, Sonny Ch. et al. 1995. *Ekskavasi Situs Benteng Tabanio Tahap I, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*, Naditira Widya No. 01 Thn. I. Banjarmasin. Balai Arkeologi.